



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



2025

LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PANRB (BA.048)

AUDITED

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2026
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi,



Rini Widyantini

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2026
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi,



Rini Widyantini

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	xi
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
II. NERACA	2
III. LAPORAN OPERASIONAL	4
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. PENJELASAN UMUM	7
A.1. Profil dan Kebijakan	8
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
A.3 Basis Akuntansi	16
A.4 Dasar Pengukuran	16
A.5 Kebijakan Akuntansi	17
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	40
B.1 Pendapatan	42
B.1.1 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (Kelompok Akun 4251)	44
B.1.2 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (Kelompok Akun 4257)	46
B.1.3 Pendapatan Denda (Kelompok Akun 4258)	47
B.1.4 Pendapatan Lain-lain (Kelompok Akun 4259)	48
B.2 Belanja	50
B.2.1 Belanja Pegawai	51
B.2.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (Kelompok Akun 5111)	53
B.2.1.2 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS (Kelompok Akun 5115)	57
B.2.1.3 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK (Kelompok Akun 5116)	58
B.2.1.4 Belanja Honorarium (Kelompok Akun 5121)	60
B.2.1.5 Belanja Lembur (Kelompok Akun 5122)	62
B.2.1.6 Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito (Kelompok Akun 5124)	63
B.2.2 Belanja Barang	65
B.2.2.1 Belanja Barang Operasional (Kelompok Akun 5211)	67
B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional (Kelompok Akun 5212)	69
B.2.2.3 Belanja Barang Persediaan (Kelompok Akun 5218)	70
B.2.2.4 Belanja Jasa (Kelompok Akun 5221)	71
B.2.2.5 Belanja Pemeliharaan (Kelompok Akun 5231)	73
B.2.2.6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Kelompok Akun 5241)	74
B.2.2.7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (Kelompok Akun 5242)	77
B.2.3 Belanja Modal	78
B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Kelompok Akun 5321)	79
B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Kelompok Akun 5331)	81
B.2.3.3 Belanja Modal Lainnya (5361)	83
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	85
C.1 Aset Lancar	85
C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	85
C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas	86
C.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	87
C.1.4 Piutang Bukan Pajak	87
C.1.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	88
C.1.6 Piutang Bukan Pajak	89

C.1.7 Persediaan.....	90
C.2 Aset Tetap	92
C.2.1 Tanah.....	93
C.2.2 Peralatan dan Mesin	94
C.2.3 Gedung dan Bangunan	97
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	99
C.2.5 Aset Tetap Lainnya	100
C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	101
C.3 Piutang Jangka Panjang	102
C.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	103
C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	107
C.3.3 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto).....	108
C.4 Aset Lainnya.....	108
C.4.1 Aset Tak Berwujud	109
C.4.2 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	111
C.4.3 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya.....	112
C.4.4 Aset Lain-lain	113
C.4.5 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.....	115
C.5 Kewajiban Jangka Pendek	115
C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga	116
C.6 Ekuitas.....	117
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	119
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	120
D.2. Beban Pegawai	122
D.3 Beban Persediaan.....	126
D.4 Beban Barang Dan Jasa.....	129
D.5 Beban Pemeliharaan.....	134
D.6 Beban Perjalanan Dinas.....	137
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	139
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	143
D.9 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional.....	144
D.10 Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar.....	145
D.11 Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya.....	149
D.12 Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional.....	153
D.13 Surplus/Defisit-LO.....	154
E. PENJELASAN ATAS POS-POS PERUBAHAN EKUITAS	155
E.1 Ekuitas Awal	155
E.2 Surplus/Defisit-LO	155
E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	155
E.3.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	156
E.3.2 Koreksi Lain-lain	156
E.4 Transaksi Antar Entitas	157
E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	157
E.4.2 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL).....	158
E.4.3 Transfer Keluar.....	159
E.4.4 Transfer Masuk.....	160
E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung.....	160
E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas	161
E.6 Ekuitas Akhir.....	161
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	162
F.1 Progress Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).....	162
F.2 Pengungkapan Proses Sertifikasi Tanah di Pekayon dan Cipinang	164
F.3 Pengungkapan Pencatatan BMN berupa Apartemen	166
F.4 Belanja Pemeliharaan yang Menghasilkan Aset berupa Pagar	170

PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Neraca Percobaan AkruaI (Saldo Awal)
 Lampiran 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Kelompok Pendapatan / Akun
 Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Belanja / Akun
 Lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Satuan Kerja Menurut Sumber Dana / Jenis Belanja / Akun
 Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Sumber Dana / Program / Kegiatan
 Lampiran 6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Kelompok Pendapatan / Akun Tingkat Satuan Kerja
 Lampiran 7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kementerian/Lembaga Menurut Eselon I / Akun
 Lampiran 8. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kementerian/Lembaga Menurut Eselon I / Wilayah / Satuan Kerja
 Lampiran 9. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kementerian Negara/Lembaga Menurut Eselon I / Jenis Belanja
 Lampiran 10. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kementerian Negara/Lembaga Menurut Eselon I / Wilayah / Satuan Kerja
 Lampiran 11. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kementerian Negara/Lembaga Menurut Jenis Belanja / Akun
 Lampiran 12. Neraca Percobaan (Basis Kas) Tingkat Kementerian Lembaga
 Lampiran 13. Neraca Percobaan (Basis AkruaI) Tingkat Kementerian Lembaga
 Lampiran 14. Laporan Operasional Tingkat Kementerian
 Lampiran 15. Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Kementerian
 Lampiran 16. Neraca Tingkat Kementerian
 Lampiran 17. Laporan Realisasi Anggaran Tingkat Kementerian
 Lampiran 18. Nota Kesepakatan Angka Asersi Final
 Lampiran 19. Rincian Pengembalian Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025
 Lampiran 20. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu pada Tahun 2025
 Lampiran 21. Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2025 Audited
 Lampiran 22. KK Telaah PMK 232 2022 untuk Laporan Keuangan 2025 Audited
 Lampiran 23. Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perlakuan Akuntansi Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	22
Tabel 2 Perlakuan Akuntansi atas Saldo pada Rekening Lainnya	23
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	25
Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	31
Tabel 5 Perbedaan Situs web dengan Aplikasi berbasis web	35
Tabel 6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	36
Tabel 7 Rincian Revisi DIPA TA 2025	40
Tabel 8 Rincian Revisi DIPA Berdasarkan Program TA 2025	40
Tabel 9 Rincian Revisi DIPA Kementerian PANRB TA 2025	41
Tabel 10 Rincian Blokir Anggaran Kementerian PANRB pada 31 Desember TA 2025	41
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Pendapatan periode 31 Desember 2025 dan 2024	43
Tabel 12 Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Satuan Kerja periode 31 Desember 2025 dan TA 2024	44
Tabel 13 Rincian Perbandingan Realisasi PNBK Kelompok Akun 4251 31 Desember 2025 dan 2024	45
Tabel 14 Rincian Perbandingan Realisasi PNBK Kelompok Akun 4251 Berdasarkan Satuan Kerja Pendapatan 31 Desember 2025 dan 2024	45
Tabel 15 Rincian Perbandingan Realisasi PNBK Kelompok Akun 4257 31 Desember 2025 dan 2024	46
Tabel 16 Rincian Setoran Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga 3 Tahun 2025	47
Tabel 17 Rincian Perbandingan Realisasi PNBK Kelompok Akun 4257 Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024	47
Tabel 18 Rincian Perbandingan Realisasi PNBK Kelompok Akun 4258 31 Desember TA 2025 dan 2024	48
Tabel 19 Rincian Perbandingan Realisasi PNBK Kelompok Akun 4258 Berdasarkan Satuan Kerja periode 31 Desember 2025 dan TA 2024	48
Tabel 20 Rincian Perbandingan Realisasi PNBK Kelompok Akun 4259 TA 2025 dan 2024	49
Tabel 21 Rincian Perbandingan Realisasi PNBK Kelompok Akun 4259 Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024	49
Tabel 22 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025	50
Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program TA 2025	51
Tabel 24 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan TA 2024	51
Tabel 25 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Satuan Kerja 2025 dan 2024	51
Tabel 26 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025	52
Tabel 27 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024	53
Tabel 28 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Satuan Kerja 2025 dan 2024	53
Tabel 29 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS TA 2025	54
Tabel 30 Rincian Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS melalui mekanisme penyetoran dengan kode billing TA 2025	55
Tabel 31 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji & Tunjangan PNS periode TA 2025 dan 2024	56
Tabel 32 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS TA 2025 dan 2024	56
Tabel 33 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS Periode TA 2025	57
Tabel 34 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS TA 2025 dan 2024	57
Tabel 35 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS Berdasarkan Satuan Kerja 31 Desember TA 2025 dan 2024	58
Tabel 36 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK 31 Desember TA 2025	58
Tabel 37 Rincian Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK 31 Desember TA 2025	59
Tabel 38 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji & Tunjangan PPPK TA 2025 dan 2024	60
Tabel 39 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Berdasarkan Satuan Kerja 31 Desember TA 2025 dan 2024	60
Tabel 40 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Honorarium TA 2025	61
Tabel 41 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Honorarium TA 2025 dan 2024	61
Tabel 42 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Honorarium Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024	61
Tabel 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Lembur TA 2025	62
Tabel 44 Realisasi Belanja Lembur 31 Desember TA 2025 dan 2024	62
Tabel 45 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Lembur Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024	63

Tabel 46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito TA 2025	63
Tabel 47 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito TA 2025 dan 2024.....	64
Tabel 48 Rincian Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito TA 2025.....	65
Tabel 49 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito Berdasarkan Satuan Kerja periode TA 2025 dan 2024	65
Tabel 50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025	66
Tabel 51 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024	67
Tabel 52 Rincian Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024	67
Tabel 53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Operasional 2025	68
Tabel 54 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2025 dan 2024	68
Tabel 55 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024.....	69
Tabel 56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2025	69
Tabel 57 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2025 dan 2024	70
Tabel 58 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024	70
Tabel 59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2025	71
Tabel 60 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2025 dan 2024.....	71
Tabel 61 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Persediaan Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024.....	71
Tabel 62 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2025.....	72
Tabel 63 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Jasa TA 2025 dan 2024	72
Tabel 64 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Jasa Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024	73
Tabel 65 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025	73
Tabel 66 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dan 2024.....	74
Tabel 67 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024	74
Tabel 68 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025	75
Tabel 69 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025 dan 2024	76
Tabel 70 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024	76
Tabel 71 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri TA 2025.....	77
Tabel 72 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri TA 2025 dan 2024	77
Tabel 73 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024	78
Tabel 74 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2025	78
Tabel 75 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024	79
Tabel 76 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Satuan Kerja 31 Desember TA 2025 dan 2024	79
Tabel 77 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025	80
Tabel 78 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024	80
Tabel 79 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024	81
Tabel 80 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025	81
Tabel 81 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024.....	81
Tabel 82 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024	82
Tabel 83 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025	83
Tabel 84 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan 2024.....	83
Tabel 85 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024	84
Tabel 86 Rincian Aset Lancar pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	85
Tabel 87 Rincian Besaran UP per Kementerian 2025	86
Tabel 88 Rincian Rekening Induk dan Rekening Virtual Kementerian PANRB TA 2025	86
Tabel 89 Rincian Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024	87

Tabel 90 Rincian Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	88
Tabel 91 Rincian Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2025 berdasarkan kategori	88
Tabel 92 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2025 dan 2024	89
Tabel 93 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025.....	89
Tabel 94 Penyisihan Piutang Bukan Pajak (NETTO) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	90
Tabel 95 Mutasi Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2025.....	90
Tabel 96 Perbandingan Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	90
Tabel 97 Mutasi Persediaan 31 Desember 2025	91
Tabel 98 Rincian Aset Tetap pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	92
Tabel 99 Perbandingan Tanah 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	93
Tabel 100 Perbandingan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	94
Tabel 101 Mutasi Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025	95
Tabel 102 Perbandingan Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	97
Tabel 103 Mutasi Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025	98
Tabel 104 Perbandingan Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	99
Tabel 105 Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2025.....	100
Tabel 106 Mutasi Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025	100
Tabel 107 Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	101
Tabel 108 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025	102
Tabel 109 Mutasi Tambah dan Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025	102
Tabel 110 Rincian Piutang Jangka Panjang pada 31 Desember 2025 dan 2024	103
Tabel 111 Rincian Perbandingan Piutang Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	104
Tabel 112 Rincian Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	108
Tabel 113 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025	108
Tabel 114 Rincian Aset Lainnya pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	109
Tabel 115 Perbandingan Aset Tak Berwujud 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	109
Tabel 116 Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025	110
Tabel 117 Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025	112
Tabel 118 Rincian Perbandingan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	112
Tabel 119 Mutasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya TA 2025.....	112
Tabel 120 Rincian Transaksi RPATA 31 Desember 2025	113
Tabel 121 Rincian Aset Lain-Lain 31 Desember 2025	114
Tabel 122 Mutasi Aset Lain-lain 31 Desember 2025.....	114
Tabel 123 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2025.....	115
Tabel 124 Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada 31 Desember 2025 dan 2024	116
Tabel 125 Utang Kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	116
Tabel 126 Daftar Kontrak Transaksi RPATA yang BAST 31 Desember 2025	117
Tabel 127 Rincian Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	118
Tabel 128 Rincian Perbandingan Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024	119
Tabel 129 Rincian Perbandingan Pendapatan Operasional Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	120
Tabel 130 Rincian Perbandingan PNBP Tahun 2025 dan Tahun 2024	120
Tabel 131 Rincian Perbandingan Pendapatan PNBP Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	121
Tabel 132 Rincian Perbandingan Pendapatan PNBP pada LRA dengan LO Tahun 2025	121
Tabel 133 Rincian Perbandingan Beban Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024	121
Tabel 134 Rincian Perbandingan Beban Operasional Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	122
Tabel 135 Rincian Perbandingan Beban Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024	123

Tabel 136 Rincian Perbandingan Belanja Pegawai Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025 dan Tahun 2024	124
Tabel 137 Rincian Perbandingan Belanja Pegawai pada LRA dengan Beban Pegawai pada LO Tahun 2025	125
Tabel 138 Rincian Selisih Belanja Pegawai pada LRA dengan Beban Pegawai pada LO Tahun 2025	126
Tabel 139 Rincian Perbandingan Beban Persediaan Tahun 2025 dan Tahun 2024	127
Tabel 140 Rincian Perbandingan Beban Persediaan Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025 dan Tahun 2024	127
Tabel 141 Rincian Perbandingan Belanja Barang Persediaan pada LRA dengan Beban Persediaan pada LO Tahun 2025	127
Tabel 142 Rincian Selisih Belanja Pemeliharaan pada LRA dengan Beban Pemeliharaan pada LO Tahun 2025	128
Tabel 143 Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024	130
Tabel 144 Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025 dan Tahun 2024	131
Tabel 145 Rincian Perbandingan Belanja Barang dan Jasa pada LRA dengan Beban Barang dan Jasa pada LO Tahun 2025	132
Tabel 146 Rincian Selisih Belanja Barang dan Jasa pada LRA dengan Beban Barang dan Jasa pada LO Tahun 2025	133
Tabel 147 Rincian Perbandingan Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024	135
Tabel 148 Rincian Perbandingan Beban Pemeliharaan Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025 dan Tahun 2024	136
Tabel 149 Rincian Perbandingan Belanja Pemeliharaan pada LRA dengan Beban Pemeliharaan pada LO Tahun 2025	136
Tabel 150 Rincian Selisih Belanja Pemeliharaan pada LRA dengan Beban Pemeliharaan pada LO Tahun 2025	137
Tabel 151 Rincian Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan Tahun 2024	138
Tabel 152 Rincian Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025 dan Tahun 2024	139
Tabel 153 Rincian Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA dengan Beban Perjalanan Dinas pada LO Tahun 2025	139
Tabel 154 Rincian Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024	140
Tabel 155 Rincian Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025 dan Tahun 2024	140
Tabel 156 Rincian Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada LO Tahun 2025	141
Tabel 157 Prosedur Analitis LO V Neraca Layer 1 Tingkat KL Periode 14 Tahun 2025	142
Tabel 158 Rincian Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan Tahun 2024 ..	144
Tabel 159 Rincian Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025 dan Tahun 2024	144
Tabel 160 Rincian Perbandingan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024 ..	145
Tabel 161 Rincian Perbandingan Surplus/Defisit Pelepasan Aset Tahun 2025 dan Tahun 2024	146
Tabel 162 Rincian Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Tahun 2025 dan Tahun 2024	146
Tabel 163 Rincian Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025 dan Tahun 2024	147
Tabel 164 Rincian Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset pada LRA dengan LO Tahun 2025	147
Tabel 165 Rincian Perbandingan Beban Pelepasan Aset Tahun 2025 dan Tahun 2024	148
Tabel 166 Rincian Beban Pelepasan Aset Berdasarkan Jenis BMN yang Dihapuskan Tahun 2025	148
Tabel 167 Rincian Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025 dan Tahun 2024	149
Tabel 168 Rincian Perbandingan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024	149
Tabel 169 Rincian Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024	150
Tabel 170 Rincian Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025 dan Tahun 2024	150
Tabel 171 Rincian Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LRA dengan	

<i>LO Tahun 2025</i>	<i>151</i>
<i>Tabel 172 Rincian Penyesuaian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LRA dengan LO Tahun 2025</i>	<i>152</i>
<i>Tabel 173 Rincian Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024.....</i>	<i>152</i>
<i>Tabel 174 Rincian Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025 dan Tahun 2024</i>	<i>153</i>
<i>Tabel 175 Rincian Perbandingan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024</i>	<i>153</i>
<i>Tabel 176 Rincian Perbandingan Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024</i>	<i>154</i>
<i>Tabel 177 Rincian Perbandingan Ekuitas Awal 31 Desember 2025 dan 2024</i>	<i>155</i>
<i>Tabel 178 Rincian Perbandingan Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas 31 Desember 2025 dan 2024</i>	<i>155</i>
<i>Tabel 179 Rincian Perbandingan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 31 Desember 2025 dan 2024</i>	<i>156</i>
<i>Tabel 180 Rincian Perbandingan Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 2024</i>	<i>157</i>
<i>Tabel 181 Rincian Perbandingan DKEL Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2025 dan 2024</i>	<i>158</i>
<i>Tabel 182 Rincian Perbandingan DDEL Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2025 dan 2024</i>	<i>158</i>
<i>Tabel 183 Rincian Perbandingan Transfer Keluar Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan TA 2024</i>	<i>159</i>
<i>Tabel 184 Rincian Perbandingan Kenaikan/Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024</i>	<i>161</i>
<i>Tabel 185 Hasil Sementara Pelaksanaan Inventarisasi BMN</i>	<i>161</i>
<i>Tabel 186 Rincian Proses Sertifikasi Tanah di Pekayon dan Cipinang</i>	<i>164</i>
<i>Tabel 187 Rincian Rincian unit Apartemen South Hills</i>	<i>166</i>
<i>Tabel 188 Aset Peralatan dan Mesin pada Apartemen South Hills</i>	<i>167</i>
<i>Tabel 189 Rincian Koreksi Pengurangan Nilai Unit Apartemen South Hills</i>	<i>169</i>

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.022.002.726 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp307.811.485.898 atau mencapai 78,33% dari alokasi anggaran sebesar Rp392.980.127.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp236.139.236.521 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.048.830.899, Aset Tetap sebesar Rp203.481.883.704 dan Aset Lainnya sebesar Rp30.608.521.918.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.074.290.073 dan Rp232.064.946.448.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp767.010 sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp346.083.002.957 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp346.082.235.947).

Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp344.562.569.407) dan Rp0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp344.562.569.407).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp214.047.512.471, ditambah Defisit-LO sebesar (Rp344.562.569.407), ditambah Koreksi yang Menambah Ekuitasi sebesar Rp2.815.203.149, ditambah dengan transaksi antar entitas sebesar Rp359.764.800.235, terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp18.017.433.977, sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp232.064.946.448.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	TAHUN 2025				TAHUN 2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran	%	Realisasi
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	2.022.002.726	2.022.002.726	0	1.711.574.797
JUMLAH PENDAPATAN		0	2.022.002.726	2.022.002.726	0	1.711.574.797
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	148.836.963.000	146.527.426.345	(2.309.536.655)	98,45	145.334.254.028
Belanja Barang	B.4	173.759.803.000	129.681.594.836	(44.078.208.164)	74,63	232.266.903.912
Belanja Modal	B.5	70.383.361.000	31.602.464.717	(38.780.896.283)	44,90	55.737.772.931
JUMLAH BELANJA		392.980.127.000	307.811.485.898	(85.168.641.102)	78,33	433.338.930.871

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja disusun berdasarkan kompilasi LRA seluruh entitas pelaporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Jakarta Mei 2026

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,



Rini Widyantini

II. NERACA

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				JUMLAH	%
ASET					
ASET LANCAR	C.1				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-	-	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	-	-	-	
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.3	655.572.144	980.460.983	(324.888.839)	(33,14)
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	489.553.104	487.703.112	1.849.992	0,38
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -	C.1.5	(34.386.361)	(2.438.516)	(31.947.845)	1.310,13
Piutang Bukan Pajak	C.1.6	455.166.743	485.264.596	(30.097.853)	(6,20)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1.7	938.092.012	702.153.743	235.938.269	33,60
Persediaan					
Jumlah Aset Lancar		2.048.830.899	2.167.879.322	(119.048.423)	(5,49)
ASET TETAP	C.2				
Tanah	C.2.1	60.334.049.494	60.334.049.494	0	0,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	179.998.618.808	172.047.674.829	7.950.943.979	4,62
Gedung dan Bangunan	C.2.3	109.802.758.304	91.907.826.122	17.894.932.182	19,47
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	1.598.328.550	1.598.328.550	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	1.357.465.299	1.387.389.549	(29.924.250)	(2,16)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6	(149.609.336.751)	(141.536.489.542)	(8.072.847.209)	5,70
Jumlah Aset Tetap		203.481.883.704	185.738.779.002	17.743.104.702	9,55
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3				
Piutang Tagihan Tuntutan	C.3.1	763.958.056	764.867.146	(909.090)	(0,12)
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi					
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -	C.3.2	(763.958.056)	(764.867.146)	909.090	(0,12)
Tagihan Tuntutan					
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.3	-	-	-	-
(Netto)					
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-	0	0
ASET LAINNYA	C.4				
Aset Tak Berwujud	C.4.1	33.376.815.229	44.662.268.320	(11.285.453.091)	(25,27)
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.4.2	16.047.426.045			
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.3	3.893.353.386	3.488.838.700	404.514.686	11,59
Aset Lain-lain	C.4.4	2.713.642.180	4.976.068.210	(2.262.426.030)	(45,47)
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	C.4.5	(25.422.714.922)	(23.184.297.603)	(2.238.417.319)	9,65
Aset Lainnya					
Jumlah Aset Lainnya		30.608.521.918	29.942.877.627	665.644.291	2,22
JUMLAH ASET		236.139.236.521	217.849.535.951	18.289.700.570	8,40
KEWAJIBAN	C.5				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	4.074.290.073	3.802.023.480	272.266.593	7,16
JUMLAH KEWAJIBAN		4.074.290.073	3.802.023.480	272.266.593	7,16
EKUITAS	C.6				
Ekuitas		232.064.946.448	214.047.512.471	18.017.433.977	8,42
JUMLAH EKUITAS		232.064.946.448	214.047.512.471	18.017.433.977	8,42
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		236.139.236.521	217.849.535.951	18.289.700.570	8,40

Neraca Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh entitas pelaporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disusun melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Jakarta, Mei 2026

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Rini Widyantini

The official stamp is circular with a blue border. The text inside the stamp, arranged in a circle, reads: "KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. In the center of the stamp is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia.

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	2025	2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	767.010	0	767.010	0,00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		767.010	0	767.010	0,00
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2	146.555.227.345	145.347.317.028	1.207.910.317	0,83
Beban Persediaan	D.3	2.638.051.885	4.370.300.511	(1.732.248.626)	(39,64)
Beban Barang dan Jasa	D.4	99.608.049.963	131.983.450.323	(32.375.400.360)	(24,53)
Beban Pemeliharaan	D.5	14.237.311.681	13.007.938.923	1.229.372.758	9,45
Beban Perjalanan Dinas	D.6	55.813.429.135	134.985.384.602	(79.171.955.467)	(58,65)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	27.196.546.587	30.072.476.184	(2.875.929.597)	(9,56)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	34.386.361	2.438.516	31.947.845	1.310,13
JUMLAH BEBAN		346.083.002.957	459.769.306.087	(113.686.303.130)	(24,73)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.9	(346.082.235.947)	(459.769.306.087)	113.687.070.140	(24,73)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR					
Pendapatan Pelepasan Aset		1.523.450.800	1.433.000.000	90.450.800	6,31
Beban Pelepasan Aset		148.618.007	172.378.254	(23.760.247)	(13,78)
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.10	1.374.832.793	1.260.621.746	114.211.047	9,06
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		173.936.983	148.817.505	25.119.478	16,88
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		29.103.236	35.174.500	(6.071.264)	(17,26)
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.11	144.833.747	113.643.005	31.190.742	27,45
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12	1.519.666.540	1.374.264.751	145.401.789	10,58
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(344.562.569.407)	(458.395.041.336)	113.832.471.929	(24,83)
POS LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa		0	0	0	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	D.13	(344.562.569.407)	(458.395.041.336)	113.832.471.929	(24,83)

Laporan Operasional (LO) disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional, dan Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa, yang dikonsolidasikan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/ (Defisit)-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Jakarta, Mei 2026

Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi,



Rini Widyantini

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	2025	2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				JUMLAH	%
EKUITAS AWAL	E.1	214.047.512.471	163.324.631.271	50.722.881.200	31,06
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(344.562.569.407)	(458.395.041.336)	113.832.471.929	(24,83)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	2.815.203.149	(602.639.895)	3.417.843.044	(567,15)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.1	2.811.855.543	320.846.897	2.491.008.646	776,39
Koreksi Lain-lain	E.3.2	3.347.606	(923.486.792)	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	359.764.800.235	509.720.562.431	(149.955.762.196)	(29,42)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	18.017.433.977	50.722.881.200	(32.705.447.223)	(64,48)
EKUITAS AKHIR	E.6	232.064.946.448	214.047.512.471	18.017.433.977	8,42

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/(Defisit)-LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas, yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang akan disajikan di Neraca.

Jakarta, Mei 2026

Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi,


Rini Widyantini

A. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai salah satu Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan Pemerintahan Kementerian PANRB sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian PANRB ditetapkan sebagai Bagian Anggaran 048 menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dilakukan update informasi. Penjelasan bahwa tahun 2024 masih merupakan LK konsolidasi s.d. TW III namun di 2025 sudah sepenuhnya satker menpan.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan penetapan peraturan pelaksanaannya yang mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2024 mengakibatkan terhitung mulai tanggal tersebut satker KASN secara hukum resmi berhenti dan sudah tidak lagi beroperasi sebagai Entitas Akuntansi disebabkan oleh misi, fungsi, program dan kegiatan dan/atau seluruh tugas dan fungsi KASN telah dialihkan kepada Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Adapun seluruh proses likuidasi satker KASN termasuk proses pengalihan dari satker KASN ke satker Menpan telah selesai dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 dan seluruh proses pengalihan dari satker KASN ke BKN telah selesai dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024.

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis

A.1.1 Profil dan Kebijakan Teknis Satker Menpan

Cikal bakal dasar hukum pembentukan Kementerian PANRB adalah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (BAPEKAN) yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 1959. BAPEKAN merupakan Lembaga negara pertama yang mengurus urusan pendayagunaan aparatur negara yang dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan setingkat Menteri yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Dalam rangka memperkuat tugas BAPEKAN, pada tahun 1960 pemerintah membentuk Panitia *Retooling* Aparatur Negara (PARAN). Selanjutnya pada tahun 1966 pemerintahan Orde Baru membentuk Panitia Pembantu Presiden yang kemudian diberi nama Tim Pembantu Presiden untuk Penertiban Aparatur dan Administrasi Pemerintah atau disebut dengan Tim PAAP dan Panitia Koordinasi Efisiensi Ekonomi Negara dan Aparatur Pemerintah atau Proyek 13 yang kemudian diubah menjadi Sektor Penyempurnaan dan Penertiban Administrasi Negara atau Sektor Publik.

Walaupun pada tanggal 5 Mei 1962 BAPEKAN dibubarkan, namun BAPEKAN telah tercatat dalam sejarah menjadi akar lahirnya nomenklatur Menteri Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara atau Menpan pada tahun 1968. Dengan pembentukan Menpan, Tim PAAP dan Sekretariat KASN dilebur ke dalam Menpan. Sejarah nomenklatur Menpan sudah beberapa kali diubah, terakhir berganti nama menjadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 seiring ditetapkannya Perpres Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Penetapan Perpres tersebut dimaksudkan oleh Presiden sebagai penguatan peran dan tanggung jawab untuk lebih mengoptimalkan implementasi Reformasi Birokrasi sebagai salah satu agenda strategis kenegaraan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, satker Menpan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara. Satker Menpan berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Dalam melaksanakan tugasnya, satker Menpan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik dan transformasi digital pemerintah;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik dan transformasi digital pemerintah;
- c. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PANRB;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PANRB;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PANRB; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Sesuai dengan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna, bahwa tidak terdapat Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga secara tersendiri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, setiap Kementerian dan Lembaga wajib berpedoman pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, sesuai dengan arahan Menteri PPN/Bappenas dalam rangka penyelarasan arah pembangunan nasional, maka Visi Kementerian PANRB diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden: "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Sedangkan Kementerian PANRB melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan uraian sebagai berikut:

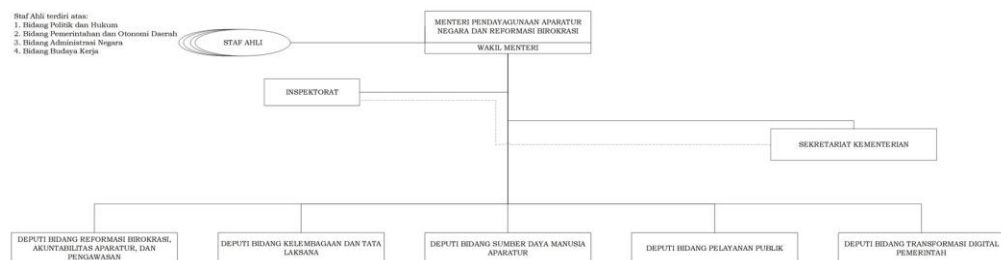
- a. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – *digital bureaucracy*.
- b. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.

- c. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
- d. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
- e. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
- f. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Visi dan Misi Kementerian PANRB tersebut disusun dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029. Renstra tersebut telah sejalan dengan arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Struktur Organisasi satker Menpan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Struktur Organisasi Kementerian PANRB



Nilai-nilai budaya Kementerian PANRB sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara adalah BerAKHLAK dengan rincian sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;

4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian PANRB Tahun 2025 disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). Laporan Keuangan ini mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian PANRB.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pada triwulan IV tahun 2019 satuan kerja lingkup Kementerian PANRB mulai mengimplementasikan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sesuai PMK Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK. 05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. SAKTI adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

A.2.1. Dasar Hukum dan Peraturan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan (*Audited*) disusun berdasarkan Laporan Keuangan (*Unaudited*) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Undang-undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Hibah;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023;
- PMK Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.06/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KM.6/2022 tentang Perubahan Kesebelas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI;
- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tentang Penggunaan Akun Khusus Covid-19.
- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5/PB/PB.6/2024 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis 19: Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian PANRB menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang

diterapkan Kementerian PANRB dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan PMK Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan REKENING KAS UMUM NEGARA yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening Kas Umum Negara (KUN).
- Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

- Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
- Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas Pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Belanja -LRA

(2) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).
- Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

Pendapatan - LO

(3) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang

ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan dari keuntungan penjualan aset diakui pada saat diterima oleh entitas.
 - b. Pendapatan denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas.
 - c. Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat diterima oleh entitas.
- Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.
- Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan pada Laporan Operasional dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- Di samping itu pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

Beban – LO

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset dan timbulnya kewajiban.
- Pengukuran Beban dibedakan sesuai dengan jenis beban, antara lain:
 - a. Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
 - b. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan

pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

- c. Beban Barang dan Jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
- d. Beban Pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.
- e. Beban Perjalanan Dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.
- f. Beban Penyusutan dan Amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.
- g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.
- Beban disajikan dalam Laporan Operasional entitas akuntansi/pelaporan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi serta penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan. Koreksi kesalahan beban yang mengakibatkan penerimaan kembali beban (pengembalian belanja yang tidak menghasilkan aset, baik Tahun Anggaran Berjalan/TAB maupun Tahun Anggaran Yang Lalu/TAYL), diperlakukan sebagai berikut:
 - 1. Apabila terjadi pada periode terjadinya beban, dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama; atau
 - 2. Apabila terjadi pada periode berikutnya, dibukukan sebagai

pendapatan lain-lain.

Koreksi kesalahan beban yang tidak mengakibatkan penerimaan kembali beban (tidak ada pengembalian belanja), diperlakukan sebagai berikut:

1. Apabila terjadi pada periode terjadinya beban, dibukukan sebagai pengurang/penambah beban yang bersangkutan pada periode yang sama; atau
2. apabila terjadi pada periode berikutnya, dibukukan sebagai koreksi ekuitas.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang dikuasai dan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang harus dipertanggungjawabkan.
- Kas dan Setara Kas diakui pada saat:
 - a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.
- Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Dalam hal transaksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang menggunakan mata uang asing diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, dst
 2. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang rupiah, dst
 3. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya
- Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - Dalam hal terjadi kerugian negara akibat hilangnya Kas dan Setara Kas, maka atas kas yang hilang dapat dilakukan reklasifikasi menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sepanjang diyakini dapat dibayarkan/dapat ditagih. Adapun prosedur reklasifikasi atas kas yang hilang menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi diatur oleh Dirjen Perbendaharaan.
 - Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka Kementerian Negara/Lembaga dan juga pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Perlakuan akuntansi untuk Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Perlakuan Akuntansi Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

No.	Kondisi	Pasangan Jurnal
1.	Kas lainnya berupa bunga, jasa giro yang belum disetor ke kas negara	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
2.	Kas lainnya berupa pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran tetapi belum disetor ke kas negara	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

3.	Kas lainnya berupa uang pihak ketiga lainnya yang belum diserahkan	Utang kepada Pihak Ketiga
----	--	---------------------------

- Perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening lainnya menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga diakui sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dengan rincian berdasarkan kondisi dan pasangan jurnalnya sebagai berikut:

Tabel 2 Perlakuan Akuntansi atas Saldo pada Rekening Lainnya

No.	Kondisi	Pasangan Jurnal	Rekening Lainnya
1.	Terdapat saldo kas pada tanggal pelaporan yang harus disetorkan ke Kas Negara dan merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAYL	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Rekening Penyaluran Dana Bantuan
2.	Terdapat saldo kas pada tanggal pelaporan yang harus disetorkan ke Kas Negara dan merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAB	Beban	
3.	Terdapat saldo dana yang tidak lagi dipergunakan untuk kegiatan kerjasama/kemitraan dan menurut perjanjian harus dikembalikan kepada pemberi dana kerjasama/kemitraan	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rekening Penampungan Dana Kerjasama/ Kemitraan
4.	Terdapat saldo dana yang masih akan dibayarkan oleh pihak penerima dana kepada pihak ketiga (penyedia barang/ jasa) berdasarkan tagihan yang telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang		
5.	Terdapat saldo dana yang tidak dipergunakan untuk kegiatan kerjasama/kemitraan dan akan disetorkan ke Kas Negara		
6.	Terdapat saldo kas yang belum terdapat kepastian sepenuhnya dapat diakui sebagai hak pemerintah dan berdasarkan ketentuan mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana	Dana Pihak Ketiga (untuk alasan kepraktisan, maka K/L mengakui sebagai Dana Pihak Ketiga)	Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana

7.	Terdapat saldo kas yang telah dapat diakui sebagai hak pemerintah dan akan disetorkan ke Kas Negara	Pendapatan PNB Lainnya	Jaminan, Rekening Penampungan Sementara
----	---	---------------------------	--

- Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) digunakan untuk mencatat pengeluaran yang telah dapat ditentukan penggunaannya, namun belum menerima manfaat baik berupa barang/jasa atas pengeluaran tersebut. Dan atas pengeluaran tersebut telah terpenuhinya bukti-bukti legal/dokumen-dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dari pihak ketiga seperti kuitansi, *invoice*, dll.
- Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan pendapatan yang berdasarkan perhitungan akuntansi sudah menjadi hak pemerintah namun belum dapat ditagihkan, atau hak pemerintah yang seharusnya sudah dapat ditagihkan namun belum memenuhi kriteria pengakuan piutang karena belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihannya sampai dengan akhir tahun anggaran. Pendapatan yang masih harus diterima diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak dilaporkan dalam laporan keuangan.
- Piutang merupakan hak pemerintah yang telah memiliki hak tagih dan telah memenuhi kriteria pengakuan piutang, yaitu telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihan.
- Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut dilakukan dengan cara mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang. Penggolongan kualitas/umur piutang dan besaran penyisihan piutang tidak tertagih didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan dan dilaksanakan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Kualitas lancar apabila piutang belum jatuh tempo;	0.5%
Kurang Lancar	Kualitas kurang lancar apabila piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) tahun sejak jatuh tempo;	10%
Diragukan	Kualitas diragukan apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo; dan	50%
Macet	kualitas macet apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo.	100%

- Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR.
- Piutang yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasikan menjadi Piutang Jangka Panjang

Lainnya pada pos Piutang Jangka Panjang.

- Apabila terdapat bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya lainnya yang belum diterima oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan atas piutang jangka panjang, maka bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya lainnya tersebut harus diakui sebagai piutang jangka pendek (aset lancar).
- Pengakuan Piutang denda yang dikarenakan adanya pemeriksaan auditor eksternal diakui berdasarkan dokumen sumber yang terkait.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/atau
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Persediaan dicatat menggunakan metode *perpetual*, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.
- Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - 1) harga pembelian;
 - 2) biaya pengangkutan;
 - 3) biaya penanganan; dan

- 4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c. Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- Persediaan disajikan dalam neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan minimal setiap akhir semester dengan mempertimbangkan kebutuhan pengelolaan persediaan secara tertib dan adanya efisiensi dalam pelaksanaannya. Pada akhir tahun periode pelaporan satuan kerja menyajikan persediaan dengan penyesuaian data nilai persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan non digital (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca. Selain itu termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset.
- Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak

kepemilikan dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah:

- a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.
 - Terkait dengan pengukuran Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari hibah/donasi atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.
 - Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - d. Khusus untuk Aset Tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian tidak memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi. Oleh karena itu, berapapun nilainya akan dikapitalisasi.
 - e. Pengeluaran untuk BMN aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, tidak

dilakukan kapitalisasi.

- Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun disajikan dalam Laporan BMN Ekstrakomptabel serta tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan BMN.
- Persyaratan lain untuk pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki. Bila tidak memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi dan syarat tersebut, maka pengeluaran tersebut tidak dikapitalisasi dan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (*expense*).
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya sesuai nilai tercatatnya. Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan dari penggunaan aktifnya oleh pemerintah, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- Suatu Aset Tetap dapat terdiri dari komponen penunjang utama dan komponen penunjang lain yang memiliki masa manfaat berbeda-beda, sehingga perhitungan penyusutannya berbeda serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Untuk kondisi ini, diharapkan satuan kerja dapat mencatat secara terpisah untuk masing-masing komponen tersebut sehingga dapat disajikan secara lebih wajar dalam laporan keuangan. Penetapan pencatatan suatu Aset Tetap secara gabungan atau terpisah dilakukan berdasarkan kajian dan mempertimbangkan *cost and benefit analysis* dari setiap entitas.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
 - d. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.
- Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu dengan berpedoman pada PMK 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dalam Pasal 21 ayat (1).
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dalam jumlah yang sama setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa

Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a. Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b. Telah diterbitkan:
 - Surat Keputusan Pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c. Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah.

- Pengukuran atas Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar nilai nominal tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
- Pada laporan keuangan tahunan, Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang, sedangkan yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan direklasifikasi menjadi Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.
- Terhadap Piutang Jangka Panjang yang penagihannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) oleh suatu instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja instansi yang bersangkutan. Klasifikasi piutang jangka panjang adalah sesuai dengan klasifikasi awalnya. Misalnya, piutang jangka panjang yang diserahkan penagihannya, karena macet, kepada PUPN/DJKN, maka nilai piutang dimaksud tetap disajikan sebagai piutang jangka panjang pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan, dan tidak direklasifikasi menjadi aset lancar.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya beberapa di antaranya Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) didefinisikan sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Menurut jenis sumber dayanya, ATB pada Kementerian PANRB terdiri dari:
 - a. *Software* komputer.
Software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah *software* yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu, atau yang dapat digunakan di beberapa komputer atau jenis *hardware* lainnya.
 - b. Lisensi
 Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.
 - c. ATB lainnya
 ATB lainnya merupakan jenis ATB yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis ATB yang ada. Di antara contoh ATB lainnya adalah peta digital dan situs web yang dikembangkan oleh beberapa kementerian negara/lembaga serta buku digital.
- ATB diakui jika memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. dapat diidentifikasi;
 - b. dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki oleh entitas;
 - c. kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - d. biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
- Selain memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan ketentuan umum pengakuan ATB di atas, ketentuan pengakuan lainnya untuk masing-masing jenis ATB pada Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:
 - a. *Software*
 - Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga.
 - *Software* yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.
 - *Software* komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya.

- Dalam hal *software* yang dikembangkan secara internal namun melibatkan pihak ketiga (jasa konsultan), perlu diperhatikan mengenai porsi pengembangan yang dilakukan. Jika porsi pengembangan internal lebih besar maka seluruh biaya yang dikeluarkan dalam pengembangan *software* diperlakukan sebagai pengembangan secara internal dan tidak dikapitalisasi sebagai ATB. Jika porsi pengembangan eksternal lebih besar maka ATB diakui sebesar nilai kontrak dengan pihak ketiga.
- *Software* yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria pengakuan ATB secara umum.
- Apabila *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware*, maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai bagian dari *hardware* yang bersangkutan.

b. Lisensi

- Lisensi diakui apabila terdapat dokumen yang menunjukkan adanya izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak terkait untuk menggunakan atau memanfaatkan ciptaan atau produk hak yang dimilikinya.
- Lisensi atas *software* yang merupakan bagian integral dari suatu *hardware*, maka Lisensi tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai bagian dari *hardware* yang bersangkutan.

c. ATB Lainnya

- ATB Lainnya berupa hak kekayaan intelektual diakui apabila telah terdapat dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang.
- Pengembangan situs web dapat diakui sebagai ATB apabila:
 - 1) dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga; atau
 - 2) dalam hal dikembangkan sendiri, memenuhi persyaratan pengakuan tahap pengembangan pada perolehan ATB secara internal.
- Pengakuan situs web berbeda dengan aplikasi berbasis web yang termasuk dalam ATB jenis *software*. Situs web dan aplikasi berbasis web setidaknya memiliki perbedaan sebagai

berikut:

Tabel 5 Perbedaan Situs web dengan Aplikasi berbasis web

Situs web	Aplikasi berbasis web
1. Tidak ada hak akses	1. Terdapat hak akses
2. Bersifat informatif (satu arah)	2. Bersifat interaktif (dua arah atau lebih)
3. Berfungsi memberikan informasi kepada pembaca	3. Memiliki fungsi pengolahan data dan informasi secara otomatis

- Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Pengukuran ATB yang diperoleh melalui pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan ATB, diakui sebesar biaya perolehan atau nilai kontrak dengan pihak ketiga yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan pada tahap pengembangan sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.
- ATB yang diperoleh dari donasi/hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus, sedangkan atas ATB yang memiliki masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Jadi perlu dipastikan benar-benar aset tersebut memiliki masa manfaat tidak terbatas atau sebaliknya masa manfaatnya masih dapat diestimasi khususnya terkait dengan saat di mana aset dimaksud tidak akan memiliki nilai lagi, misalnya karena adanya teknologi yang lebih baru atau yang lebih canggih.
- Masa manfaat suatu ATB ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KMK.6/2018 tentang Perubahan atas

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat ATB adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i>	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.
- Aset tetap dan ATB yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Pengakuan Aset Lain-lain tersebut diakui pada saat dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
- Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tersebut mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.
- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

- Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Utang yang Belum Ditagihkan, Hibah Langsung yang Belum Disahkan, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- Masing-masing jenis kewajiban tersebut memiliki karakteristik pengakuan, pengukuran dan pelaporan yang berbeda-beda. Adapun penjelasan untuk perlakuan khusus dari salah satu jenis Kewajiban Jangka Pendek yakni Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:
 - a. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/ atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang/ kompensasi kepada pihak lain.
 - b. Utang kepada Pihak Ketiga diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian/ seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/ serah terima, tetapi belum dibayar. Pengakuan sebagai utang kepada pihak ketiga dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dilakukan berdasarkan adanya dokumen sumber yang memadai terkait penyelesaian kewajiban di bawah atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Utang kepada Pihak Ketiga diakui sebesar nilai nominal atas kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.
 - c. Termasuk dalam Utang kepada Pihak Ketiga adalah Utang Biaya yang merupakan utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Utang biaya ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga melaksanakan penyediaan barang atau jasa di muka dan melakukan penagihan setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Sebagai contoh, penyediaan barang/jasa berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru

ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

- d. Utang biaya diakui pada saat diterimanya surat tagihan atau *invoice* dari Pihak Ketiga atas barang/jasa yang telah diterima oleh entitas atau sejumlah tagihan bulan terakhir sebelum berakhirnya tahun anggaran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan.
- Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
 - Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
 - Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.
 - Kewajiban harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada periode pelaporan dengan nilai yang handal untuk mendukung agar informasi yang lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan.

Ekuitas

(7) Ekuitas

- Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Dalam basis akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.
- Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- Perubahan Ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti: koreksi

kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-48.01.1.427950/2025 memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp392.980.127.000.

Selama Tahun 2025 telah dilakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disebabkan adanya penyesuaian kebutuhan dan kondisi pada saat pelaksanaan. Secara total anggaran tidak ada perubahan, namun masing-masing jenis anggaran mengalami perubahan, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 7: Rincian Revisi DIPA periode TA 2025

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Anggaran Pendapatan		
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Anggaran Pendapatan	0	0
Anggaran Belanja		
Belanja Pegawai	133.028.369.000	148.836.963.000
Belanja Barang	207.069.734.000	173.759.803.000
Belanja Modal	52.882.024.000	70.383.361.000
Jumlah Anggaran Belanja	392.980.127.000	392.980.127.000

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan program, rincian DIPA Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

Tabel 8: Rincian Revisi DIPA per Program 31 Desember TA 2025

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	TA 2025	
		Anggaran	Anggaran Setelah Revisi
048.01.C O	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	141.895.320.000	117.133.372.000
048.08.W A	Program Dukungan Manajemen	251.084.807.000	275.846.755.000
Jumlah Anggaran Belanja		392.980.127.000	392.980.127.000

Adapun rincian revisi DIPA berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 9: Rincian Revisi DIPA Kementerian PANRB TA 2025 unaudited

(dalam rupiah)

Jenis Revisi	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Pagu	Keterangan
DIPA Revisi	1	21-01-2025	392.980.127.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	2	22-02-2025	392.980.127.000	Revisi DJA Blokir Efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-75/MK.02/2025
DIPA Revisi	3	19-04-2025	392.980.127.000	Revisi Kanwil DJPb, Pemutakhiran Halaman III DIPA Triwulan III
DIPA Revisi	4	05-06-2025	392.980.127.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	5	11-07-2025	392.980.127.000	Revisi Kanwil DJPb, Pemutakhiran Halaman III DIPA Triwulan III
DIPA Revisi	6	31-07-2025	392.980.127.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	7	15-08-2025	392.980.127.000	Revisi DJA, Buka Blokir Tahap I
DIPA Revisi	8	04-09-2025	392.980.127.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	9	06-10-2026	392.980.127.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	10	14-10-2025	392.980.127.000	Revisi Kanwil DJPb, Pemutakhiran Halaman III DIPA Triwulan IV
DIPA Revisi	11	01-11-2025	392.980.127.000	Revisi DJA, Buka Blokir Tahap II
DIPA Revisi	12	17-11-2025	392.980.127.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	13	9/12/2025	392.980.127.000	Revisi KPA

Blokir Anggaran terkait Pelaksanaan Efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-75/MK.02/2025 pada Kementerian PANRB dari Pagu Anggaran sebesar Rp392.980.127.000 dilakukan pemblokiran sebesar Rp78.178.565.000 sehingga Pagu Anggaran non blokir yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebesar Rp314.801.562.000. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 10: Rincian Blokir Anggaran Kementerian PANRB periode TA 2025

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Pagu	Blokir Anggaran	Pagu Non Blokir
Belanja Pegawai	148.836.963.000	-	148.836.963.000
Belanja Barang	173.759.803.000	39.682.131.000	134.077.672.000
Belanja Modal	70.383.361.000	38.496.434.000	31.886.927.000
Jumlah	392.980.127.000	78.178.565.000	314.801.562.000

B.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.022.002.726 dan Rp1.711.574.797.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, maka pada tanggal 23 Agustus 2024 tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara telah secara hukum resmi berhenti dan seluruh tugasnya dialihkan ke Kementerian PANRB serta BKN. Sehingga pada TA 2025, Satuan Kerja di lingkup Kementerian PANRB adalah Satuan Kerja MENPAN. Pada Laporan Keuangan TA 2025 masih membandingkan dengan data TA 2024, sehingga pada beberapa pos masih disajikan data historis Satker KASN. Data yang tersaji pada TA 2025 atas Kementerian PANRB hanya terdiri atas Satker MENPAN, sedangkan pada data TA 2024 terdiri atas Satker MENPAN dan Satker KASN.

Pendapatan di lingkup Kementerian PANRB seluruhnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Penyelesaian Piutang dan Penerimaan Kembali Belanja TAYL dengan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan untuk periode TA 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 11: Perbandingan Realisasi Pendapatan periode TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)*

Akun	Uraian Akun	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.523.450.800	1.433.000.000	6,31
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	6.491.000	68.189.852	(90,48)
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	909.090	18.181.818	(95,00)
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	151.500.000	-	100,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	767.010	-	100,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.554.692	1.187.150	199,43
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	83.138.665	180.364.969	(53,91)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	252.191.469	10.651.008	2.267,77
Jumlah Pendapatan		2.022.002.726	1.711.574.797	18,14

Kementerian PANRB bukan merupakan instansi pengelola PNPB atau penerima PNPB khusus. Pendapatan yang diterima Kementerian PANRB merupakan pendapatan yang bersifat tidak terencana dan tidak pasti (tentatif dan insidental). Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai sebesar Rp6.491.000 merupakan TPP 2023 terkait kehilangan aset pemerintah. Sedangkan Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara sebesar Rp909.090 merupakan pembayaran YS atas Tuntutan Ganti Rugi Bendahara PPABP pada tahun 2016. Kenaikan yang signifikan pada akun Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913) sebesar 2.267,77% disebabkan karena adanya pengembalian tahun anggaran lalu atas pengadaan jasa renovasi dan beberapa pengembalian atas pengadaan kainnya, seperti pengadaan gorden, pengadaan fasade backdrop, dan pengadaan CCTV.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi pendapatan berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12: Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Satuan Kerja periode 31 Desember TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	2.022.002.726	1.711.574.797	18,14
Jumlah Pendapatan		2.022.002.726	1.711.574.797	18,14

Realisasi
Pendapatan dari
Penjualan,
Pengelolaan BMN,
Iuran Badan
Usaha, dan
Penerimaan Klaim
Asuransi BMN
Rp1.523.450.800

B.1.1 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (Kelompok Akun 4251)

Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp1.523.450.800. Pendapatan PNBPN dari kelompok akun 4251 pada Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 terdapat pada akun Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122).

Realisasi PNBPN dari kelompok akun 4251 untuk periode TA 2025 merupakan hasil bersih Lelang aset Peralatan dan Mesin pada Satuan Kerja MENPAN dengan rincian sebagai berikut:

1. Risalah Lelang (RL) Nomor 31/07.05/2025-01 sebesar Rp145.500.000 berupa *chiller*, dibuktikan dengan setoran NTPN 86AC348VVNTL8DRL tanggal 7 Maret 2025.
2. Risalah Lelang (RL) Nomor 58/07.05/2025-01 sebesar Rp138.840.000 berupa 433 unit barang inventaris perkantoran, dibuktikan dengan setoran NTPN 4FDA661QVD8DN4QF tanggal 9 Mei 2025.
3. Risalah Lelang (RL) Nomor 56/07.05/2025-02 sebesar Rp1.154.000.000 berupa 13 unit kendaraan dinas, dibuktikan dengan setoran NTPN 4FDA661QVD8DN4QF tanggal 9 Mei 2025.

4. Risalah Lelang (RL) Nomor 090/07.05/2025-01 sebesar Rp12.476.000 berupa peralatan mesin dalam bentuk inventaris kantor sejumlah 567 NUP dibuktikan dengan setoran NTPN 3234E7QLV2JBFTLT tanggal 15 Juli 2025.
5. Risalah Lelang (RL) Nomor 137/07.05/2025-01 sebesar Rp50.850.000 berupa 715 NUP Peralatan dan Mesin, dibuktikan dengan setoran NTPN 0F1E248VVOIHC2NO tanggal 6 Oktober 2025.
6. Pengadaan Tanpa Melalui Lelang nomor 114/S.BN.04/12/2025 dengan tanggal perjanjian 4 Desember 2025 berupa 1 unit sedan dengan merk Toyota New Camry 2.5G tahun perolehan 2016 dengan nilai perolehan Rp517.860.000 dibuktikan dengan setoran sebesar Rp21.784.800 sesuai NTPN EF9E455DFJAVCBKF tanggal 11 Desember 2025.

Adapun rincian perbandingan realisasi PNBK kelompok akun 4251 untuk periode TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 13: Rincian Perbandingan Realisasi PNBK Kelompok Akun 4251 periode 31 Desember 2025 dan TA 2024
(dalam rupiah)*

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.523.450.800	1.433.000.000	6,31
Jumlah Pendapatan Akun 4251		1.523.450.800	1.433.000.000	6,31

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan dari Kelompok Akun 4251 untuk periode TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,31% bila dibandingkan dengan TA 2024.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi PNBK kelompok akun 4251 berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 14: Rincian Perbandingan Realisasi PNBK Kelompok Akun 4251 Berdasarkan Satuan Kerja
periode 31 Desember 2025 dan TA 2024
(dalam rupiah)*

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	1.523.450.800	1.433.000.000	6,31
Jumlah Pendapatan Akun 4251		1.523.450.800	1.433.000.000,00	6,31

B.1.2 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (Kelompok Akun 4257)

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp158.900.090

Adapun rincian perbandingan realisasi PNBK kelompok akun 4257 untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15: Rincian Perbandingan Realisasi PNBK Kelompok Akun 4257 periode 31 Desember 2025 dan TA 2024
(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	6.491.000	68.189.852	(90,48)
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	909.090	18.181.818	(95,00)
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	151.500.000	0	0,00
Jumlah Pendapatan Akun 4257		158.900.090	86.371.670	83,97

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan dari Kelompok Akun 4257 untuk periode TA 2025 secara total mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025, sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan Pemeriksaan LK oleh BPK maka terdapat penyetoran pendapatan penyelesaian ganti rugi dari Bendahara atas Piutang TP/TGR serta ganti rugi dari Pihak Ketiga atas Piutang Lainnya. Selain itu, terdapat penyetoran pendapatan penyelesaian Ganti Kerugian Negara berupa notebook yang hilang sebesar Rp6.491.000.

Rincian Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga untuk periode TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 16: Rincian Setoran Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	NTPN	Tanggal Setor	Nominal
Akun 425793 (Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga)				
1	Penyelesaian Kerugian Negara atas Pembayaran Pengadaan Pihak Ketiga (KPG)	250220027196	20/02/2025	48.859.085
2	Penyelesaian Kerugian Negara atas Pembayaran Pengadaan Pihak Ketiga (GH)	250220026781	20/02/2025	32.571.917
3	Penyelesaian Kerugian Negara atas Pembayaran Pengadaan Pihak Ketiga (NIJ)	250220027546	20/02/2025	8.000.000
4	Penyelesaian Kerugian Negara atas Pembayaran Pengadaan Pihak Ketiga (AO)	250220027358	20/02/2025	20.412.566
5	Penyelesaian Kerugian Negara atas Pembayaran Pengadaan Pihak Ketiga (ZB)	250220027436	20/02/2025	8.000.000
6	Penyelesaian Kerugian Negara atas Pembayaran Pengadaan Pihak Ketiga (AP)	250220027284	20/02/2025	21.500.887
7	Penyelesaian Kerugian Negara atas Pembayaran Pengadaan Pihak Ketiga (MM)	250220027072	20/02/2025	10.655.545
8	Penyelesaian Kerugian Negara atas Pembayaran Pengadaan Pihak Ketiga (NIJ)	251208017427	08/12/2025	700.000
9	Penyelesaian Kerugian Negara atas Pembayaran Pengadaan Pihak Ketiga (GH)	251208018040	08/12/2025	130.000
10	Penyelesaian Kerugian Negara atas Pembayaran Pengadaan Pihak Ketiga (KPG)	251208017656	08/12/2025	670.000
Total Akun 425793 (Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga)				151.500.000

Sedangkan rincian perbandingan realisasi PNBP kelompok akun 4257 berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 17: Rincian Perbandingan Realisasi PNBP Kelompok Akun 4257 Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	158.900.090	86.371.670	83,97
Jumlah Pendapatan Akun 4257		158.900.090	86.371.670	83,97

Realisasi
Pendapatan Denda
Rp767.010

B.1.3 Pendapatan Denda (Kelompok Akun 4258)

Realisasi Pendapatan Denda untuk TA 2025 adalah sebesar Rp767.010. Pendapatan PNBP dari kelompok akun 4258 pada Kementerian PANRB untuk periode ini terdapat pada akun Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811).

Adapun rincian perbandingan realisasi PNBP dari kelompok akun 4258 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18: Rincian Perbandingan Realisasi PNBK Kelompok Akun 4258 TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	767.010	0	0,00
Jumlah Pendapatan Akun 4258		767.010	0	0,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan dari Kelompok Akun 4258 untuk periode TA 2025 terdapat penerimaan negara berupa pembayaran denda keterlambatan atas pekerjaan pengadaan oleh Pihak Ketiga, hal ini merupakan tindak lanjut dari temuan atas Pemeriksaan LK oleh BPK TA 2024.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi PNBK kelompok akun 4258 berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 19: Rincian Perbandingan Realisasi PNBK Kelompok Akun 4258 Berdasarkan Satuan Kerja

Periode 31 Desember 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	767.010	0	0,00
Jumlah Pendapatan Akun 4258		767.010	0	0,00

Realisasi
Pendapatan Lain-
lain
Rp 338.884.826

B.1.4 Pendapatan Lain-lain (Kelompok Akun 4259)

Realisasi Pendapatan Lain-lain untuk TA 2025 adalah sebesar Rp338.884.826.

Adapun rincian perbandingan realisasi PNBK kelompok akun 4259 untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20: Rincian Perbandingan Realisasi PNBK Kelompok Akun 4259 TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.554.692	1.187.150	199,43
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	83.138.665	180.364.969	(53,91)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	252.191.469	10.651.008	2.267,77
Jumlah Pendapatan Akun 4259		338.884.826	192.203.127	76,32

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan dari Kelompok Akun 4259 untuk per TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 76,32% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran lalu (akun 425913), yang mengalami peningkatan signifikan sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2024 oleh BPK.

Pada akun 425911 (Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu), terdapat kenaikan karena terdapat kesalahan masa kerja pada Surat Ketetapan (SK) yang diterbitkan oleh Bagian SDM, Organisasi, dan Hukum.

Sementara itu, pada akun 425912 (Penerimaan Kembali Belanja Barang), tidak seluruh realisasi berasal dari pengembalian atas temuan BPK. Sebagian penerimaan tersebut juga berasal dari mekanisme pengembalian belanja oleh satuan kerja secara umum, termasuk koreksi internal yang dilakukan selama semester berjalan.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi PNBK kelompok akun 4259 berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 21: Rincian Perbandingan Realisasi PNBK Kelompok Akun 4259 Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	338.884.826	192.203.127	76,32
Jumlah Pendapatan Akun 4259		338.884.826	192.203.127	76,32

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp308.441.450.279 atau 78,33% dari anggaran belanja sebesar Rp392.980.127.000 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp629.964.381. Keseluruhan belanja di Kementerian PANRB berasal dari belanja Rupiah Murni.

Belanja Kementerian PANRB menurut Jenis Belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode TA 2025 adalah sebagai berikut:

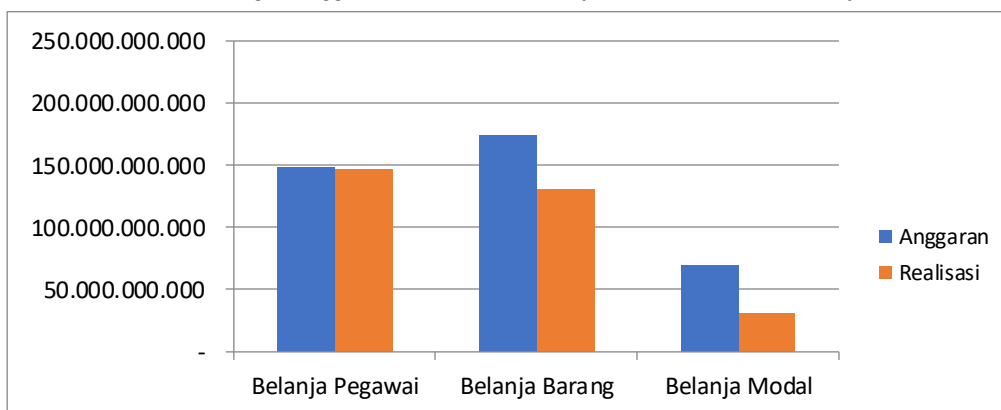
Tabel 22: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	148.836.963.000	146.527.426.345	98,45
Belanja Barang	173.759.803.000	129.681.594.836	74,63
Belanja Modal	70.383.361.000	31.602.464.717	44,90
Jumlah Belanja Kotor	392.980.127.000	307.811.485.898	78,33
Pengembalian Belanja	0	(629.964.381)	100
Jumlah Belanja	392.980.127.000	307.181.521.517	78,17

Komposisi anggaran dan realisasi belanja untuk periode TA 2025 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1: Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA 2025



Rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program untuk periode TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 23: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program TA 2025

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
048.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN	117.133.372.000	50.962.424.603	43,51
048.08.WA	Program Dukungan Manajemen	275.846.755.000	256.849.061.295	93,11
Jumlah Belanja		392.980.127.000	307.811.485.898	78,33

Rincian perbandingan realisasi belanja untuk periode TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 24: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Belanja Pegawai	146.527.426.345	145.334.254.028	0,82
Belanja Barang	129.681.594.836	232.266.903.912	(44,17)
Belanja Modal	31.602.464.717	55.737.772.931	(43,30)
Jumlah Belanja	307.811.485.898	433.338.930.871	(28,97)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja pada periode TA 2025 mengalami penurunan sebesar 28,97% dibandingkan dengan periode TA 2024. Analisa peningkatan/penurunan secara detil akan dijelaskan pada sub judul per masing-masing realisasi jenis belanja.

Adapun rincian perbandingan realisasi Belanja berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	0	33.097.549.032	(100,00)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	307.811.485.898	400.241.381.839	(23,09)
Jumlah Belanja		307.811.485.898	433.338.930.871	(28,97)

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp146.527.426.345

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp146.527.426.345 atau 98,45% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025

sebesar Rp148.836.963.000 setelah dikurangi pengembalian belanja pegawai sebesar Rp58.661.092.

Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai untuk periode TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	47.160.568.000	46.220.095.125	98,01
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	1.509.843.000	1.509.314.730	99,97
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	5.963.392.000	5.795.567.873	97,19
5121	Belanja Honorarium	183.750.000	183.750.000	100,00
5122	Belanja Lembur	882.000.000	881.775.000	99,97
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	93.137.410.000	91.995.584.709	98,77
Jumlah Belanja Kotor		148.836.963.000	146.586.087.437	98,49
Pengembalian Belanja Pegawai		0	(58.661.092)	(100,00)
Jumlah Belanja Pegawai		148.836.963.000	146.527.426.345	98,45

Adapun rincian realisasi Pengembalian Belanja Pegawai untuk periode TA 2025 sebesar Rp58.661.092 adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111) sebesar Rp33.479.088.
2. Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK (5116) sebesar Rp8.055.400.
3. Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito (5124) sebesar Rp17.126.604.

Sehingga jumlah realisasi Pengembalian Belanja Pegawai adalah sebesar Rp58.661.092 dan jumlah realisasi dari Belanja Pegawai Netto untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp146.527.426.345.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	46.220.095.125	47.358.333.307	(2,40)
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	1.509.314.730	514.816.390	193,18
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	5.795.567.873	4.311.424.067	34,42
5121	Belanja Honorarium	183.750.000	6.224.005.313	(97,05)
5122	Belanja Lembur	881.775.000	1.323.315.000	(33,37)
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	91.995.584.709	85.717.888.314	7,32
Jumlah Belanja Kotor		146.586.087.437	145.449.782.391	0,78
Pengembalian Belanja Pegawai		(58.661.092)	(115.528.363)	(49,22)
Jumlah Belanja Pegawai		146.527.426.345	145.334.254.028	0,82

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Pegawai pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,82% dibandingkan dengan TA 2024.

Analisa peningkatan/penurunan Belanja Pegawai per masing-masing Belanja akan dijelaskan pada sub judul B.2.1.1 sampai dengan B.2.1.6.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 28: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	0	15.143.719.687	(100,00)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	146.527.426.345	130.190.534.341	12,55
Jumlah Belanja Pegawai		146.527.426.345	145.334.254.028	0,82

Belanja Gaji dan
Tunjangan PNS
Rp46.186.616.037

B.2.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (Kelompok Akun 5111)

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp46.186.616.037 atau 97,93% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp Rp47.160.568.000 setelah dikurangi pengembalian gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp 33.479.088 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS adalah sebagai berikut:

Tabel 29: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	31.868.867.000	31.774.118.120	99,70
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	494.000	483.668	97,91
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.758.355.000	1.752.339.176	99,66
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	399.902.000	393.688.515	98,45
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.829.310.000	1.724.610.000	94,28
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.142.024.000	4.074.511.000	98,37
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	397.266.000	370.299.166	93,21
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.404.225.000	1.400.892.480	99,76
511129	Belanja Uang Makan PNS	4.739.725.000	4.199.133.000	88,59
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	620.400.000	530.020.000	85,43
Jumlah Belanja Kotor		47.160.568.000	46.220.095.125	98,01
Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS		0	(33.479.088)	0,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan PNS		47.160.568.000	46.186.616.037	97,93

Adapun rincian realisasi Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS untuk periode TA 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS (511111) sebesar Rp 13.653.362.
2. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) sebesar Rp 4.840.
3. Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (511121) sebesar Rp 1.415.240.
4. Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PNS (511122) sebesar Rp 505.856.
5. Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS (511123) sebesar Rp 2.945.000.
6. Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS (511124) sebesar Rp 10.505.000.
7. Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PNS (511126) sebesar Rp 579.360.
8. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) sebesar Rp 3.870.430.

Sehingga jumlah realisasi Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS adalah sebesar Rp33.479.088 dan jumlah realisasi dari Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Netto untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp 46.186.616.037.

Terkait pengembalian Belanja Pegawai dilakukan melalui dua mekanisme berbeda, yaitu melalui potongan SPM dan melalui penyetoran dengan kode billing. Rincian Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS untuk periode TA 2025 untuk mekanisme penyetoran dengan kode billing adalah sebagai berikut:

Tabel 30: Rincian Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS melalui mekanisme penyetoran dengan kode billing TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	SP2D		NTPN	Tanggal Bayar	Nominal
		Nomor	Tanggal			
Akun 511111 (Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS)						
1	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01452 SP2D 251331501002174_BELANJA PEGAWAI_TAUFIQ RAHMAN	251331501002174	1/7/2025	207ED522CPJCOPTP	13/07/2025	4.398.281
2	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01810 SP2D 259991530019546_BELANJA PEGAWAI_TAUFIQ RAHMAN	259991530019546	1/8/2025	56EDE5UFSK9UNKS4	25/07/2025	4.398.281
3	PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI BULAN JANUARI S.D AGUSTUS			A7C03397D5FMNRPB	23/08/2025	1.197.000
4	Pengembalian Belanja SPM 04395 SP2D 259991530099875_BELANJA PEGAWAI (kelebihan)	259991530099875	1/12/2025	0855A397D9550F8F	16/12/2025	183.800
5	Pengembalian Belanja Pegawai SPM 00002T 00038T 00197T 00450T			C4C3A397D99AL3M9	30/12/2025	3.012.000
Subtotal Akun 511111						13.189.362
Akun 511119 (Pengembalian Belanja Pembulatan PNS)						
7	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji bulan Februari 2025 untuk 84 pegawai/152 jiwa	251331501002174	01/07/2025	D5A9F7NAS9AHVPTR	13/07/2025	1
8	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji bulan Februari 2025 untuk 84 pegawai/152 jiwa	259991530019546	01/08/2025	5E2DE0JUTKRK9KSC	25/07/2025	1
Subtotal Akun 511119						2
Akun 511121 (Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS)						
1	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01452 SP2D 251331501002174_BELANJA PEGAWAI_TAUFIQ RAHMAN	251331501002174	1/7/2025	F83740JUTKNENPU2	13/07/2025	497.170
2	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01810 SP2D 259991530019546_BELANJA PEGAWAI_TAUFIQ RAHMAN	259991530019546	3/8/2025	9A86545KSV55TKSK	25/07/2025	497.170
3	PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI BULAN JANUARI S.D AGUSTUS			931F1397D5FMNRPK	23/08/2025	119.700
4	Pengembalian Belanja Pegawai SPM 00002T 00038T 00197T 00450T 00725T 01053T 01452T 01870T Gaji			A36BD7NASE58M3N2	30/12/2025	301.200
Subtotal Akun 511121						1.415.240
Akun 511122 (Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PNS)						
1	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01452 SP2D 251331501002174_BELANJA PEGAWAI_TAUFIQ RAHMAN	251331501002174	10/6/2025	9A7A8397D4EJUPU5	13/07/2025	198.868
2	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01810 SP2D 259991530019546_BELANJA PEGAWAI_TAUFIQ RAHMAN	259991530019546	7/7/2025	45CFB5UFSK9UNKSU	25/07/2025	198.868
3	PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI BULAN JANUARI S.D AGUSTUS			B00675UFSL6RURPM	23/08/2025	47.880
4	Pengembalian Belanja Pegawai SPM 00002T 00038T 00197T 00450T 00725T 01053T 01452T 01870T Gaji			275E4397D99AL3NR	30/12/2025	60.240
Subtotal Akun 511122						505.856
Akun 511123 (Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS)						
1	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 00038 SP2D 251331501000284_BELANJA PEGAWAI	251331501000284	24-01-2025	653FD0JUTG24URR	10-02-2025	1.565.000
2				DA6937NAS4L7AURJ	12-02-2025	1.380.000
Subtotal Akun 511123						2.945.000
Akun 511124 (Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS)						
3	Pengembalian Belanja SPM 01810T SP2d 259991530019546_Belanja Pegawai	259991530019546	16-07-2025	A199E2CPTBP1D5CU	17-09-2025	1.685.000
Subtotal akun 511124						1.685.000
Akun 511126 (Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PNS)						
1	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01452 SP2D 251331501002174_BELANJA PEGAWAI_TAUFIQ RAHMAN	251331501002174	10/6/2025	297277NAS9AHVPU6	13/07/2025	289.680
2	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01810 SP2D 259991530019546_BELANJA PEGAWAI_TAUFIQ RAHMAN	259991530019546	7/7/2025	858EE6QTCESB4KT4	29/07/2025	289.680
Subtotal akun 511126						579.360
Total Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS						20.319.820

Adapun rincian Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS untuk periode TA 2025 melalui mekanisme potongan SPM adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS (511111) sebesar Rp464.000
2. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) sebesar Rp4.838

3. Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS (511124) sebesar Rp8.820.000.

4. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) sebesar Rp 3.870.430.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS untuk periode TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji & Tunjangan PNS periode TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	31.774.118.120	33.485.719.300	(5,11)
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	483.668	559.624	(13,57)
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.752.339.176	1.825.445.030	(4,00)
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	393.688.515	416.927.242	(5,57)
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.724.610.000	1.616.105.000	6,71
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.074.511.000	4.187.715.000	(2,70)
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	370.299.166	385.642.231	(3,98)
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.400.892.480	1.488.064.880	(5,86)
511129	Belanja Uang Makan PNS	4.199.133.000	3.354.675.000	25,17
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	530.020.000	597.480.000	(11,29)
Jumlah Belanja Kotor		46.220.095.125	47.358.333.307	(2,40)
Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS		(33.479.088)	(29.035.845)	15,30
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan PNS		46.186.616.037	47.329.297.462	(2,41)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada periode TA 2025 mengalami penurunan sebesar 2,41% dibandingkan dengan TA 2024.

Penurunan pada realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada periode TA 2025.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Berdasarkan Satuan Kerja

TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	0	5.687.577.606	(100,00)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	46.186.616.037	41.641.719.856	10,91
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan PNS		46.186.616.037	47.329.297.462	(2,41)

Belanja Gaji dan
Tunjangan Pegawai
Non PNS
Rp1.509.314.730

B.2.1.2 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS (Kelompok Akun 5115)

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp1.509.314.730 atau 99,97% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp1.509.843.000 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS adalah sebagai berikut:

Tabel 33: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS

Periode TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	1.089.326.000	1.089.314.730	100,00
511519	Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	420.517.000	420.000.000	99,88
Jumlah Belanja Kotor		1.509.843.000	1.509.314.730	99,97
Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS		0	0	0,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS		1.509.843.000	1.509.314.730	99,97

Adapun rincian perbandingan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 34: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	1.089.314.730	155.616.390	600,00
511519	Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	420.000.000	359.200.000	16,93
Jumlah Belanja Kotor		1.509.314.730	514.816.390	193,18
Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS		0	0	0,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS		1.509.314.730	514.816.390	193,18

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS pada TA 2025 *unaudited* mengalami peningkatan sebesar 193,18% dibandingkan dengan TA 2024.

Kenaikan pada realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS di tahun 2025 dikarenakan adanya pembayaran gaji dan tunjangan Wakil Menteri PANRB, serta tunjangan perumahan Wakil Menteri PANRB berdasarkan PMK Nomor 176/PMK.02/2015, Keppres Nomor 73/M Tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024 – 2029. Peningkatan realisasi antar

periode disebabkan pada TA 2024 belum terdapat pembayaran untuk Wakil Menteri PANRB.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 35: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	1.509.314.730	514.816.390	193,18
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS		1.509.314.730	514.816.390	193,18

Belanja Gaji dan
Tunjangan PPPK
Rp5.787.512.473

B.2.1.3 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK (Kelompok Akun 5116)

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp5.787.512.473 atau 97,05% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp5.795.567.873 setelah dikurangi pengembalian gaji dan tunjangan PPPK sebesar Rp8.055.400 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK adalah sebagai berikut:

Tabel 36: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	4.061.697.000	4.061.696.250	100,00
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	118.000	48.463	41,07
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	246.740.000	216.120.390	87,59
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	52.843.000	52.842.330	100,00
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	503.622.000	497.142.000	98,71
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	222.257.000	215.956.440	97,17
511628	Belanja Uang Makan PPPK	812.320.000	688.792.000	84,79
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	63.795.000	62.970.000	98,71
Jumlah Belanja Kotor		5.963.392.000	5.795.567.873	97,19
Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK		-	(8.055.400)	(100)
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK		5.963.392.000	5.787.512.473	97,05

Adapun rincian realisasi Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK untuk periode TA 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK (511611) sebesar Rp 6.301.296
2. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK (511619) sebesar Rp92

3. Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (511621) sebesar Rp320.260
4. Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PPPK (511622) sebesar Rp64.072.
5. Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (511624) sebesar Rp1.080.000.
6. Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK (511625) sebesar Rp289.680 .

Sehingga jumlah realisasi Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK adalah sebesar Rp8.055.400 dan jumlah realisasi dari Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Netto untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp5.787.512.473.

Rincian Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK untuk periode TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 37: Rincian Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	NTPN	Tanggal Bayar	Nominal
Akun 511611 (Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK)				
1	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01036 SP2D 251331501001647_BELANJA PEGAWAI_Nabilla	D489D5UFSJ5SHRJD	04-06-2025	3.202.466
2	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01036 SP2D 251331501001647_BELANJA PEGAWAI_Iksan	5149B397D3ENATDL	04-06-2025	3.098.830
Subtotal Akun 511611				6.301.296
Akun 511619 (Pengembalian Belanja Tunjangan Pembulatan PPPK)				
1	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01036 SP2D 251331501001647_BELANJA PEGAWAI_Nabilla	B6C2C1GCDE9UGRL8	04-06-2025	14
2	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01036 SP2D 251331501001647_BELANJA PEGAWAI_Nabilla	E7D7E6QTCDO8UTE9	04-06-2025	78
Subtotal Akun 511619				92
Akun 511621 (Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK)				
1	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01036 SP2D 251331501001647_BELANJA PEGAWAI_Iksan	15A455UFSJ5SHTFA	04-06-2025	320.260
Subtotal akun 511621				320.260
Akun 511622 (Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PPPK)				
1	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01036 SP2D 251331501001647_BELANJA PEGAWAI_Iksan	7B6C55UFSJ5SHTFU	04-06-2025	64.072
Subtotal Akun 511622				64.072
Akun 511624 (Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PPPK)				
1	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01036 SP2D 251331501001647_BELANJA PEGAWAI_Nabilla	421256QTCDO8URLR	04-06-2025	540.000
2	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01036 SP2D 251331501001647_BELANJA PEGAWAI_Iksan	5B28F7NAS8ALBTGC	04-06-2025	540.000
Subtotal Akun 511624				1.080.000
Akun 511625 (Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK)				
1	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01036 SP2D 251331501001647_BELANJA PEGAWAI_Nabilla	C09345UFSJ5SHT5C	04-06-2025	72.420
2	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01036 SP2D 251331501001647_BELANJA PEGAWAI_Iksan	11C9C1GCDE9UGTH1	04-06-2025	217.260
Subtotal Akun 511625				289.680
Total Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK				8.055.400

Rincian perbandingan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 38: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji & Tunjangan PPPK TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	4.061.696.250	3.153.302.900	28,81
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	48.463	46.847	3,45
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	216.120.390	150.646.340	43,46
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	52.842.330	30.956.720	70,70
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK		0	0,00
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	497.142.000	498.014.000	(0,18)
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	215.956.440	141.436.260	52,69
511628	Belanja Uang Makan PPPK	688.792.000	337.021.000	104,38
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	62.970.000	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor		5.795.567.873	4.311.424.067	34,42
Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK		(8.055.400)	(2.414)	333.595,11
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK		5.787.512.473	4.311.421.653	34,24

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 34,24% dibandingkan dengan TA 2024.

Kenaikan pada realisasi belanja Gaji dan Tunjangan PPPK pada TA 2025 dikarenakan adanya penambahan pegawai PPPK sebanyak 117 orang pada tahun 2025

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 39: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 unaudited dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	5.787.512.473	4.311.421.653	34,24
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK		5.787.512.473	4.311.421.653	34,24

Belanja
Honorarium
Rp183.750.000

B.2.1.4 Belanja Honorarium (Kelompok Akun 5121)

Realisasi Belanja Honorarium untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp183.750.000 atau 100% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp183.750.000. Tidak ada pengembalian untuk Belanja Honorarium. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Honorarium sebagai berikut:

Tabel 40: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Honorarium TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
512111	Belanja Uang Honor Tetap	183.750.000	183.750.000	100,00
Jumlah Belanja Kotor		183.750.000	183.750.000	100,00
	Pengembalian Belanja Honorarium	0	0	0,00
Jumlah Belanja Honorarium		183.750.000	183.750.000	100,00

Belanja Honorarium berupa Belanja Uang Honor Tetap yang ditujukan untuk membayar Honor Staf Khusus.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Honorarium untuk periode TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 41: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Honorarium TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
512111	Belanja Uang Honor Tetap	183.750.000	6.224.005.313	(97,05)
Jumlah Belanja Kotor		183.750.000	6.224.005.313	(97,05)
	Pengembalian Belanja Honorarium	0	(38.391.888)	(100,00)
Jumlah Belanja Honorarium		183.750.000	6.185.613.425	(97,03)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Honorarium TA 2025 mengalami penurunan sebesar 97,03% dibandingkan dengan TA 2024. Penurunan ini terjadi karena honor Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) tidak dibayarkan pada 2025—SK KPRBN hanya berlaku hingga 2024.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Honorarium berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 42: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Honorarium Berdasarkan Satuan Kerja
TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	0	5.315.612.032	(100,00)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	183.750.000	870.001.393	(78,88)
Jumlah Belanja Honorarium		183.750.000	6.185.613.425	(97,03)

Belanja Lembur
Rp881.775.000

B.2.1.5 Belanja Lembur (Kelompok Akun 5122)

Realisasi Belanja Lembur untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp881.775.000 atau 99,97% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp882.000.000. Tidak ada pengembalian untuk Belanja Lembur. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Lembur adalah sebagai berikut:

Tabel 43: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Lembur TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
512211	Belanja Uang Lembur	710.000.000	709.974.000	100,00
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	172.000.000	171.801.000	99,88
Jumlah Belanja Kotor		882.000.000	881.775.000	99,97
	Pengembalian Belanja Lembur	0	0	0,00
Jumlah Belanja Lembur		882.000.000	881.775.000	99,97

Rincian perbandingan realisasi Belanja Lembur untuk periode TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 44: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Lembur TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
512211	Belanja Uang Lembur	709.974.000	1.138.365.000	(37,63)
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	171.801.000	184.950.000	(7,11)
Jumlah Belanja Kotor		881.775.000	1.323.315.000	(33,37)
	Pengembalian Belanja Lembur	0	(1.370.000)	(100,00)
Jumlah Belanja Lembur		881.775.000	1.321.945.000	(33,30)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Uang Lembur pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 33,30% dibandingkan dengan TA 2024 dikarenakan adanya kebijakan efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Lembur berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 45: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Lembur Berdasarkan Satuan Kerja
TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
512211	Belanja Uang Lembur	709.974.000	1.138.365.000	(37,63)
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	171.801.000	184.950.000	(7,11)
Jumlah Belanja Kotor		881.775.000	1.323.315.000	(33,37)
	Pengembalian Belanja Lembur	0	(1.370.000)	100,00
Jumlah Belanja Lembur		881.775.000	1.321.945.000	(33,30)

Belanja Tunjangan
Khusus & Belanja
Pegawai Transito
Rp91.978.458.105

B.2.1.6 Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito (Kelompok Akun 5124)

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 91.978.458.105 atau 98,76% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp 93.137.410.000 setelah dikurangi pengembalian belanja tunjangan khusus & belanja pegawai transito sebesar Rp17.126.604 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Transito adalah sebagai berikut:

Tabel 46: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito TA 2025
(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	85.317.119.000	84.178.159.399	98,67
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	7.820.291.000	7.817.425.310	99,96
Jumlah Belanja Kotor		93.137.410.000	91.995.584.709	98,77
	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	0	(17.126.604)	(100)
Jumlah Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito		93.137.410.000	91.978.458.105	98,76

Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito berupa Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) yang ditujukan untuk membayar Tunjangan Kinerja PNS dan PPPK.

Adapun realisasi Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito untuk periode TA 2025 berupa Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK (512414) sebesar Rp12.306.604 dan Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) (512411) sebesar

Rp4.820.000. Sehingga jumlah realisasi dari Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito Netto untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp91.978.458.105.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 47: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	84.178.159.399	79.497.785.152	5,89
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	7.817.425.310	6.220.103.162	25,68
Jumlah Belanja Kotor		91.995.584.709	85.717.888.314	7,32
Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito		(17.126.604)	(46.728.216)	(63,35)
Jumlah Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito		91.978.458.105	85.671.160.098	7,36

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito pada periode TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 7,36% dibandingkan dengan periode TA 2024. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 61 orang—53 orang CPNS umum, 3 orang CPNS PSSN, dan 3 orang CPNS IPDN--dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 117 orang.

Rincian Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito untuk periode TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 48: Rincian Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	NTPN	Tanggal Bayar	Nominal
Akun 512414 (Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK)				
1	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01332 SP2D 251331301018284_BELANJA PEGAWAI_Nabilla	38EAD7NAS8ALBR2E	04-06-2025	6.118.019
2	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01332 SP2D 251331301018284_BELANJA PEGAWAI_lksan	8ECA2397D3ENAR39	04-06-2025	6.188.585
Total Akun Akun 512414				12.306.604
Akun 512411 (Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)				
1	PENGEMBALIAN BELANJA SPM 01793 SP2D 259991310193089_BELANJA PEGAWAI_MOHAMMAD AVERROUCE	427D6397D4EJUPH6	11-07-2025	4.820.000
Total Akun Akun 512411				4.820.000
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA Tunjangan Khusus & Pegawai Transito				17.126.604

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 49: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito Berdasarkan

Satuan Kerja periode TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	0	3.787.141.049	(100,00)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	91.978.458.105	81.884.019.049	12,33
Jumlah Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito		91.978.458.105	85.671.160.098	7,36

Belanja Barang
Rp129.681.594.836

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp 129.681.594.836 yang berarti 74,63% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp 173.759.803.000 setelah dikurangi pengembalian belanja barang sebesar Rp 571.303.289.

Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang untuk periode TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 50: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
5211	Belanja Barang Operasional	24.390.124.000	23.307.528.422	95,56
5212	Belanja Barang Non Operasional	15.406.577.000	11.322.014.556	73,49
5218	Belanja Barang Persediaan	2.790.827.000	2.569.623.778	92,07
5221	Belanja Jasa	33.285.448.000	22.356.952.397	67,17
5231	Belanja Pemeliharaan	14.550.317.000	14.333.548.948	98,51
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	78.047.928.000	53.006.930.511	67,92
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	5.288.582.000	3.356.299.513	63,46
Jumlah Belanja Kotor		173.759.803.000	130.252.898.125	74,96
Pengembalian Belanja Barang		0	(571.303.289)	0,00
Jumlah Belanja Barang		173.759.803.000	129.681.594.836	74,63

Realisasi Pengembalian Belanja Barang untuk periode TA 2025 terdiri dari pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) sebesar Rp544.387.489, pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242) sebesar Rp5.413.400, pengembalian Belanja Jasa (5221) sebesar Rp21.422.000, pengembalian Belanja Barang Non Operasional (5212) sebesar Rp26.400, dan pengembalian Belanja Barang Operasional sebesar Rp54.000, sehingga jumlah realisasi dari Belanja Barang Netto untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp129.681.594.836.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 51: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
5211	Belanja Barang Operasional	23.307.528.422	17.762.762.687	31,22
5212	Belanja Barang Non Operasional	11.322.014.556	18.465.728.887	(38,69)
5218	Belanja Barang Persediaan	2.569.623.778	3.781.671.953	(32,05)
5221	Belanja Jasa	22.356.952.397	44.574.637.817	(49,84)
5231	Belanja Pemeliharaan	14.333.548.948	12.750.968.807	12,41
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	53.006.930.511	126.806.452.982	(58,20)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	3.356.299.513	9.053.752.223	(62,93)
Jumlah Belanja Kotor		130.252.898.125	233.195.975.356	(44,14)
Pengembalian Belanja		(571.303.289)	(929.071.444)	(38,51)
Jumlah Belanja Barang		129.681.594.836	232.266.903.912	(44,17)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Barang pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 44,17% dibandingkan 31 Desember 2024.

Analisa peningkatan/penurunan Belanja Barang per masing-masing Belanja akan dijelaskan pada Sub Judul B.2.2.1 sampai dengan B.2.2.7.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Barang berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 52: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	0	17.905.342.145	(100,00)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	129.681.594.836	214.361.561.767	(39,50)
Jumlah Belanja Barang		129.681.594.836	232.266.903.912	(44,17)

Belanja Barang
Operasional
Rp23.307.474.422

B.2.2.1 Belanja Barang Operasional (Kelompok Akun 5211)

Realisasi Belanja Barang Operasional untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp23.307.474.422 yang berarti 95,56% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp24.390.124.000 setelah dikurangi pengembalian belanja barang operasional sebesar Rp54.000 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 53: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	15.097.169.000	14.483.561.571	95,94
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	40.932.000	34.253.800	83,68
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	592.754.000	574.900.000	96,99
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	8.659.269.000	8.214.813.051	94,87
Jumlah Belanja Kotor		24.390.124.000	23.307.528.422	95,56
Pengembalian Belanja Barang Operasional		0	(54.000)	0,00
Jumlah Belanja Barang Operasional		24.390.124.000	23.307.474.422	95,56

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Operasional untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 54: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	14.483.561.571	14.085.128.050	2,83
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	34.253.800	108.717.500	(68,49)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	574.900.000	534.732.000	7,51
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	8.214.813.051	3.034.185.137	170,74
Jumlah Belanja Kotor		23.307.528.422	17.762.762.687	31,22
Pengembalian Belanja Barang Operasional		(54.000)	(70)	77,043
Jumlah Belanja Barang Operasional		23.307.474.422	17.762.762.617	31,22

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Barang Operasional pada 31 Desember TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 31,22% dibandingkan dengan 31 Desember TA 2024. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan yang cukup signifikan pada akun 521119 (170,74%). Hal ini disebabkan adanya kenaikan besaran Dana Operasional Menteri dan adanya pembayaran Dana Operasional Wakil Menteri pada tahun 2025.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Operasional berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 55: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional Berdasarkan Satuan Kerja
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	4.380.203.260	(100,00)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	23.307.474.422	13.382.559.357	74,16
Jumlah Belanja Jasa		23.307.474.422	17.762.762.617	31,22

Belanja Barang
Non Operasional
Rp11.321.988.156

B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional (Kelompok Akun 5212)

Realisasi Belanja Barang Non Operasional untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp11.321.988.156 yang berarti 73,49% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp15.406.577.000 setelah dikurangi pengembalian belanja barang non operasional sebesar Rp26.400 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Non Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 56: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
521211	Belanja Bahan	12.991.808.000	9.213.073.919	70,91
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	259.838.000	55.084.000	21,20
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.154.931.000	2.053.856.637	95,31
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor		15.406.577.000	11.322.014.556	73,49
Pengembalian Belanja Barang Non Operasional		0	(26.400)	0,00
Jumlah Belanja Barang Non Operasional		15.406.577.000	11.321.988.156	73,49

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Non Operasional untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 57: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional

TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
521211	Belanja Bahan	9.213.073.919	13.140.026.434	(29,89)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	55.084.000	128.616.000	(57,17)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.053.856.637	5.118.413.033	(59,87)
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	78.673.420	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor		11.322.014.556	18.465.728.887	(38,69)
Pengembalian Belanja Barang Non Operasional		(26.400)	(1.244.760)	(97,88)
Jumlah Belanja Barang Non Operasional		11.321.988.156	18.464.484.127	(38,68)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Barang Non Operasional pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 38,68% dibandingkan 31 Desember TA 2024. Penurunan tersebut diakibatkan adanya kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Non Operasional berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 58: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional Berdasarkan Satuan Kerja

TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	0	211.077.449	(100,00)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	11.321.988.156	18.253.406.678	(37,97)
Jumlah Belanja Barang Non Operasional		11.321.988.156	18.464.484.127	(38,68)

Belanja Barang
Persediaan
Rp2.569.623.778

B.2.2.3 Belanja Barang Persediaan (Kelompok Akun 5218)

Realisasi Belanja Barang Persediaan untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp2.569.623.778 yang berarti 92,07% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPATA 2025 sebesar Rp2.790.827.000 setelah dikurangi pengembalian belanja barang persediaan sebesar Rp0 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 59: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.790.827.000	2.569.623.778	92,07
Jumlah Belanja Kotor		2.790.827.000	2.569.623.778	92,07
Pengembalian Belanja Barang Persediaan		0	0	0,00
Jumlah Belanja Barang Persediaan		2.790.827.000	2.569.623.778	92,07

Adapun rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Persediaan untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 60: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.569.623.778	3.781.671.953	(32,05)
Jumlah Belanja Kotor		2.569.623.778	3.781.671.953	(32,05)
Pengembalian Belanja Barang Persediaan		0	0	0,00
Jumlah Belanja Barang Persediaan		2.569.623.778	3.781.671.953	(32,05)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Barang Persediaan 31 Desember TA 2025 mengalami penurunan sebesar 32,05% dibandingkan 31 Desember TA 2024. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi digunakan untuk pengadaan Alat Tulis Kantor, Pembelian Map pertanggungjawaban keuangan, serta amplop dinas, yang seluruhnya digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, penurunan ini sejalan dengan langkah efisiensi, maka dilakukan pemanfaatan dari persediaan yang ada.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Persediaan berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 61: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Persediaan Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	0	82.059.800	0
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	2.569.623.778	3.699.612.153	(30,54)
Jumlah Barang Persediaan		2.569.623.778	3.781.671.953	(32,05)

Belanja Jasa
Rp22.335.530.397

B.2.2.4 Belanja Jasa (Kelompok Akun 5221)

Realisasi Belanja Jasa untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp22.335.530.397 yang berarti 67,1% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp33.285.448.000 setelah dikurangi pengembalian belanja jasa sebesar Rp21.422.000 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 62: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
522111	Belanja Langganan Listrik	2.745.996.000	2.677.492.708	97,51
522112	Belanja Langganan Telepon	54.000.000	53.656.273	99,36
522113	Belanja Langganan Air	4.200.000	1.160.480	27,63
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.848.684.000	3.812.684.000	99,06
522131	Belanja Jasa Konsultan	5.509.746.000	4.170.065.429	75,69
522141	Belanja Sewa	1.670.943.000	789.539.315	47,25
522151	Belanja Jasa Profesi	11.712.320.000	4.475.200.000	38,21
522191	Belanja Jasa Lainnya	7.739.559.000	6.377.154.192	82,40
Jumlah Belanja Kotor		33.285.448.000	22.356.952.397	67,17
Pengembalian Belanja Jasa		0	(21.422.000)	0,00
Jumlah Belanja Jasa		33.285.448.000	22.335.530.397	67,10

Rincian perbandingan realisasi Belanja Jasa untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 63: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Jasa TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
522111	Belanja Langganan Listrik	2.677.492.708	4.100.819.397	(34,71)
522112	Belanja Langganan Telepon	53.656.273	69.014.990	(22,25)
522113	Belanja Langganan Air	1.160.480	1.655.700	(29,91)
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.812.684.000	3.857.895.652	(1,17)
522131	Belanja Jasa Konsultan	4.170.065.429	6.746.417.445	(38,19)
522141	Belanja Sewa	789.539.315	4.372.610.220	(81,94)
522151	Belanja Jasa Profesi	4.475.200.000	11.180.212.994	(59,97)
522191	Belanja Jasa Lainnya	6.377.154.192	14.246.011.419	(55,24)
Jumlah Belanja Kotor		22.356.952.397	44.574.637.817	(49,84)
Pengembalian Belanja Jasa		(21.422.000)	(6.120.000)	250,03
Jumlah Belanja Jasa		22.335.530.397	44.568.517.817	(49,88)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Jasa pada 31 Desember TA 2025 mengalami penurunan sebesar 49,88% dibandingkan 31 Desember TA 2024. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Jasa berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 64: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Jasa Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	5.413.541.889	(100,00)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	22.335.530.397	39.154.975.928	(42,96)
Jumlah Belanja Jasa		22.335.530.397	44.568.517.817	(49,88)

Belanja

Pemeliharaan

Rp14.333.548.948

B.2.2.5 Belanja Pemeliharaan (Kelompok Akun 5231)

Realisasi Belanja Pemeliharaan untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp14.333.548.948 yang berarti 98,51% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp14.550.317.000 setelah dikurangi pengembalian belanja pemeliharaan sebesar Rp0 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 65: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.923.416.000	5.872.848.080	99,15
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	791.920.000	788.909.446	99,62
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	250.768.000	228.213.251	91,01
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.330.070.000	6.211.753.012	98,13
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	570.527.000	562.309.500	98,56
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	683.616.000	669.515.659	97,94
Jumlah Belanja Kotor		14.550.317.000	14.333.548.948	98,51
Pengembalian Belanja Pemeliharaan		0	0	0,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan		14.550.317.000	14.333.548.948	98,51

Adapun rincian perbandingan realisasi Belanja Pemeliharaan untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 66: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.872.848.080	4.243.126.006	38,41
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	788.909.446	466.471.840	69,12
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	228.213.251	59.739.211	282,02
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.211.753.012	6.666.422.442	(6,82)
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	318.727.754	-
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	562.309.500	61.555.000	813,51
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	669.515.659	934.926.554	(28,39)
Jumlah Belanja Kotor		14.333.548.948	12.750.968.807	12,41
Pengembalian Belanja Pemeliharaan		0	0	0,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan		14.333.548.948	12.750.968.807	12,41

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Pemeliharaan pada 31 Desember TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 12,41% dibandingkan 31 Desember TA 2024. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan penggunaan akun Belanja Pemeliharaan Jaringan (523133) sebesar Rp440.747.000, yang seharusnya secara substansi tergolong Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121). Terkait hal tersebut, telah dilakukan penjurnalan koreksi pada modul GLP.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Pemeliharaan berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 67: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	0	1.651.393.703	(100,00)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	14.333.548.948	11.099.575.104	29,14
Jumlah Belanja Pemeliharaan		14.333.548.948	12.750.968.807	12,41

Belanja Perjalanan
Dinas Dalam
Negeri
Rp52.462.543.022

B.2.2.6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Kelompok Akun 5241)

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp52.462.543.022 yang berarti 67,22% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp78.047.928.000 setelah dikurangi pengembalian belanja

perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp544.387.489 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 68: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.712.744.000	29.302.104.565	71,97
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	994.645.000	697.735.000	70,15
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.338.531.000	19.406.524.000	63,97
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.002.008.000	3.600.566.946	59,99
Jumlah Belanja Kotor		78.047.928.000	53.006.930.511	67,92
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		0	(544.387.489)	0,00
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		78.047.928.000	52.462.543.022	67,22

Realisasi Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk periode TA 2025 merupakan pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) sebesar Rp544.387.489, sehingga jumlah realisasi dari Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Netto untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp52.462.543.022.

Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk periode TA 2025 disajikan pada Lampiran 19.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 69: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.302.104.565	54.315.933.565	(46,05)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	697.735.000	829.119.500	(15,85)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.406.524.000	60.588.303.000	(67,97)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.600.566.946	11.073.096.917	(67,48)
Jumlah Belanja Kotor		53.006.930.511	126.806.452.982	(58,20)
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		(544.387.489)	(819.610.662)	(33,58)
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		52.462.543.022	125.986.842.320	(58,36)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 58,36% dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Peningkatan ini sejalan dengan pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD, pemanfaatan media komunikasi online dalam pelaksanaan rapat serta diskusi ditingkatkan. Selain itu adanya pembatasan rapat di hotel berbintang lima dan pembatasan jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mendukung efisiensi menyebabkan penurunan yang cukup signifikan pada pos Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 70: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	0	6.167.066.044	(100,00)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	52.462.543.022	119.819.776.276	(56,22)
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Neg		52.462.543.022	125.986.842.320	(58,36)

Belanja Perjalanan
Dinas Luar Negeri
Rp3.350.886.113

B.2.2.7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (Kelompok Akun 5242)

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp3.350.886.113 yang berarti 63,36% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp5.288.582.000 setelah dikurangi pengembalian belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp5.413.400 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 71: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	5.288.582.000	3.356.299.513	63,46
Jumlah Belanja Kotor		5.288.582.000	3.356.299.513	63,46
	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0	(5.413.400)	100
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Nege		5.288.582.000	3.350.886.113	63,36

Rincian perbandingan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 72: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3.356.299.513	9.053.752.223	(62,93)
Jumlah Belanja Kotor		3.356.299.513	9.053.752.223	(62,93)
	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	(5.413.400)	(102.095.952)	(94,70)
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		3.350.886.113	8.951.656.271	(62,57)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 62,57% dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 73: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	3.350.886.113	8.951.656.271	(62,57)
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		3.350.886.113	8.951.656.271	(62,57)

Belanja Modal
Rp31.602.464.717

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp31.602.464.717 yang berarti 44,9% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp70.383.361.000. Tidak ada pengembalian Belanja Modal untuk periode TA 2025. Sebagai bentuk tindaklanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 terkait efisiensi, terdapat pemblokiran anggaran belanja modal sebesar Rp38.496.434.000, sehingga total anggaran setelah pemblokiran adalah Rp31.886.927.000, yang berarti realisasi belanja modal TA 2025 adalah 99.11% dari pagu setelah blokir.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk periode TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 74: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.786.308.000	19.396.128.042	98,03
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.120.000.000	2.102.526.522	99,18
5361	Belanja Modal Lainnya	48.477.053.000	10.103.810.153	20,84
Jumlah Belanja Kotor		70.383.361.000	31.602.464.717	44,90
Pengembalian Belanja Modal		0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal		70.383.361.000	31.602.464.717	44,90

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 75: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.396.128.042	37.995.979.715	(48,95)
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.102.526.522	2.433.205.227	(13,59)
5361	Belanja Modal Lainnya	10.103.810.153	15.318.934.284	(34,04)
Jumlah Belanja Kotor		31.602.464.717	55.748.119.226	(43,31)
Pengembalian Belanja Modal		0	(10.346.295)	(100,00)
Jumlah Belanja Modal		31.602.464.717	55.737.772.931	(43,30)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 43,30% bila dibandingkan dengan TA 2024.

Analisa peningkatan/penurunan Belanja Modal per masing-masing Belanja akan dijelaskan pada Sub Judul B.2.3.1 sampai dengan B.2.3.3.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Modal berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 76: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	0	48.487.200	(100,00)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	31.602.464.717	55.689.285.731	(43,25)
Jumlah Belanja Modal		31.602.464.717	55.737.772.931	(43,30)

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp19.396.128.042

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Kelompok Akun 5321)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp19.396.128.042 yang berarti 98,03% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp19.786.308.000 setelah dikurangi pengembalian belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp0 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 77: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.454.837.000	19.064.662.038	97,99
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	331.471.000	331.466.004	100,00
Jumlah Belanja Kotor		19.786.308.000	19.396.128.042	98,03
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		19.786.308.000	19.396.128.042	98,03

Adapun rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 78: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.064.662.038	37.533.721.715	(49,21)
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	331.466.004	462.258.000	(28,29)
Jumlah Belanja Kotor		19.396.128.042	37.995.979.715	(48,95)
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		19.396.128.042	37.995.979.715	(48,95)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 48,95% dibandingkan pada TA 2024, hal ini sejalan dengan efisiensi anggaran.

Adapun pada TA 2025, realisasi belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk pembelian berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan organisasi, seperti blender, presto cooker, notebook, tablet PC, brankas, video switcher, video conference, video mixer, alat studio, hub, dan televisi.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 79: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	0	48.487.200	(100,00)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	19.396.128.042	37.947.492.515	(48,89)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		19.396.128.042	37.995.979.715	(48,95)

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp2.102.526.522

B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Kelompok Akun 5331)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp2.102.526.522 yang berarti 99,18% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp2.120.000.000 setelah dikurangi pengembalian belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp0 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 80: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2.120.000.000	2.102.526.522	99,18
Jumlah Belanja Kotor		2.120.000.000	2.102.526.522	99,18
	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		2.120.000.000	2.102.526.522	99,18

Adapun rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 81: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2.102.526.522	2.433.205.227	(13,59)
Jumlah Belanja Kotor		2.102.526.522	2.433.205.227	(13,59)
	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Gedung dan Bangunan		2.102.526.522	2.433.205.227	(13,59)

Berdasarkan tabel di atas untuk belanja penambahan Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar 13,59% hal ini disebabkan adanya efisiensi pada

kegiatan renovasi pada Ruang Kerja Gedung Kementerian PANRB di Pekayon Jakarta Timur.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 82: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	2.102.526.522	2.433.205.227	(13,59)
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		2.102.526.522	2.433.205.227	(13,59)

B.2.3.3 Belanja Modal Lainnya (5361)

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode TA 2025 adalah sebesar Rp10.103.810.153 yang berarti 20,84% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar Rp48.477.053.000 setelah dikurangi pengembalian belanja modal lainnya sebesar Rp0. Realisasi belanja modal yang cukup rendah disebabkan oleh adanya pemblokiran anggaran Belanja Modal Lainnya sebesar Rp38.291.360.000 sehingga anggaran yang tersedia setelah blokir, yaitu, Rp10.185.693.000, yang berarti realisasi Belanja Modal Lainnya adalah 99,20% dari anggaran setelah blokir. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 83: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
536111	Belanja Modal Lainnya	45.278.413.000	6.954.650.243	15,36
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	3.198.640.000	3.149.159.910	98,45
Jumlah Belanja Kotor		48.477.053.000	10.103.810.153	20,84
Pengembalian Belanja Modal Lainnya		0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal Lainnya		48.477.053.000	10.103.810.153	20,84

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Lainnya untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 84: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
536111	Belanja Modal Lainnya	6.954.650.243	14.924.340.384	(53,40)
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	3.149.159.910	394.593.900	698,08
Jumlah Belanja Kotor		10.103.810.153	15.318.934.284	(34,04)
Pengembalian Belanja Modal Lainnya		0	(10.346.295)	(100,00)
Jumlah Belanja Modal Lainnya		10.103.810.153	15.308.587.989	(34,00)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja modal lainnya pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 34,04% dibandingkan dengan TA 2024. Penurunan ini disebabkan oleh pelaksanaan efisiensi belanja lisensi serta pembangunan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pada periode ini, Belanja Modal Lainnya digunakan untuk renovasi Ruang Kepala Biro, Ruang PPID, Ruang UKPBJ, dan Kanopi rumah dinas Menteri.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Lainnya berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 85: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Berdasarkan Satuan Kerja
TA 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	10.103.810.153	15.308.587.989	(34,00)
Jumlah Belanja Modal Lainnya		10.103.810.153	15.308.587.989	(34,00)

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset Lancar

Rp2.048.830.899

C.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.048.830.899 dan Rp2.167.879.322 turun sebesar Rp119.048.423 atau 5,49% dibandingkan 31 Desember 2024.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 86: Rincian Aset Lancar pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	Naik (Turun) %
	Aset Lancar				
1141	Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	655.572.144	980.460.983	(324.888.839)	(33,14)
1152	Piutang Bukan Pajak	489.553.104	487.703.112	1.849.992	0,38
1162	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(34.386.361)	(2.438.516)	(31.947.845)	1.310,13
	Piutang Bukan Pajak (Netto)	455.166.743	485.264.596	(30.097.853)	(6,20)
1171	Persediaan	938.092.012	702.153.743	235.938.269	33,60
	Jumlah Aset Lancar	2.048.830.899	2.167.879.322	(119.048.423)	(5,49)

Kas di Bendahara

Pengeluaran Rp0

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kementerian PANRB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas di Bendahara Pengeluaran digunakan untuk mencatat kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (sisa UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kementerian PANRB mengelola uang yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari Uang Persediaan dan Pembayaran LS Bendahara. Sesuai dengan Surat Kepala KPPN IV Jakarta No. S-

1397/KPN.1204/2025 tanggal 8 September 2025 Bendahara Pengeluaran mengelola Uang Persediaan Tunai sebesar Rp270.000.000 dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah sebesar Rp630.000.000.

Tabel 87: Rincian Besaran UP per Kementerian TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Dasar Hukum	Nominal UP	
		Tunai	Kartu Kredit Pemerintah
1	Surat Kepala KPPN IV No. S-1397/KPN.1204/2025 tanggal 8 September 2025	270.000.000	630.000.000

Kas di bendahara pengeluaran adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional instansi pemerintah baik berupa uang tunai, giro, atau setara kas lainnya yang digunakan untuk pembayaran langsung. Pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terdapat 1 (satu) rekening induk dan 7 (tujuh) *virtual account* yang terdiri dari 1 (satu) *Virtual Account* Bendahara Pengeluaran dan 6 (enam) *Virtual Account* Bendahara Pengeluaran Pembantu yang seluruhnya merupakan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor virtual account sebagai berikut;

Tabel 88: Rincian Rekening Induk dan Rekening Virtual Kementerian PANRB TA 2025

No.	Pemegang Virtual Account	Nomor Virtual Account	Surat Penetapan
1	RKK Kemenpanrb OPS	019301003449303	S-1230/WPB.12/KP.04/2020
2	Bendahara Pengeluaran	650304279501000	S-1231/WPB.12/KP.04/2020
3	Bendahara Pengeluaran Pembantu 01	652934279501001	S-109/WPB.12/KP.04/2021
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu 02	650304279501002	S-109/WPB.12/KP.04/2021
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu 03	650304279501003	S-3796/KPN.1204/2022
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu 04	650304279501004	S-1/KPN.1204/2025
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu 05	650304279501005	S-1/KPN.1204/2025
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu 06	650304279501006	S-1/KPN.1204/2025

Kas lainnya dan
Setara Kas Rp0

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas digunakan untuk mencatat Kas Lainnya dan Setara Kas, yang mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

Kementerian PANRB menggunakan Rekening yang sama untuk mengelola seluruh kas baik berupa Kas di Bendahara Pengeluaran maupun Kas Lainnya

dan Setara Kas, dalam hal ini Kementerian PANRB memiliki 1 rekening Bendahara Pengeluaran dan 6 rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pada saat Laporan Keuangan ini disusun, seluruh rekening pada Kementerian PANRB telah nihil.

Belanja Dibayar
Dimuka (*Prepaid*)
Rp655.572.144

C.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) Kementerian PANRB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp655.572.144 dan Rp980.460.983 dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 89: Rincian Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
114112	Belanja Modal Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	655.572.144	980.460.983	(33,14)
Jumlah		655.572.144	980.460.983	(33,14)

Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi masa pemanfaatannya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima.

Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) sebesar Rp655.572.144 digunakan untuk mencatat pengeluaran yang telah dapat ditentukan penggunaannya, namun belum menerima manfaat baik berupa barang/jasa atas pengeluaran tersebut. Dan atas pengeluaran tersebut telah terpenuhinya bukti-bukti legal/dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dari pihak ketiga seperti kwitansi, invoice, dll. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) pada Kementerian PANRB berasal dari Belanja Operasional Aplikasi/*Software* dengan masa aktif sampai dengan 12 bulan dan digunakan di operasional pekerjaan dan pemerintahan.

Perubahan kebijakan terkait pengakuan beban atas belanja dibayar dimuka dari yang sebelumnya diakui perhari menjadi perbulan dengan *cut-off* tanggal 14 setiap bulannya.

Seluruh rincian Belanja Dibayar Dimuka disajikan dalam lampiran.

Piutang Bukan
Pajak
Rp489.553.104

C.1.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp489.553.104 dan Rp487.703.112.

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca. Piutang Bukan Pajak pada Kementerian PANRB sebagian besar berasal dari piutang atas kelebihan pembayaran belanja barang yang diterima oleh pihak ketiga dan kekurangan volume pekerjaan.

Piutang Bukan Pajak Kementerian Menteri Negara PAN disajikan sebagai berikut:

Tabel 90: Rincian Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
115212	Piutang Bukan Pajak	489.553.104	487.703.112	0,38
	Jumlah	489.553.104	487.703.112	0,38%

Piutang Bukan Pajak di Kementerian PANRB mengalami kenaikan 0,38% terdiri dari piutang lainnya yang berasal dari temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2023 dan TA 2025 oleh BPK, dan sebagai tindak lanjut Kementerian PANRB telah membentuk TPKN serta melakukan verifikasi dan pendekatan dalam penyelesaian piutang.

Daftar Piutang Satuan Kerja Menteri Negara PAN adalah:

Tabel 91: Rincian Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2025 berdasarkan kategori

(dalam rupiah)

No	Piutang	Nominal	Kategori
1	Beban Jasa Konsultan A	79.180.348	Lancar
2	Pembelian Soundsystem	31.943.762	Lancar
3	Renovasi Toilet	42.225.882	Lancar
4	Temuan BPK TA 2023	336.203.112	Kurang Lancar
	Jumlah	489.553.104	

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Bukan
Pajak
(Rp34.386.361)

C.1.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp34.386.361) dan (Rp2.438.516).

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Dalam kebijakan akuntansi, penyisihan piutang tidak tertagih dihitung sebagai persentase tertentu dari akun piutang. Piutang yang ditagihkan

dikategorikan sebagai lancar dan kurang lancar, untuk itu disisihkan sebesar 5 permil (5/1000) dan 10 permil (10/1000) dari nilai piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Kementerian PANRB disajikan sebagai berikut:

Tabel 92: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (turun) %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan	(34.386.361)	(2.438.516)	1.310,13
Jumlah	(34.386.361)	(2.438.516)	1.310,13

Piutang yang di tagihkan masih dikategorikan sebagai lancar dan kurang lancar, untuk itu di sisihkan sebesar 5 permil (5/1000) dari nilai bagian piutang lancar dan 10 permil (10/1000) dari nilai bagian piutang kurang lancar. Dalam hal ini merupakan 5/1000 dari saldo akun Piutang Lainnya.

Tabel 93: Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	153.349.992	0,50%	766.050
Kurang Lancar	336.203.112	10%	33.620.311
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	489.553.104		34.386.361

Piutang Bukan
Pajak (Netto)
Rp455.166.743

C.1.6 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Piutang Bukan Pajak (Netto) Kementerian PANRB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp455.166.743 dan Rp485.264.596.

Piutang Bukan Pajak (Netto) merupakan selisih piutang antara Piutang Bukan Pajak dikurangi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak.

Tabel 94: Penyisihan Piutang Bukan Pajak (Netto) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (turun) %
Piutang Bukan Pajak (Netto)	455.166.743	485.264.596	(6,20)
Jumlah	455.166.743	485.264.596	(6,20)

Mutasi atas Piutang Bukan Pajak tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 95: Mutasi Piutang Bukan Pajak Tahun 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	Nominal
-Saldo Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2024	487.703.112
Mutasi Tambah	153.349.992
- Kekurangan volume pekerjaan renovasi toilet	42.225.882
- Kekurangan volume pekerjaan pengadaan sound system	31.943.762
- Pekerjaan yang tidak terealisasi pada jasa konsultasi AI	79.180.348
Mutasi Kurang	(185.886.361)
- Penyetoran cicilan oleh Pihak ke 3	151.500.000
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih	34.386.361
Saldo Piutang Bukan Pajak Netto di Neraca per 31/12/2025	455.166.743

Persediaan
Rp938.092.012

C.1.7 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp938.092.012,00 dan Rp702.153.743,00.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 96: Perbandingan Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
1152	Barang Konsumsi	938.063.012	702.153.743	33,60
1162	Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.000	-	-
Jumlah		938.092.012	702.153.743	33,60

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Adapun mutasi persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 97: Mutasi Persediaan Tahun 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	
-Saldo awal persediaan	702.153.743
Mutasi Tambah	3.468.085.267
- Pembelian	3.415.859.562
- Reklasifikasi Masuk	52.225.705
Mutasi Kurang	3.232.146.998
- Persediaan Habis Pakai	3.172.461.257
- Reklasifikasi Keluar	19.504.705
- Persediaan Usang	25.642.500
- Koreksi Kuantitas Kurang	14.538.536
Saldo Akhir Nilai Persediaan di Neraca	938.092.012

Reklasifikasi Masuk dan Keluar merupakan pencatatan atas penyesuaian klasifikasi sub-sub kelompok barang persediaan yang sebelumnya tidak sesuai, guna memastikan ketepatan pengelompokan dalam laporan.

Penjelasan atas mutasi tambah:

1. Pembelian
Pembelian sebesar Rp3.415.859.562 berupa persediaan Barang Konsumsi, obat-obatan klinik, Bahan untuk Pemeliharaan dan Metera.
2. Reklasifikasi Masuk
Nilai reklasifikasi yang dilakukan sebesar Rp19.504.705 merupakan kertas *concorde*, alat kedokteran umum dan obat-obatan. Reklasifikasi masuk senilai Rp32.721.000 adalah persediaan adaptor/charger laptop yang dibeli menggunakan akun belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

Penjelasan atas mutasi kurang:

1. Reklasifikasi keluar
Nilai reklasifikasi yang dilakukan sebesar Rp19.504.705 merupakan kertas *concorde*, alat kedokteran umum dan obat-obatan.
2. Perubahan Kondisi Persediaan menjadi Usang
Perubahan kondisi persediaan menjadi usang berdasarkan Berita Acara Nomor BA-01/BN.01.25/02/2025 tanggal 25 Februari 2025, merupakan persediaan yang sudah lama tidak bergerak dan tidak lagi digunakan karena dulunya dimanfaatkan untuk mendukung aset atau pekerjaan yang kini sudah tidak aktif. Barang-barang tersebut antara lain berupa penghapus mesin tik Brother, CD-R, DVD-RW, dan blanko kementerian dengan format lama dan lain-lain.
3. Koreksi Kuantitas Kurang

Koreksi Kuantitas Kurang senilai Rp14.538.536 adalah pembelian persediaan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dicatat pada akun persediaan yang salah. Sehingga berdasarkan konsultasi dengan Direktorat SITP untuk melakukan pendetailan Persediaan yang benar perlu dilakukan koreksi.

Rincian Persediaan Barang Persediaan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap
Rp203.481.883.704

C.2 ASET TETAP

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian PANRB adalah masing-masing sebesar Rp203.481.883.704 dan Rp185.738.779.002 meningkat sebesar Rp17.743.104.702 atau 9,55% dibandingkan 31 Desember 2024.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 98: Rincian Aset Tetap pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	Naik (Turun) %
	Aset Tetap				
131111	Tanah	60.334.049.494	60.334.049.494	0	-
132111	Peralatan dan Mesin	179.998.618.808	172.047.674.829	7.950.943.979	4,62
133111	Gedung dan Bangunan	109.802.758.304	91.907.826.122	17.894.932.182	19,47
134112	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.598.328.550	1.598.328.550	0	-
134113	Aset Tetap Lainnya	1.357.465.299	1.387.389.549	(29.924.250)	(2,16)
137XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(149.609.336.751)	(141.536.489.542)	(8.072.847.209)	5,70
Jumlah Aset Tetap		203.481.883.704	185.738.779.002	17.743.104.702	9,55

Nilai perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 9,55% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kegiatan renovasi gedung dan bangunan, serta pembangunan Aset Tetap Lainnya dalam bentuk Aset Tetap Renovasi (ATR).

Peningkatan tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap kebutuhan ruang kerja pegawai Kementerian PANRB sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang terbaru, serta untuk memenuhi kebutuhan pimpinan dan pemugaran terhadap aset yang masih digunakan.

Tanah

Rp60.334.049.494

C.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp60.334.049.494 dan Rp60.334.049.494.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tabel 99: Perbandingan Tanah 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
131111	Tanah	60.334.049.494	60.334.049.494	0%
Jumlah		60.334.049.494	60.334.049.494	-

Tanah yang dimiliki oleh Kementerian PANRB terdiri dari:

1. Sertifikat Hak Pakai No. 00472, NIB 09040105.07682 di Jalan Cipinang Cemepedak II No 25A RT 011/RW 06. Dengan luas Tanah 2.345 m². Digunakan sebagai Kantor Inspektorat Kementerian PANRB. untuk Sertifikat Tanah Cipinang seluas 2.345 m² dan Sertifikat Tanah Mess Pekayon seluas 397 m² saat ini sedang dalam pengurusan di kantor pertanahan Jakarta Timur. Proses yang sudah dilakukan adalah penghapusan hak lama, permohonan hak baru hingga pengukuran ulang atas kedua tanah diatas. Saat ini progresnya sudah memasuki tahapan untuk penerbitan sertifikat baru.
2. Sertifikat Hak Pakai No. 00034, NIB 09040702.07266 di Jalan Lapan No.8 RT 008/RW 01. Dengan Luas Tanah 397 m². Diperuntukkan untuk Mess Pegawai Kementerian PANRB. untuk Sertifikat Tanah Cipinang seluas 2345 m² dan Sertifikat Tanah Mess Pekayon seluas 397 m² saat ini sedang dalam pengurusan di kantor pertanahan Jakarta Timur. Proses yang sudah dilakukan adalah penghapusan hak lama, permohonan hak baru hingga pengukuran ulang atas kedua tanah

diatas. Saat ini progresnya sudah memasuki tahapan untuk penerbitan sertifikat baru.

3. Sertifikat Hak Pakai No. 00035, NIB 09040702.07265 di Jalan Lapan No. 8 RT008/RW 01. Dengan Luas Tanah 5.951 m², Terhadap Sertifikat Tanah Kantor Pekayon seluas 5.951 m², saat ini sedang dilakukan proses pemecahan sertifikat oleh pihak BRIN dikarenakan pada area dimaksud terdapat lahan yang telah digunakan oleh warga sekitar yang merupakan eks Pejabat dan/atau pegawai BRIN. Adapun luas tanah yang dialihkan kepada Kementerian PANRB adalah seluas 4.730 m².

Peralatan dan

Mesin

Rp179.998.618.808

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp179.998.618.808 dan Rp172.047.674.829.

Rincian Peralatan dan Mesin disajikan sebagai berikut:

Tabel 100: Perbandingan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
132111	Peralatan dan Mesin	179.998.618.808	172.047.674.829	4,62
Jumlah		179.998.618.808	172.047.674.829	4,62

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin disajikan sebagai berikut:

Tabel 101: Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	
-Saldo awal Peralatan dan Mesin	172.047.674.829
Mutasi Tambah	20.251.683.422
- Pembelian Modal Peralatan dan Mesin	19.063.435.938
- Hibah Masuk	104.916.400
- Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	515.769.200
- Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	331.466.004
- Perolehan lainnya	236.095.880
Mutasi Kurang	(12.300.739.443)
- Koreksi pencatatan (jumlah)	2.331.000
- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	130.103.905
- Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	10.742.667.943
- Transfer Keluar	1.425.636.595
Saldo per 31 Desember 2025	179.998.618.808
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin s.d 31 Desember 2025	(128.681.085.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	51.317.533.308

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pembelian Modal Peralatan dan Mesin

Pembelian sebesar Rp19.063.435.938 terdiri dari Pembelian Aset Peralatan dan Mesin dengan uraian Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, dan Komputer.

b. Hibah Masuk

Hibah Masuk sebesar Rp104.916.400 berupa Hibah Peralatan dan Mesin berupa alat olahraga dari PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Alat Olahraga Nomor: B.12-INS/HEI/05/2025, Nomor: 06/BN.00/2025 tanggal 2 Mei 2025.

c. Pengembangan Nilai Aset (Langsung)

Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp331.466.004,00 terdiri dari pengembangan rak server, server dan router.

d. Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif

Pada periode 14 terdapat koreksi BPK atas Aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah yang masih dalam kondisi baik dan masih digunakan sehingga diusulkan untuk diaktifkan kembali menambah saldo Peralatan dan Mesin senilai Rp515.769.200. Aset tersebut adalah papan gambar dan *notebook* masing-masing berjumlah 1 (satu) buah.

e. Perolehan lainnya

Hibah 3 (tiga) unit apartemen dari Instansi Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan pemeriksaan BPK ditemukan perabotan berupa furniture dan alat rumah tangga yang bernilai material. Atas pemeriksaan tersebut dilakukan koreksi pengurangan nilai Gedung dan Bangunan dari hibah unit apartemen kemudian nilainya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin senilai Rp236.095.880. Peralatan dan mesin tersebut berupa mesin cuci, alat dapur, kasur spring bed, oven listrik dan lemari es.

Mutasi keluar terhadap Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Koreksi Pencatatan dan Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

Koreksi Pencatatan atas aset Harddisk senilai Rp2.331.000 yang kelebihan catat jumlah. Koreksi pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp98.160.143 terdiri dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Peralatan dan Mesin dengan uraian Alat Kantor & Rumah Tangga, berupa Lemari Kayu, Gordyn/Kray, dan Backdrop TV/Wardrobe. Koreksi ini merupakan tindak lanjut dari temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2024 oleh BPK, bahwa ditemukan kekurangan volume atas sejumlah pengadaan. Koreksi pencatatan nilai berkurang lainnya adalah atas temuan pemeriksaan BPK TA 2025 untuk pengerjaan renovasi toilet Wanita dan Sound system yang berjumlah Rp79.169.644.

b. Penghentian Aset Dari Penggunaan

Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp10.742.667.943 berupa Laptop, Sedan, Telephone, Sound System dan Furniture yang sudah habis masa manfaat dan habis nilai bukunya dengan total 2.112 barang peralatan dan mesin.

c. Transfer Keluar

Transfer keluar senilai Rp1.425.636.595 adalah aset yang dikeluarkan pada bulan Oktober yang ditujukan ke Kementerian Koperasi. Transfer keluar tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 97/BN.05/2025 nomor 67/BAST/SM.5.KOP/BN.00.2025 tanggal 22 September 2025.

Terdapat satu Unit Peralatan Mesin Local Area Network (LAN) belum dapat diidentifikasi. LAN tersebut tercatat sebagai BMN dengan NUP 1 yang memiliki nilai perolehan Rp3.568.105.200 dan tahun perolehan 2006. Atas BMN berupa

LAN ini merupakan pengadaan perangkat dan jaringan internet yang dilakukan untuk kantor Kementerian PANRB secara menyeluruh.

Untuk selanjutnya, tim BMN akan melakukan tindak lanjut berupa melakukan penelusuran dan identifikasi fisik secara menyeluruh atas aset dimaksud, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelusuran Barang Milik Negara dan

berkoordinasi serta menyampaikan surat kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memperoleh arahan dan kejelasan mekanisme penyelesaian atas BMN yang tidak dapat diidentifikasi keberadaannya, termasuk langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan apabila aset dimaksud tidak ditemukan.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp109.802.758.304*

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian PANRB adalah masing-masing sebesar Rp109.802.758.304 dan Rp91.915.184.122.

Rincian Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut:

Tabel 102: Perbandingan Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
133111	Gedung dan Bangunan	109.802.758.304	91.907.826.122	19,47
Jumlah		109.802.758.304	91.907.826.122	19,47

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut:

Tabel 103: Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	91.907.826.122
Mutasi tambah:	
- Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	197.427.253
- Transfer Masuk	16.109.201.000
- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	247.232.375
- Pengembangan Nilai Aset Langsung	1.905.099.269
Mutasi kurang:	
- Koreksi Pencatatan	(197.427.253)
- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(366.600.462)
Saldo per 31 Desember 2025	109.802.758.304
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(19.830.647.707)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	89.972.110.597

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Belanja sebesar Rp197.427.253 terdiri dari Pembelian Aset Gedung dan Bangunan, merupakan pekerjaan renovasi ruang kerja kantor Gedung Pekayon. Namun atas transaksi ini menimbulkan NUP baru seolah-olah menjadi Gedung baru, sehingga transaksi ini dikoreksi pencatatan nilai berkurang untuk menghapus pembentukan Gedung baru.

b. Transfer Masuk

Transfer Masuk Rp16.109.210.000 terdiri dari Transfer Masuk Aset Gedung dan Bangunan berupa 3 (tiga) unit Apartemen dari Kejaksaan Agung berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Rampasan Nomor: B-1/BPA.3/BPApa.1/01/2025 tanggal 13 Januari 2025. Apartemen yang diserahkan adalah apartemen South hills yang beralamat di Jalan Denpasar Raya No.Kav. 5-7, RT016/RW004, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan unit 30J, 32NM dan 42A.

c. Pengembangan Nilai Aset Langsung

Pengembangan Nilai Aset Langsung senilai Rp1.905.099.269,00 terdiri 9 transaksi untuk pengembangan bangunan gedung kantor permanen.

d. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah

Koreksi pencatatan nilai bertambah senilai Rp247.232.375 terdiri atas transaksi pembangunan gedung senilai Rp197.427.253 dan kapitalisasi atas belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang menyebabkan bertambahnya volume pagar di Gedung Arsip Pekayon sesuai dengan

pemeriksaan dari Inspektorat Kementerian PANRB senilai Rp49.805.122.

Mutasi keluar terhadap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp366.600.462 berupa koreksi atas kekurangan volume pengadaan, hal ini merupakan tindak lanjut temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2023 oleh BPK senilai Rp88.278.700 dan koreksi periode 14 BPK TA 2025 senilai Rp42.225.882 serta pencatatan Aset Peralatan dan Mesin atas Aset Apartemen senilai Rp236.095.880.

b. Koreksi Pencatatan

Koreksi pencatatan senilai Rp197.427.253 digunakan untuk menghapus aset Gedung dan bangunan yang terbentuk dari transaksi penambahan gedung baru.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian PANRB adalah masing-masing sebesar Rp1.598.328.550 dan Rp1.598.328.550.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tabel 104: Perbandingan Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
134111	Jalan dan Jembatan	126.829.000	126.829.000	-
134112	Irigasi	76.283.000	76.283.000	-
134113	Jaringan	1.395.216.550	1.395.216.550	-
Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.598.328.550	1.598.328.550	-

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang pada Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2025.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp1.357.465.299

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian PANRB adalah masing-masing sebesar Rp1.357.465.299 dan Rp1.387.389.549,00.

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Tabel 105: Perbandingan Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan (%)
135121	Aset Tetap Lainnya	1.357.465.299	1.387.389.549	(2,16)
135111	Aset Tetap Renovasi	-	-	
Jumlah		1.357.465.299	1.387.389.549	(2,16)

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 106: Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

(dalam rupiah)

Saldo Awal Perolehan per 31 Desember 2024	1.387.389.549
Mutasi tambah:	5.048.733.231
- Pembelian Aset Tetap Renovasi	4.920.547.281
- Pembelian Aset Tetap Lainnya	39.987.750
- Hibah Masuk	88.198.200
Mutasi kurang:	(5.078.657.481)
- Rekalsifikasi Keluar Aset Tetap Lainnya	(69.912.000)
- Transfer Keluar	(4.920.547.281)
- Koreksi Pencatatan (BMN)	(88.198.200)
Saldo per 31 Desember 2025	1.357.465.299
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(25.796.313)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.331.668.986

Penjelasan atas mutasi tambah:

- Pembelian Aset Tetap Renovasi senilai Rp4.920.547.281 adalah pekerjaan renovasi pada tahun 2025 sebanyak 22 pekerjaan renovasi.
- Pembelian Aset Tetap Lainnya senilai Rp39.987.750 adalah pembelian monografi sebanyak 2 kali pembelian.

- c. Hibah masuk senilai Rp88.198.200 adalah hibah pengembangan aplikasi dari Perum Peruri yang kemudian dilakukan koreksi pencatatan BMN.

Penjelasan atas mutasi kurang disebabkan diantaranya:

- a. Reklasifikasi keluar Aset Tetap Lainnya ke Aset Tak Berwujud-Buku Digital senilai Rp69.912.000 atas aset monografi sebanyak 24 buah.
- b. Transfer keluar atas Pekerjaan Aset Tetap Renovasi ke Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia senilai Rp4.920.547.281.
- c. Koreksi Pencatatan atas Hibah pengembangan aplikasi Perum Peruri senilai Rp88.198.200.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(149.609.336.751)

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2024 pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember adalah masing-masing Rp(149.609.336.751) dan Rp(141.536.489.542).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Dalam tabel berikut disajikan rincian perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Tabel 107: Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan (%)
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	128.696.855.326	123.681.085.500	4,06
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.830.647.707	16.818.033.179	17,91
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	126.829.000	126.829.000	-
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	22.087.365	19.875.299	11,13
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	907.121.040	872.240.626	4,00
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	25.796.313	18.425.938	40,00
Jumlah		149.609.336.751	141.536.489.542	5,70

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan sebagai berikut:

Tabel 108: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2025				
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan			Nilai Buku
			Saldo Awal	Beban Penyusutan	Total	
1	Tanah	60.334.049.494	0	0	0	60.334.049.494
2	Peralatan dan Mesin	179.998.618.808	(123.681.085.500)	5.015.769.826	(128.696.855.326)	51.301.763.482
3	Gedung dan Bangunan	109.802.758.304	(16.818.033.179)	3.012.614.528	(19.830.647.707)	89.972.110.597
4	Jalan dan Jembatan	126.829.000	(126.829.000)	0	(126.829.000)	0
5	Irigasi	76.283.000	(19.875.299)	2.212.066	(22.087.365)	54.195.635
6	Jaringan	1.395.216.550	(872.240.626)	34.880.414	(907.121.040)	488.095.510
7	Aset Tetap Lainnya	1.357.465.299	(18.425.938)	7.370.375	(25.796.313)	1.331.668.986
Jumlah		353.091.220.455	(141.536.489.542)	8.072.847.209	(149.609.336.751)	203.481.883.704

Akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan 5,7% jika dibandingkan periode laporan 31 Desember 2024 dengan mutase sebagai berikut:

Tabel 109: Mutasi Tambah dan Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025

(dalam rupiah)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	141.536.489.542
Mutasi tambah:	20.146.953.393
- Penyusutan Aset Tetap	19.417.954.176
- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	17.659.456
- Pembelian	3.662.500
- Penggunaan kembali BMN yang sudah henti guna	499.366.075
- Transfer Masuk	161.092.010
- Perolehan Lainnya	47.219.176
Mutasi kurang:	12.074.106.184
- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	41.460.170
- Transfer Keluar	1.413.145.882
- Penghentian Aset dari penggunaan	10.615.260.211
- Koreksi Pencatatan (BMN)	4.239.921
Saldo per 31 Desember 2025	149.609.336.751

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang Rp0

C.3 PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kementerian PANRB seluruhnya merupakan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Rincian perbandingan Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 110: Rincian Piutang Jangka Panjang pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	Naik (Turun) %
Piutang Jangka Panjang				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	763.958.056	764.867.146	(909.090)	(0,12)
Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(763.958.056)	(764.867.146)	909.090	(0,12)
Jumlah Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0,00

Nilai Piutang Jangka Panjang (Netto) per 31 Desember 2025 mengalami perubahan nilai bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Pada Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pendekatan Kembali kepada debitur untuk melunasi utangnya kepada negara dengan menawarkan *Crash Program* berdasarkan PMK 30 Tahun 2024 mengenai Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024.

Tanggal 7 November 2024 mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dengan S-3114/KNL.0704/2024 dan diberikan jangka waktu sampai 7 Desember 2024. Untuk debitur agar melunasi hutangnya dengan keringanan, akan tetapi sampai tengat waktu tersebut debitur tidak mampu melunasi-nya dan hanya mampu melakukan cicilan ringan.

C.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi
Rp763.958.056

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp763.958.056 dan Rp764.867.146.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari suatu

proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai negeri non bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Jumlah Piutang TP/TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara/Pegawai Negeri bukan bendahara yang bersangkutan ke kas negara.

Rincian perbandingan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 111 Rincian Perbandingan Piutang Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/Turun %
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	763.958.056	764.867.146	(0,12)
	Jumlah	763.958.056	764.867.146	(0,12)

Kronologis dan tahapan penyelesaian TP a.n Saudara Y.S dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sesuai LK Kementerian PANRB TA 2015 (*Audited*), kerugian Negara dari sisa belanja tunjangan kinerja yang tidak disetorkan oleh Sdr. Y.S ke Kas Negara sebesar Rp853.876.643 dicatat sebagai Aset lain-lain karena masih dalam proses penyelesaian TP/TGR dan mengurangi beban pegawai di Laporan Operasional Tahun 2015 (*Audited*).
2. Penerbitan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) tanggal 7 Juni 2016 yang ditandatangani Sdr. Y.S sebesar Rp853.876.643 dan yang bersangkutan telah menyanggupi akan segera mengembalikan ke Kas Negara dalam waktu 40 (empat puluh) hari kerja. Atas dasar SKTJM dimaksud, Kementerian PANRB melakukan reklasifikasi Aset lain-lain menjadi Piutang TP sebesar Rp853.876.643. Sampai dengan 31 Desember 2016, Sdr. Y.S telah membayar piutang TP tersebut sebesar Rp14.619.814 sehingga piutang TP pada LK TA 2016 (*Audited*) tersaji sebesar Rp839.256.829 dan keseluruhannya disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TP.

3. BPK RI Menyampaikan Surat Keputusan Pembebanan kepada Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor Surat 28/S/MTP/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 hal Penyampaian Surat Keputusan Pembebanan.
4. Kementerian PANRB telah menyampaikan 3 (tiga) kali surat penagihan di TA 2018 kepada Sdr. Y.S terkait pelunasan kerugian negara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Tagihan pertama Nomor 74/KU/99/2017 tanggal 4 Mei 2017 hal Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Bendahara Gaji;
 - b. Surat Tagihan kedua Nomor 7/S.KU.02.02/2017 tanggal 11 September 2017 hai Surat Tagihan Kedua Pelunasan Kerugian Negara Bendahara Gaji; dan
 - c. Surat Tagihan ketiga Nomor B/15/S.KU.02.02/2017 tanggal 7 September 2017 hal Surat Tagihan Ketiga Pelunasan Kerugian Negara Bendahara Gaji.
5. Pelunasan piutang TP oleh Sdr. Y.S di TA 2018 adalah sebesar Rp22.183.363 sehingga saldo piutang TP yang tersaji pada LK TA 2018 (*Audited*) adalah sebesar Rp817.073.466. Piutang TP sebesar Rp817.073.466 dimaksud dikategorikan sebagai piutang macet karena dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga (7 September 2018) tidak dilakukan pelunasan, hal ini telah sesuai dengan PMK Nomor 69/PMK,06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
6. Kementerian PANRB telah menyampaikan Surat Pengajuan Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Kepada KPKNL Jakarta IV up. Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta dengan Surat Nomor B/I 09/KU.02.00/2018 tanggal 11 Desember 2018 hal Pengajuan Penyerahan Pengurusan Piutang Negara.
7. Kementerian PANRB, pada tanggal 26 Juni 2018 telah menerima surat dari Panitia Urusan Piutang Negara cabang DKI Jakarta dengan nomor surat SP3N-3200/PUPNC.10.04/2018, hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara sehingga selanjutnya KPKNL yang akan mengurus piutang TP atas Sdr. Y.S, tidak lagi penagihannya oleh Kementerian pemilik piutang (Kementerian PANRB). Sesuai surat tersebut, nilai piutang TP yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN KPKNL Jakarta IV adalah sebesar Rp805.643.141.

8. Pelunasan piutang TP oleh Sdr. Y.S per 30 September 2024 adalah sebesar Rp90.909 sehingga saldo piutang TP yang tersaji pada LK per 30 September 2024 adalah sebesar Rp783.048,964. Piutang TP sebesar Rp763.958.056 dimaksud dikategorikan sebagai piutang macet karena pengurusan piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, hal ini telah sesuai dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
9. Sdr. Y.S telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. PMK Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023, dan diterimanya Surat Dirjen Kekayaan Negara DKI Jakarta, KPKNL Jakarta IV yang secara ringkas menyatakan bahwa Pemerintah memberikan kesempatan kepada para Penanggung Utang Instansi Pemerintah untuk menyelesaikan utangnya melalui mekanisme *Crash Program* Keringanan Utang Tahun 2023.
11. Telah dikomunikasikan dan ditindaklanjuti kepada saudara Y.S. akan *Crash Program* tersebut, sampai dengan 31 Desember 2024 saudara Y.S. bersaksi dan berusaha untuk mengikuti *Crash Program* dan akan melunasi piutangnya.
12. Telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Jakarta IV untuk menindaklanjuti saudara YS, dan dilaksanakan komunikasi kembali untuk melunasi piutangnya di TA 2024.
13. Pada Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pendekatan Kembali kepada debitur untuk melunasi utangnya kepada negara dengan menawarkan *Crash Program* berdasarkan PMK 30 Tahun 2024 mengenai Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024.

14. Tanggal 7 November 2024 mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dengan S-3114/KNL.0704/2024 dan diberikan jangka waktu sampai 7 Desember 2024. Untuk debitur agar melunasi hutangnya dengan keringanan, akan tetapi sampai tengat waktu tersebut debitur tidak mampu melunasi-nya dan hanya mampu melakukan cicilan ringan.
15. Debitur (Y.S) Melakukan pembayaran sebesar Rp20.000.000 (Sebelum pajak Biad PPN 10% (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara)) dengan NTPN No. 2CABB3CIFKS4RSG4 dan NTB No. 923713348601 tanggal 10-12-2024.
16. Debitur (Y.S) Melakukan pembayaran sebesar Rp1.000.000 (Sebelum PPN 10% (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara)) dengan NTPN No. 82F4D0NA0DH0RT3E dan NTB No. 976672018482 tanggal 11-02-2025 sehingga nilai netto setoran adalah Rp909.090.
17. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Mengeluarkan Surat Berita Acara Penyitaan Nomor. BA-3/KNL.0802/2025 tanggal 20 Bulan Mei 2025, untuk melaksanakan penyitaan terhadap barang jaminan hutang dan/atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang atas nama saudara Y.S.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp763.958.056*

C.3.2 Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp763.958.056 dan Rp764.867.146.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih atau estimasi ketidaktertagihan piutang sebesar persentase tertentu dari akun piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Rincian perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel: 112 Rincian Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/Turun %
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	763.958.056	764.867.146	(0,12)
Jumlah		763.958.056	764.867.146	(0,12)

Adapun perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Tagihan TP/TGR berdasarkan kualitas dan persentase penyisihannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 113: Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	763.958.056	100%	763.958.056
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	763.958.056		763.958.056

Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tu
ntutan Ganti Rugi
(Netto) Rp0

C.3.3 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Sehubungan dengan temuan tim TPKN atas tuntutan ganti rugi kepada Sdr. ADSR senilai Rp6.491.000 yang dicatat pada bulan Agustus 2025 telah dilakukan pelunasan atas tuntutan Ganti rugi tersebut sesuai dengan nomor kode billing setoran 820250902237053 dan NTPN CCF193CIFTSV3M3RT tanggal 2 September 2025.

Aset Lainnya
Rp30.608.521.918

C.4 ASET LAINNYA

Nilai Aset Lainnya pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp30.608.521.918 dan Rp29.942.877.627, turun sebesar Rp665.644.291 atau 2,22% dibandingkan 31 Desember 2024.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Rincian Aset Lainnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 114: Rincian Aset Lainnya pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	Naik (Turun) %
	Aset Lainnya				
162151	Software	33.233.206.529	44.588.571.620	(11.355.365.091)	-25,47%
162191	Aset Tak Berwujud	143.608.700	73.696.700	69.912.000	94,86%
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	16.047.426.045	-	16.047.426.045	0,00%
163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lemabga	3.893.353.386	3.488.838.700	404.514.686	11,59%
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	406.217.620	3.099.211.150	(2.692.993.530)	-86,89%
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	2.307.424.560	1.876.857.060	430.567.500	22,94%
1693XX	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(25.422.714.922)	(23.184.297.603)	(2.238.417.319)	9,65%
Jumlah Aset Lancar		30.608.521.918	29.942.877.627	665.644.291	2,22%

Aset Tak Berwujud
Rp33.376.815.229

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp33.376.815.229 dan Rp44.662.268.320.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian perbandingan Aset Tak Berwujud disajikan sebagai berikut:

Tabel 115: Perbandingan ATB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/Turun (%)
162151	Software	33.233.206.529	44.588.571.620	(25,47)
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	143.608.700	73.696.700	94,86
Jumlah		33.376.815.229	44.662.268.320	(25,27)

Mutasi terhadap Aset Tak Berwujud pada periode pelaporan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 116: Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	44.662.268.320
Mutasi Tambah:	2.201.488.322
- Pembelian ATB (<i>Software</i>)	1.994.115.212
- Reklasifikasi Masuk ATB Lainnya	69.912.000
- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	88.198.200
- Pengembangan Nilai Aset Langsung	49.262.910
Mutasi Kurang:	13.486.941.413
- Koreksi Pencatatan	12.971.470.413
- Transfer Keluar	81.950.000
- Penghentian Aset dari penggunaan	430.567.500
- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	2.953.500
Saldo per 31 Desember 2025	33.376.815.229
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(22.725.264.815)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	10.651.550.414

Penjelasan terkait mutasi tambah dan mutasi kurang adalah sebagai berikut:

a. Mutasi Tambah

- i. Pembelian adalah realisasi Belanja Modal ATB selama tahun 2025. Terdiri dari atas 2 *Software* senilai Rp11.999.999 dan Rp1.982.115.213.
- ii. Penambahan aset dari koreksi pencatatan nilai bertambah senilai Rp88.198.220 adalah hibah atas pengembangan *software* MPP Digital Yanlik dari Bank Mandiri Taspen sesuai BAST Nomor:BAST.CMC/001/I/2025 tanggal 20 Januari 2025.
- iii. Pengembangan Nilai Aset Langsung senilai Rp49.262.910 adalah pengembangan dari aplikasi SIPPN Yanlik dengan dokumen kontrak nomor SPK:1517/PPK.I/D.IV/PANRB/10/2025 tanggal 13 Oktober 2025 sebagaimana *invoice* nomor: 146/DDI/INV/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025.
- iv. Mutasi reklasifikasi masuk atas Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp69.912.000 adalah aset monografi sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait penelusuran *e-Book* Perpustakaan berdasarkan BAST penelusuran atas monografi pada 8 Agustus 2025

b. Mutasi Kurang

- i. Mutasi Kurang dari transfer keluar sebesar Rp81.950.000 merupakan Transfer Keluar berupa *Software Aplikasi SIPINTER* ke BKN

berdasarkan BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Nomor: 55/S.BN.05/2025 dan Nomor: 9/PL.03.06/BA/A/2025.

- ii. Koreksi pencatatan nilai berkurang sebesar Rp2.953.500 dari pengembalian belanja atas pengembangan aplikasi SIPP dengan 2 bukti setor nomor bukti NTPN 3CAE33CIFTNSAUOL dan 335FF3CIFTNSATP6 tanggal 30 Juli 2025.
- iii. Terdapat 14 Software yang diubah status menjadi henti guna karena sudah tidak digunakan lagi senilai Rp430.567.500.
- iv. Koreksi Pencatatan senilai Rp12.971.470.413 adalah pemindahan klasifikasi dari Software menjadi Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan didukung dengan bukti *MoU* dengan Perum Peruri bahwa aplikasi tersebut akan dikembangkan dan siap digunakan pada tahun 2028.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Rincian Aset Tak Berwujud disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Aset tak Berwujud
Dalam Pengerjaan
Rp16.047.426.045*

C.4.2 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 senilai Rp16.047.426.045 sedangkan per 31 Desember 2024 adalah Rp0.

ATB dalam Pengerjaan merupakan *software* computer milik unit kerja Deputi SDM dan Aparatur berupa *platform* digital Manajemen ASN. ATB ini merupakan Kerjasama antara Kementerian PANRB dengan PT. Peruri. Pelaksanaan pekerjaan AT ini dilakukan secara bertahap sehingga saat ini dicatat sebagai ATB dalam pengerjaan. Pembayaran ATB dalam pengerjaan terdiri dari kuitansi nomor 008-A/SPBE/SPD/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 senilai Rp1.549.948.500 yang merupakan pembayaran atas pembayaran termin I tahap 2 dan nomor 014/SPBE/SPD/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp1.526.007.132. Sedangkan untuk pengakuan atas belanja pada termin I tahap 1 dan termin II tahap 2 diakui sebagai *software* dan telah dilakukan reklasifikasi senilai Rp12.971.470.413 menjadi ATB dalam pengerjaan.

Tabel 117: Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah:	16.047.426.045
- Perolehan ATB dalam pengerjaan	1.526.007.132
- Penambahan ATB dalam pengerjaan	1.549.948.500
- Koreksi Nilai KDP Bertambah	12.971.470.413
Saldo per 31 Desember 2025	16.047.426.045

Dana yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp3.893.353.386

C.4.3 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.893.353.386 dan Rp3.488.838.700. Rincian perbandingan Dana yang Dibatasi Penggunaannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 118: Rincian Perbandingan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/Turun (%)
163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	3.893.353.386	3.488.838.700	11,59
Jumlah		3.893.353.386	3.488.838.700	11,59

Terdapat kenaikan sebesar 11,59% dikarenakan peningkatan belanja yang memanfaatkan mekanisme RPATA dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 119: Mutasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya TA 2025

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	3.488.838.700
Mutasi Tambah:	
- Penerbitan SPM Penampungan RPATA TA 2025	3.893.353.386
Mutasi Kurang:	
- Penerbitan SP2D RPATA TA 2024	3.488.838.700
Saldo per 31 Desember 2025	3.893.353.386

Pencatatan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya mencerminkan pengeluaran belanja yang belum diterima pekerjaannya sampai dengan 31 Desember 2025, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran.

Satuan Kerja PANRB menggunakan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk membayarkan tagihan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan ke KPPN.

Rincian mutasi tambah SPM Penampungan RPATA TA 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 120: Rincian Transaksi RPATA 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Akun	No Kontrak	Uraian Belanja	Nominal
522119	323/PPK-BUK.I/PANRB/02/2025	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	21.800.000
522119	004/PPK-BUK.I/PANRB/01/2025	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	20.000.000
522119	001/PPK-BUK.I/PANRB/01/2025	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	249.782.000
522119	325/PPK-BUK.I/PANRB/02/2025	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	30.500.000
521111	1570/PPK-BUK.I/PANRB/12/2025	Belanja Keperluan Perkantoran	929.628.330
536121	585/PPK-SDMA/PANRB/09/2025	Belanja Penambahan Aset Tetap Lainnya	1.549.948.500
522141	003/PPK-BUK.I/PANRB/01/2025	Belanja Sewa	16.455.000
532111	1610/PPK-BUK.I/PANRB/12/2025	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	948.239.561
522141	EP-01KB4MHE6C35ZC7MWW2Q3ERC8B	Belanja Sewa	126.999.995
Jumlah			3.893.353.386

Aset Lain-lain
Rp2.713.642.180

C.4.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.713.642.180 dan Rp4.976.068.210.

Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian PANRB serta dalam proses penghapusan dari BMN .

Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 121: Rincian Aset Lain-Lain 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/Turun (%)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	406.217.620	3.099.211.150	(86,89)
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	2.307.424.560	1.876.857.060	22,94
Jumlah		2.713.642.180	4.976.068.210	(45,47)

Mutasi nilai Aset Lain-lain disajikan sebagai berikut:

Tabel 122: Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2025

(dalam rupiah)

Saldo Awal Perolehan per 31 Desember 2024	4.976.068.210
Mutasi tambah:	
-Pencatatan pembatalan barang yang mau dihapuskan	578.924.320
-Penghentian Aset dari Penggunaan	11.173.235.443
Mutasi kurang:	
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan	515.769.200
- Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	13.498.816.593
Saldo per 31 Desember 2025	2.713.642.180
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(2.697.450.107)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	16.192.073

Penjelasan mutasi nilai Aset lain-lain pada tahun 2025 diantaranya:

- Pencatatan barang yang mau dihapuskan senilai Rp578.924.320 berupa Peralatan dan Mesin seperti alat elektronik kantor dan perabotan rumah tangga.
- Penghentian Aset dari penggunaan terdiri dari Penghentian 14 ATB senilai Rp430.567.500 dan Peralatan dan Mesin senilai Rp10.742.667.943 berupa Laptop, PC unit, Sedan dan lain-lain.
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan adalah Aset Yang Sudah Usul Hapus Namun Tidak Masuk Dokumen Manapun, sehingga dilakukan batal usul hapus dan ubah kondisi menjadi baik, karena masih digunakan dalam kondisi baik. Aset tersebut berupa papan gambar dan note book.
- Pencatatan Barang yang mau dihapuskan senilai Rp13.498.816.593 terdiri dari 2.165 item barang peralatan dan mesin.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(25.422.714.922)

C.4.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Kementerian PANRB adalah masing-masing sebesar Rp(25.422.714.922) dan Rp(23.184.297.603).

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 123: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Akun	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
1	Software	44.506.621.620	(22.725.264.815)	21.781.356.805
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	73.696.700	0	73.696.700
3	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan - Lisensi	406.217.620	(405.022.620)	1.195.000
4	ATB yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan - Lisensi	2.307.424.560	(2.292.427.487)	14.997.073
Jumlah		47.293.960.500	(25.422.714.922)	21.871.245.578

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp4.074.290.073

C.5 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Nilai Kewajiban Jangka Pendek pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.074.290.073 dan Rp3.802.023.480, naik sebesar Rp272.266.593 atau 7,16% dibandingkan 31 Desember 2024.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek disajikan sebagai berikut:

Tabel 124: Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	Naik/ (Turun) %
	Kewajiban Jangka Pendek				
2121	Utang Kepada Pihak Ketiga	4.074.290.073	3.802.023.480	272.266.593	7,16
	Jumlah Aset Lancar	4.074.290.073	3.802.023.480	272.266.593	7,16

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp4.074.290.073

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp4.074.290.073 dan Rp3.802.023.480.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut:

Tabel 125: Utang Kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	Naik/ (Turun) %
212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	68.531.000	40.730.000	27.801.000	68,26
212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	247.902.455	272.454.780	(24.552.325)	(9,01)
212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	3.757.856.618	3.488.838.700	269.017.918	7,71
	Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga	4.074.290.073	3.802.023.480	272.266.593	7,16

1. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

Saldo senilai Rp68.531.000 terdiri dari Uang Makan PNS sebesar Rp50.861.000 dan Uang Makan PPPK sebesar Rp17.670.000. Atas transaksi ini akan dibayarkan pada bulan Januari 2026.

2. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

Saldo senilai Rp247.902.455 adalah tagihan langganan Listrik dan Telepon pada bulan Desember untuk Gedung Sudirman, Cipinang dan Pekayon. Tagihan Listrik senilai Rp243.458.486 sesuai dengan tagihan no AGA/PUSAT/2026/427950 dari PLN untuk 6 meteran listrik dan tagihan telepon senilai Rp4.443.969 sesuai dengan tagihan no 0420260105004279500001 dari Telkom.

3. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya adalah Transaksi RPATA yang sudah dilakukan serah terima di 31 Desember 2025 dan akan dibayarkan pada Januari 2026. Atas kontrak No 1570/PPK-BUK.I/PANRB/12/2025 dengan nilai Rp929.628.330 pada 31 Desember 2025 prestasi fisik yang diserahkan adalah sebesar 88% sehingga 12% dari nilai kontrak harus dikurangi dari nilai Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya senilai Rp111.555.400 melalui Jurnal Manual dengan Memo 31/KU.04.06/2026. Daftar Kontrak transaksi RPATA sesuai dengan tabel berikut:

*Tabel.126: Daftar Kontrak Transaksi RPATA yang BAST 31 Desember 2025
(dalam rupiah)*

No Kontrak	Uraian Belanja	Nominal
323/PPK-BUK.I/PANRB/02/2025	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	21.800.000
004/PPK-BUK.I/PANRB/01/2025	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	20.000.000
001/PPK-BUK.I/PANRB/01/2025	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	249.782.000
325/PPK-BUK.I/PANRB/02/2025	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	30.500.000
1570/PPK-BUK.I/PANRB/12/2025	Belanja Keperluan Perkantoran	818.072.930
585/PPK-SDMA/PANRB/09/2025	Belanja Penambahan Aset Tetap Lainnya	1.526.007.132
003/PPK-BUK.I/PANRB/01/2025	Belanja Sewa	16.455.000
1610/PPK-BUK.I/PANRB/12/2025	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	948.239.561
EP-01KB4MHE6C35ZC7MWW2 Q3ERC8B	Belanja Sewa	126.999.995
Jumlah		3.757.856.618

EKUITAS

Ekuitas

Rp231.042.735.091

C.6 Ekuitas

Ekuitas pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp232.064.946.448 dan Rp214.047.512.471. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 127: Rincian perbandingan Ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/Turun (%)
3911111	Ekuitas	232.064.946.448	214.047.512.471	8,4%
Jumlah		232.064.946.448	214.047.512.471	8,4%

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 8,4% bila dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2024. Rincian penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas per 31 Desember 2025 disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan bagian Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional. Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/ Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 disandingkan dengan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Kegiatan Operasional

Pendapatan
Operasional
Rp767.010

Pendapatan Operasional

Jumlah Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp767.010 dan Rp0. Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diterima dari pelaksanaan kegiatan operasional entitas. Pendapatan operasional pada Kementerian PANRB seluruhnya merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga tidak terdapat pendapatan dari sumber lain yakni pendapatan perpajakan maupun pendapatan hibah.

Rincian perbandingan Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 128: Rincian Perbandingan Pendapatan Operasional
Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/ (Turun)%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	767.010	0	-
Jumlah Pendapatan Operasional	767.010	0	-

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Operasional untuk periode Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar -% bila dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2025 terdapat lebih banyak Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya yang berasal dari pengembalian belanja barang Tahun anggaran yang lalu baru dikembalikan pada tahun berjalan.

Adapun rincian perbandingan Pendapatan Operasional berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 129 : Rincian Perbandingan Pendapatan Operasional Berdasarkan Satuan Kerja
Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun)%
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	767.010	0	-
Jumlah Pendapatan Operasional		767.010	0	-

Analisa Kenaikan Pendapatan Operasional akan dijelaskan pada D.1

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp767.010

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak-LO adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp767.010 dan Rp0. Pendapatan PNBP pada Kementerian PANRB berasal dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 130: Rincian Perbandingan PNBP Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun)%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	767.010	-	-
Jumlah Pendapatan Operasional		767.010	0	-

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan PNBP-LO untuk periode Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar -% bila dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini dikarenakan pada TA 2024 tidak terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah yang menimbulkan pendapatan denda dan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak ketiga di Kementerian PANRB.

Adapun rincian perbandingan pendapatan PNBP berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 131 : Rincian Perbandingan Pendapatan PNBP Berdasarkan Satuan Kerja

Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun)%
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	767.010	0	-
Jumlah Pendapatan PNBP		767.010	0	-

Sedangkan rincian perbandingan pendapatan PNBP pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 132 : Rincian Perbandingan Pendapatan PNBP pada LRA dengan LO Tahun 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Pendapatan LRA	Selisih (LO-LRA)	Pendapatan LO
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	767.010	0	767.010
Jumlah		767.010	0	767.010

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan LO dan LRA.

Beban Operasional
Rp346.083.002.957

Beban Operasional

Beban operasional merupakan beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional entitas. Jumlah Beban Operasional pada Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp346.083.002.957 dan Rp459.769.306.087 yang meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Penyusutan dan Amortisasi, serta Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Rincian perbandingan Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 133: Rincian Perbandingan Beban Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/ (Turun)%
Beban Pegawai	146.555.227.345	145.347.317.028	0,83
Beban Persediaan	2.638.051.885	4.370.300.511	(39,64)
Beban Barang dan Jasa	99.608.049.963	131.983.450.323	(24,53)
Beban Pemeliharaan	14.237.311.681	13.007.938.923	9,45
Beban Perjalanan Dinas	55.813.429.135	134.985.384.602	(58,65)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	27.196.546.587	30.072.476.184	(9,56)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	34.386.361	2.438.516	1.310,13
Jumlah Beban Operasional	346.083.002.957	459.769.306.087	(24,73)

Berdasarkan tabel di atas, Beban Operasional untuk periode Tahun 2025 mengalami penurunan 24,73% bila dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini

dikarenakan pada awal tahun 2025 Presiden RI menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga agar melakukan efisiensi belanja pada pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Sebagai respons terhadap Inpres tersebut Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tentang Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Efisiensi tersebut dilaksanakan dengan mengurangi pengeluaran biaya operasional maupun biaya non prioritas, sehingga Beban Barang dan Jasa, Beban Perjalanan Dinas, Beban Pemeliharaan dan Beban Persediaan mengalami penghematan/penurunan secara drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun rincian perbandingan beban operasional berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 134 : Rincian Perbandingan Beban Operasional Berdasarkan Satuan Kerja
Tahun 2025 dan Tahun 2024*

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun)%
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	346.083.002.957	459.769.306.087	(24,73)
Jumlah Pendapatan Operasional		346.083.002.957	459.769.306.087	(24,73)

*Beban Pegawai
Rp146.555.227.345*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp146.555.227.345 dan Rp145.347.317.028. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai pada Kementerian PANRB dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai untuk PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui oleh KPA/PPK.

Rincian perbandingan Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 135: Rincian Perbandingan Beban Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/ (Turun)%
511111	Beban Gaji Pokok PNS	31.760.464.758	33.477.392.716	(5,13)
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	478.828	538.917	(11,15)
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.750.923.936	1.821.155.970	(3,86)
511122	Beban Tunj. Anak PNS	393.182.659	416.799.778	(5,67)
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1.721.665.000	1.610.455.000	6,91
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	4.064.006.000	4.184.845.000	(2,89)
511125	Beban Tunj. PPh PNS	370.299.166	385.642.231	(3,98)
511126	Beban Tunj. Beras PNS	1.400.313.120	1.487.775.200	(5,88)
511129	Beban Uang Makan PNS	4.213.705.000	3.365.836.450	25,19
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	526.149.570	590.819.200	(10,95)
511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	1.089.314.730	155.616.390	600,00
511519	Beban Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	420.000.000	359.200.000	16,93
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	4.055.394.954	3.153.302.900	28,61
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	48.371	44.433	8,86
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	215.800.130	150.646.340	43,25
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	52.778.258	30.956.720	70,49
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	496.062.000	498.014.000	(0,39)
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	215.666.760	141.436.260	52,48
511628	Beban Uang Makan PPPK	702.021.000	338.121.000	107,62
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	62.970.000	0	-
512111	Beban Uang Honor Tetap	183.750.000	6.185.613.425	(97,03)
512211	Beban Uang Lembur	709.974.000	1.138.365.000	(37,63)
512212	Beban Uang Lembur PPPK	171.801.000	183.580.000	(6,42)
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	84.173.339.399	79.451.056.936	5,94
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	7.805.118.706	6.220.103.162	25,48
Jumlah Beban Pegawai		146.555.227.345	145.347.317.028	0,83

Berdasarkan tabel di atas, Beban Pegawai untuk periode Tahun 2025 mengalami meningkat sebesar 0,83% bila dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini dikarenakan Kenaikan yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa ada komponen yang naik cukup besar, tetapi ditahan oleh beberapa komponen yang turun besar, sehingga hasil akhirnya hanya naik 0,83%.

Kenaikan TA 2025 terutama didorong oleh peningkatan pada tunjangan kinerja/kegiatan serta belanja pegawai PPPK dan Non-PNS.

Adapun rincian perbandingan beban pegawai berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 136 : Rincian Perbandingan Beban Pegawai Berdasarkan Satuan Kerja

Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun)%
015416	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	-	15.143.719.687	(100)
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	146.555.227.345	130.203.597.341	12,56
Jumlah Beban Pegawai		146.555.227.345	145.347.317.028	0,83

Sedangkan rincian perbandingan Belanja Pegawai di LRA dengan Beban Pegawai pada LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 137: Rincian Perbandingan Belanja Pegawai pada LRA dengan Beban Pegawai pada LO
TA 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Belanja LRA	Selisih(LO-LRA)	Beban LO
511111	Beban Gaji Pokok PNS	31.760.464.758	-	31.760.464.758
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	478.828	-	478.828
511121	Beban Tunj Suami/Istri PNS	1.750.923.936	-	1.750.923.936
511122	Beban Tunj Anak PNS	393.182.659	-	393.182.659
511123	Beban Tunj Struktural PNS	1.721.665.000	-	1.721.665.000
511124	Beban Tunj Fungsional PNS	4.064.006.000	-	4.064.006.000
511125	Beban Tunj PPh PNS	370.299.166	-	370.299.166
511126	Beban Tunj Beras PNS	1.400.313.120	-	1.400.313.120
511129	Beban Uang Makan PNS	4.199.133.000	14.572.000	4.213.705.000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	526.149.570	-	526.149.570
511152	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	1.089.314.730	-	1.089.314.730
511159	Beban Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	420.000.000	-	420.000.000
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	4.055.394.954	-	4.055.394.954
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	48.371	-	48.371
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	215.800.130	-	215.800.130
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	52.778.258	-	52.778.258
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	496.062.000	-	496.062.000
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	215.666.760	-	215.666.760
511628	Beban Uang Makan PPPK	688.792.000	13.229.000	702.021.000
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	62.970.000	-	62.970.000
512111	Beban Uang Honor Tetap	183.750.000	-	183.750.000
512211	Beban Uang Lembur	709.974.000	-	709.974.000
512212	Beban Uang Lembur PPPK	171.801.000	-	171.801.000
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	84.173.339.399	-	84.173.339.399
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	7.805.118.706	-	7.805.118.706
Jumlah		146.527.426.345	27.801.000	146.555.227.345

Terdapat selisih sebesar Rp27.801.000 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 138 : Rincian Selisih Belanja Pegawai pada LRA dengan Beban Pegawai pada LO
Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
a	Beban Pegawai - LO	146.555.227.345
b	Belanja Pegawai - LRA	146.527.426.345
c	Selisih Beban Pegawai - LO dengan Belanja Pegawai - LRA	27.801.000
Faktor yang Mempengaruhi		
Selisih Beban Uang Makan PNS		
	Selisih ini disebabkan karena adanya pencatatan akrual pembayaran atas belanja uang makan PNS Desember 2025 yg dibayarkan di Januari 2026	14.572.000
Selisih Beban Uang Makan PPPK		
	Selisih ini disebabkan karena adanya pencatatan akrual pembayaran atas belanja uang makan PPPK Desember 2025 yg dibayarkan di Januari 2026	13.229.000
Total Faktor yang Mempengaruhi		27.801.000

Beban Persediaan
Rp2.638.051.885

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.638.051.885 dan Rp4.370.300.511. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan pada akhir periode akuntansi.

Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Rincian perbandingan Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 139: Rincian Perbandingan Beban Persediaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/ (Turun)%
593111	Beban Persediaan Konsumsi	2.638.051.885	4.370.300.511	(39,64)
Jumlah Beban Persediaan		2.638.051.885	4.370.300.511	(39,64)

Berdasarkan tabel di atas, Beban Persediaan untuk periode Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 39,64% bila dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tentang Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 sebagai respons terhadap Inpres 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan penghematan terhadap 16 pos belanja salah satunya Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi sehingga mengakibatkan penurunan secara drastis realisasi belanja tersebut yang sejalan dengan penurunan penggunaan/pemakaian barang persediaan berupa ATK, komputer *supplies*, dan persediaan barang konsumsi lainnya dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun rincian perbandingan beban persediaan berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 140: Rincian Perbandingan Beban Persediaan Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun)%
015416	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	0	217.122.750	(100)
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	2.638.051.885	4.153.177.761	(36,48)
Jumlah Beban Persediaan		2.638.051.885	4.370.300.511	(39,64)

Sedangkan rincian perbandingan belanja barang persediaan pada LRA dengan beban Persediaan pada LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 141: Rincian Perbandingan Belanja Barang Persediaan pada LRA dengan Beban Persediaan pada LO Tahun 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Belanja LRA	Selisih (LO- LRA)	Beban LO
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.569.623.778	2.569.623.778	0
593111	Beban Persediaan Konsumsi	0	(2.638.051.885)	2.638.051.885
Jumlah		2.569.623.778	(68.428.107)	2.638.051.885

Terdapat selisih sebesar Rp68.428.107 dengan penjelasan sebagai berikut:

*Tabel 142 : Rincian Selisih Belanja Pemeliharaan pada LRA dengan Beban Pemeliharaan pada LO
Tahun 2025*

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
a	Beban Persediaan - LO	2.638.051.885
b	Belanja Barang Persediaan - LRA	2.569.623.778
c	Selisih Beban Persediaan - LO dengan Belanja Barang Persediaan - LRA	68.428.107
Faktor yang Mempengaruhi		
Selisih Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi tidak muncul pada LO, karena LO menggunakan basis akrual sedangkan LRA menggunakan basis kas	(2.569.623.778)
Selisih Beban Persediaan Konsumsi		
	Penggunaan persediaan Barang Konsumsi	2.638.051.885
Total Faktor yang Mempengaruhi		68.428.107

Terdapat akun belanja atas pembelian adaptor/pengisi daya Laptop menggunakan akun Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) yang belum diserahkan hingga akhir periode laporan keuangan sehingga menjadikan pembelian tersebut diubah menjadi pembelian Barang Konsumsi (117111) senilai Rp32.721.000. Telah dilakukan jurnal koreksi mengurangi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan pada modul persediaan telah dilakukan pengakuan persediaan atas pembelian adaptor tersebut serta telah dilakukan pengeluaran aset sejumlah Rp13.926.000 atas adaptor yang telah diserahkan. Dari tabel di atas dapat diasumsikan bahwa nilai penggunaan atau konsumsi pada persediaan lebih besar dari nilai pembelian di mana Beban lebih besar dari belanja, yang berindikasi persediaan mengalami defisit sebesar Rp68.428.107 pada Tahun 2025. Terdapat selisih antara Belanja Barang Persediaan (LRA) dengan Beban Persediaan Konsumsi (LO) sebesar Rp68.428.107. Selisih tersebut wajar karena kedua akun tersebut memiliki basis pengakuan yang berbeda.

1. Belanja Barang Persediaan (LRA) diakui pada saat terjadi pengeluaran anggaran/terbitnya dokumen pembayaran untuk perolehan persediaan pada tahun berjalan.
2. Beban Persediaan Konsumsi (LO) diakui pada saat persediaan dikonsumsi/diserahkan untuk digunakan (*issued/used*), sehingga menjadi beban periode berjalan.

Dengan demikian, belanja persediaan pada periode berjalan tidak serta-merta langsung menjadi beban, karena sebagian persediaan dapat:

1. masih tersimpan sebagai persediaan akhir di gudang/unit kerja,

2. beban konsumsi periode berjalan dapat berasal dari pemakaian persediaan saldo awal (sisa tahun sebelumnya), dan/atau
3. terdapat koreksi hasil *stock opname*/penyesuaian persediaan (misalnya selisih *opname*, rusak/kedaluwarsa, atau reklasifikasi).

Secara konsep, hubungan belanja/pengadaan persediaan dengan beban persediaan dapat digambarkan sebagai berikut:

“Beban Persediaan Konsumsi = Saldo Awal Persediaan + Perolehan

Persediaan Tahun Berjalan – Saldo Akhir Persediaan ±

Penyesuaian/Koreksi”

Selisih Rp68.428.107 pada prinsipnya mencerminkan perubahan nilai persediaan (kenaikan/penurunan) antara saldo awal dan saldo akhir (termasuk penyesuaian), sehingga tidak menunjukkan kesalahan, melainkan perbedaan waktu pengakuan antara belanja (LRA) dan beban (LO).

Beban Barang dan
Jasa
Rp99.608.049.963

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp99.608.049.963 dan Rp131.983.450.323. Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa serta beban lain-lain berupa beban aset ekstrakomptabel. Beban barang dan jasa merupakan konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Sementara beban aset ekstrakomptabel adalah beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui oleh KPA/PPK dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

Rincian perbandingan Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 143: Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa
Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/ (Turun)%
521111	Beban Keperluan Perkantoran	14.459.662.665	13.104.667.067	10,34
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	34.253.800	108.717.500	(68,49)
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	606.430.000	534.732.000	13,41
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	8.214.813.051	3.034.185.067	170,74
521211	Beban Bahan	9.213.047.519	13.138.781.674	(29,88)
521213	Beban Honor Output Kegiatan	23.500.000	128.616.000	(81,73)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.155.663.000	5.118.413.033	(77,42)
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6.483.200	78.673.420	(91,76)
522111	Beban Langganan Listrik	2.653.085.333	4.004.507.846	(33,75)
522112	Beban Langganan Telepon	53.511.323	66.702.445	(19,78)
522113	Beban Langganan Air	1.160.480	1.655.700	(29,91)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.812.684.000	3.857.895.652	(1,17)
522131	Beban Jasa Konsultan	46.855.090.448	37.556.910.595	(100)
522141	Beban Sewa	789.539.315	4.372.610.220	(81,94)
522151	Beban Jasa Profesi	4.472.870.000	11.174.177.219	(59,97)
522191	Beban Jasa Lainnya	7.256.255.829	35.702.204.885	(79,68)
Jumlah Beban Barang dan Jasa		99.608.049.963	131.983.450.323	(24,53)

Berdasarkan tabel di atas, Beban Barang dan Jasa untuk periode Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 24,53% bila dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tentang Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 sebagai respons terhadap Inpres 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan penghematan terhadap 16 pos belanja di antaranya Belanja Operasional seperti Beban Jasa Konsultan, Beban Sewa Gedung, Kendaraan dan Peralatan serta Beban Jasa Profesi. Selain itu Belanja Non Operasional seperti Beban Bahan untuk kegiatan seremonial, rapat/seminar/sejenisnya, percetakan/suvenir, Beban Barang Non Operasional Lainnya untuk Diklat/Bimtek, Beban Honor Output Kegiatan serta Beban Jasa Lainnya turut mengalami penghematan/penurunan secara drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu dampak lain dari pelaksanaan efisiensi anggaran di Kementerian PANRB yakni terbitnya Surat Edaran Sekretaris Kementerian PANRB Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pola Kerja Kedinasan di Kementerian PANRB untuk Efisiensi Anggaran Tahun 2025 melalui pelaksanaan kerja kedinasan di luar kantor atau *Flexible Working Arrangement* (FWA) bagi pegawainya setiap hari Rabu dengan memaksimalkan koordinasi melalui

pertemuan daring juga berperan besar dalam penurunan pengeluaran Beban Langganan Listrik.

Adapun rincian perbandingan beban barang dan jasa berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 144: Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Satuan Kerja
Tahun 2025 dan Tahun 2024*

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun)%
015416	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	-	9.874.292.835	(100)
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	99.608.049.963	122.109.157.488	(18,43)
Jumlah Beban Barang dan Jasa		99.608.049.963	131.983.450.323	(24,53)

Sedangkan rincian perbandingan Belanja Barang dan Jasa pada LRA dengan Beban Barang dan Jasa pada LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 145: Rincian Perbandingan Belanja Barang dan Jasa pada LRA
dengan Beban Barang dan Jasa pada LO Tahun 2025*

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Belanja LRA	Selisih (LO-LRA)	Beban LO
521111	Beban Keperluan Perkantoran	14.483.561.571	23.898.906	14.459.662.665
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	34.253.800	0	34.253.800
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	574.846.000	(31.584.000)	606.430.000
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	8.214.813.051	0	8.214.813.051
521211	Beban Bahan	9.213.047.519	0	9.213.047.519
521213	Beban Honor Output Kegiatan	55.084.000	31.584.000	23.500.000
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.053.856.637	898.193.637	1.155.663.000
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	(6.483.200)	6.483.200
522111	Beban Langganan Listrik	2.677.492.708	24.407.375	2.653.085.333
522112	Beban Langganan Telepon	53.656.273	144.950	53.511.323
522113	Beban Langganan Air	1.160.480	0	1.160.480
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.812.684.000	0	3.812.684.000
522131	Beban Jasa Konsultan	4.170.065.429	(42.685.025.019)	46.855.090.448
522141	Beban Sewa	789.539.315	0	789.539.315
522151	Beban Jasa Profesi	4.472.870.000	0	4.472.870.000
522191	Beban Jasa Lainnya	6.358.062.192	(898.193.637)	7.256.255.829
Jumlah		56.964.992.975	(42.643.056.988)	99.608.049.963

Terdapat selisih sebesar Rp42.643.056.988 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 146 : Rincian Selisih Belanja Barang dan Jasa pada LRA dengan Beban Barang dan Jasa pada LO
Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
a	Beban Pemeliharaan - LO	99.608.049.963
b	Belanja Pemeliharaan - LRA	56.964.992.975
c	Selisih Beban Pemeliharaan - LO dengan Belanja Pemeliharaan - LRA	42.643.056.988
Faktor yang Mempengaruhi		
Selisih Beban Keperluan Perkantoran (521111)		
	Koreksi Beban '- Memo 22/KU.04.06/2025 Jurnal balik Pengakuan Belanja Prepaid Rp980.460.983 '- Memo 22/KU.04.06/2026 Belanja Barang yang dibayar di muka (prepaid), Rp(648.436.430) -Beban yang terbentuk karna Revisi SP2D No. 251331302001146 dari akun 523199 ke 521111 Rp(238.800.000) -Beban yang terbentuk karna Revisi SP2D No. 259991310124080, dari akun 523199 ke 521111 Rp(3.952.044) -Jurnal Manual GLP No. 24/KU.04.06/2026 penyesuaian beban atas kesalahan penggunaan akun Belanja Pemeliharaan Lainnya (523199) dengan total nilai transaksi Rp5.519.699. Ke 521111 '- JA 7, MEMO 31/KU.04.06/2026 Rp(111.555.400) Pengurangan Beban atas Pekerjaan yang belum terlaksana di 2025 (Seragam) '- JA 4 NKF Period 14, Memo 28/KU.04.06/2026 Pengurangan Beban atas Belanja Yang Masih Harus diterima masa manfaatnya (prepaid) Rp(7.135.714)	23.898.906
Selisih Beban Honor Operasional Satuan Kerja (521115)		
	Reklasifikasi Beban dari 521115 ke 521213 Memo 23/KU.04.06/2026	(31.584.000)
Selisih Beban Honor Output Kegiatan (521213)		
	Reklasifikasi Beban dari 521115 ke 521213 Memo 23/KU.04.06/2026	31.584.000
Selisih Beban Barang Non Operasional Lainnya (521219)		
	Reklasifikasi Beban Diklat yang diselenggarakan untuk pegawai Kemenpan RB dari 521219 ke 522191	898.193.637
Selisih Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (521252)		
	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel TA 2025 yang dibawah nilai kapitalisasi aset (<1.000.000)	(6.483.200)
Selisih Beban Langganan Listrik (522111)		
	Selisih antara Utang Belanja Langganan Listrik Awal Tahun 2025 yang sudah dibayarkan dengan Pencatatan Utang Belanja Listrik Des 2025	24.407.375
Selisih Beban Langganan Telpon (522112)		
	Selisih antara Utang Belanja Langganan Telepon Awal Tahun 2025 yang sudah dibayarkan dengan Pencatatan Utang Belanja Telepon Des 2025	144.950
Selisih Beban Jasa Konsultan (522131)		
	Pendapatan Hibah langsung jasa konsultan BAST No. 242/USAID-INA/BAST-Services/DRG, BAST No. KOICA/2025/075, BAST No. 004/TBI-DIG/01/2025	(42.685.025.019)
Selisih Beban Jasa Lainnya (522191)		
	Reklasifikasi Beban Diklat yang diselenggarakan untuk pegawai Kemenpan RB dari 521219 ke 522191	(898.193.637)
Total Faktor yang Mempengaruhi		(42.643.056.988)

Penjelasan atas faktor-faktor yang mempengaruhi selisih sebesar Rp42.643.056.988 adalah sebagai berikut:

Koreksi Beban dengan Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp23.898.906 — pengeluaran yang direalisasikan pada akun Belanja Modal namun secara

substansi tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sehingga diakui sebagai beban operasional.

Reklasifikasi Honor Operasional Satker Rp(31.584.000) dan Honor Output Kegiatan Rp31.584.000 — reklasifikasi antar akun honor karena perbedaan klasifikasi belanja dan beban; secara *netto* bernilai nihil. Reklasifikasi Beban Barang Non Operasional Lainnya Rp898.193.637 dan Reklasifikasi Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan Rp(898.193.637) — reklasifikasi antar akun beban; secara *netto* bernilai nihil. Selisih Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel Rp(6.483.200) — pembelian peralatan dan mesin di bawah batas kapitalisasi yang langsung dibebankan pada periode perolehan. Selisih Beban Langganan Listrik Rp24.407.375 dan Langganan Telepon Rp144.950 — selisih antara realisasi belanja dengan beban yang diakui akibat pelunasan utang langganan akhir TA 2024 yang dibayar di TA 2025 dan pengakuan utang langganan akhir TA 2025.

Pengakuan Beban Jasa Konsultan dari Hibah Langsung sebesar Rp(42.685.025.019). Beban tersebut diakui di LO namun tidak terealisasi melalui Belanja LRA karena pembayaran dilakukan langsung oleh donor kepada penyedia jasa.

Beban
Pemeliharaan
Rp14.237.311.681

D.5 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp14.237.311.681 dan Rp13.007.938.923. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui oleh KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

Rincian perbandingan beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 147: Rincian Perbandingan Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/ (Turun)%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.872.848.080	4.243.126.006	38,41
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	228.213.251	59.739.211	282,02
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.605.240.476	6.666.422.442	(0,92)
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	436.954.594	(100,00)
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	121.562.500	61.555.000	97,49
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	906.748.004	1.256.831.735	(27,85)
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	502.699.370	283.309.935	77,44
Jumlah Beban Pemeliharaan		14.237.311.681	13.007.938.923	9,45

Berdasarkan tabel di atas, Penjelasan atas pergerakan signifikan per akun adalah sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp1.629.722.074 atau 38,41%, dari Rp4.243.126.006 menjadi Rp5.872.848.080. Kenaikan ini merupakan kontributor utama peningkatan total Beban Pemeliharaan di TA 2025. Kenaikan disebabkan oleh pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan/renovasi gedung kantor yang lebih intensif di TA 2025 dibandingkan TA 2024.

Beban Asuransi/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (akun 523113) mengalami kenaikan sebesar Rp168.474.040 atau 282,02%, dari Rp59.739.211 menjadi Rp228.213.251. Kenaikan persentase yang signifikan disebabkan oleh Secara nilai absolut, kenaikan ini relatif kecil dalam konteks total Beban Pemeliharaan.

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mengalami penurunan tipis sebesar Rp61.181.966 atau 0,92%, dari Rp6.666.422.442 menjadi Rp6.605.240.476. Penurunan ini tidak material dan mencerminkan kondisi pemeliharaan rutin yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami penurunan 100,00%, dari Rp436.954.594 di TA 2024 menjadi nihil di TA 2025. Tidak terdapat realisasi pada akun ini sepanjang TA 2025. Beban Pemeliharaan Jaringan mengalami kenaikan sebesar Rp60.007.500 atau 97,49%, dari Rp61.555.000 menjadi Rp121.562.500. Secara nilai absolut, kenaikan ini relatif kecil. Beban Pemeliharaan Lainnya (525199) mengalami penurunan sebesar Rp350.083.731 atau 27,85%, dari Rp1.256.831.735 menjadi Rp906.748.004. Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar Rp219.389.435 atau 77,44%, dari Rp283.309.935 menjadi Rp502.699.370.

Adapun rincian perbandingan beban pemeliharaan berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 148: Rincian Perbandingan Beban Pemeliharaan Berdasarkan Satuan Kerja
Tahun 2025 dan Tahun 2024*

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun)%
015416	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	-	1.769.620.543	(100)
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	14.237.311.681	11.238.318.380	26,69
Jumlah Beban Pemeliharaan		14.237.311.681	13.007.938.923	9,45

Sedangkan rincian perbandingan belanja pemeliharaan pada LRA dengan beban Pemeliharaan pada LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 149: Rincian Perbandingan Belanja Pemeliharaan pada LRA dengan Beban Pemeliharaan pada LO
Tahun 2025*

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Belanja LRA	Selisih (LO- LRA)	Beban LO
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.872.848.080	-	5.872.848.080
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	788.909.446	(788.909.446)	0
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	228.213.251	-	228.213.251
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.211.753.012	393.487.464	6.605.240.476
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	562.309.500	(440.747.000)	121.562.500
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	669.515.659	237.232.345	906.748.004
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	502.699.370	502.699.370
Jumlah		14.333.548.948	(96.237.267)	14.237.311.681

Total Belanja Pemeliharaan menurut LRA TA 2025 sebesar Rp14.333.548.948, sedangkan Beban Pemeliharaan menurut LO sebesar Rp14.237.311.681, sehingga terdapat selisih sebesar Rp96.237.267 (Beban LO lebih kecil dari Belanja LRA). Selisih tersebut bersumber dari penyesuaian akrual akhir periode atas masing-masing akun, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 150 : Rincian Selisih Belanja Pemeliharaan pada LRA dengan Beban Pemeliharaan pada LO
Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
a	Beban Pemeliharaan - LO	14.237.311.681
b	Belanja Pemeliharaan - LRA	14.333.548.948
c	Selisih Beban Pemeliharaan - LO dengan Belanja Pemeliharaan - LRA	(96.237.267)
Faktor yang Mempengaruhi		
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, tercatat Kas belum menjadi beban karna masuk persediaan (gudang)	(788.909.446)
Selisih Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
	Koreksi/reklasifikasi Beban JA No. 10 NKF Period 14, Memo 34/KU.04.06/2026 Koreksi Beban Rp440.740.000, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) Menjadi Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan (117113), SPM 04078T Rp(14.538.536), JA 1 NKF Period 14, Jurnal Eliminasi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang ternyata menghasilkan Persediaan (Adaptor/Charger) Rp(32.721.000)	393.487.464
Selisih Beban Pemeliharaan Jaringan		
	JA 10 NKF Period 14, Koreksi Beban Pemeliharaan Jaringan ke Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Memo 34/KU.04.06/2026	(440.747.000)
Selisih Beban Pemeliharaan Lainnya		
	- Beban yang terbentuk karna Revisi SP2D No. 251331302001146 dari akun 523199 ke 521111 Rp238.800.000 - Beban yang terbentuk karna Revisi SP2D No. 259991310124080, dari akun 523199 ke 521111 Rp3.952.044 - Jurnal Manual GLP No. 24/KU.04.06/2026 tertanggal 31 Desember 2025, penyesuaian beban atas kesalahan penggunaan akun Belanja Pemeliharaan Lainnya (523199) dengan total nilai transaksi Rp(5.519.699) yang digunakan untuk berlangganan aplikasi berbayar berupa Gamma, Chatgpt, OpenAI, Canva, dan Microsoft. Ke 521111	237.232.345
Selisih Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan		
	Hanya memiliki transaksi beban pada LO, pencatatan Persediaan keluar oleh modul persediaan	502.699.370
Total Faktor yang Mempengaruhi		(96.237.267)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp55.813.429.135

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp55.813.429.135 dan Rp134.985.384.602. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui oleh KPA/PPK.

Rincian perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 151: Rincian Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/ (Turun)%
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	28.761.962.076	53.565.371.914	(46,30)
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	696.205.000	828.949.500	(16,01)
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.404.069.000	60.567.675.000	(67,96)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.600.306.946	11.071.731.917	(67,48)
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3.350.886.113	8.951.656.271	(62,57)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		55.813.429.135	134.985.384.602	(58,65)

Berdasarkan tabel di atas, Beban Perjalanan Dinas untuk periode Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 58,65% bila dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tentang Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 sebagai respons terhadap Inpres 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan penghematan terhadap 16 pos belanja salah satunya Belanja Perjalanan Dinas baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang bersumber dari APBN hanya dapat dilaksanakan untuk kegiatan yang bersifat prioritas, sehingga mengakibatkan intensitas kegiatan perjalanan dinas biasa, paket *meeting* dalam kota maupun luar kota serta perjalanan dinas luar negeri dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi turut mengalami penurunan secara drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun rincian perbandingan beban perjalanan dinas berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 152: Rincian Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Berdasarkan Satuan Kerja
Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun)%
015416	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	-	6.167.066.044	(100)
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	55.813.429.135	128.818.318.558	(56,67)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		55.813.429.135	134.985.384.602	(58,65)

Sedangkan rincian perbandingan belanja Perjalanan Dinas pada LRA dengan beban Perjalanan Dinas pada LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 153: Rincian Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA dengan
Beban Perjalanan Dinas pada LO Tahun 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Belanja LRA	Selisih (LO-LRA)	Beban LO
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	28.761.962.076	0	28.761.962.076
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	696.205.000	0	696.205.000
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.404.069.000	0	19.404.069.000
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.600.306.946	0	3.600.306.946
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3.350.886.113	0	3.350.886.113
Jumlah		55.813.429.135	0	55.813.429.135

Tidak terdapat selisih pada belanja dan beban perjalanan dinas Rp0.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp27.196.546.587

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp27.196.546.587 dan Rp30.072.476.184. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi dan perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

Rincian perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 154: Rincian Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2025 dan Tahun 2024*

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/ (Turun)%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	16.554.625.858	16.685.698.727	(0,79)
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.870.623.900	2.456.794.580	16,84
591312	Beban Penyusutan Irigasi	2.212.066	2.212.066	0,00
591313	Beban Penyusutan Jaringan	34.880.414	44.730.289	(22,02)
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.370.375	7.370.375	0,00
592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.351.750	14.050.714	(90,38)
	Jumlah Beban Penyusutan	19.471.064.363	19.210.856.751	1,35
592115	Beban Amortisasi <i>Software</i>	7.695.488.077	10.846.622.359	(29,05)
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	29.994.147	14.997.074	100,00
	Jumlah Beban Amortisasi	7.725.482.224	10.861.619.433	(28,87)
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	27.196.546.587	30.072.476.184	(9,56)

Rincian perbandingan beban penyusutan dan amortisasi berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 155: Rincian Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Satuan Kerja
Tahun 2025 dan Tahun 2024*

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun)%
015416	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	-	1.157.787.321	(100)
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	27.196.546.587	28.914.688.863	(5,94)
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	27.196.546.587	30.072.476.184	(9,56)

Sedangkan rincian perbandingan kenaikan/penurunan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 156: RINCIAN PERBANDINGAN KENAIKAN/PENURUNAN AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PADA NERACA
DENGAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PADA LO TAHUN 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Kenaikan/ (Penurunan) Akumulasi Penyusutan & Amortisasi - Neraca	Selisih (LO- Neraca)	Beban LO
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.015.769.826	(5.015.769.826)	0
137211	Akumulasi Gedung dan Bangunan	3.012.614.528	(3.012.614.528)	0
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		-	
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	2.212.066	(2.212.066)	0
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	34.880.414	(34.880.414)	0
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.370.375	(7.370.375)	0
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	(2.667.150.880)	2.667.150.880	0
169315	Akumulasi Amortisasi Software	4.445.006.552	(4.445.006.552)	0
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	460.561.647	(460.561.647)	0
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	16.554.625.858	16.554.625.858
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2.870.623.900	2.870.623.900
591312	Beban Penyusutan Irigasi	0	2.212.066	2.212.066
591313	Beban Penyusutan Jaringan	0	34.880.414	34.880.414
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	7.370.375	7.370.375
592115	Beban Amortisasi Software	0	7.695.488.077	7.695.488.077
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0	29.994.147	29.994.147
592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0	1.351.750	1.351.750
Jumlah		10.311.264.528	16.885.282.059	27.196.546.587

Terdapat selisih sebesar Rp16.885.282.059. Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Berjalan pada Laporan Operasional (LO) dengan mutasi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Tahun Berjalan pada Neraca, pada TA 2025 tercatat Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO) sebesar Rp27.196.546.587, sedangkan mutasi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi (Neraca) sebesar Rp10.311.264.528. Dengan

demikian terdapat selisih sebesar Rp16.885.282.059, dimana nilai beban pada LO lebih besar dibandingkan kenaikan bersih akumulasi pada Neraca.

*Tabel 157 PROSEDUR ANALITIS LO V NERACA LAYER 1 TINGKAT KL PERIODE 14
Tahun 2025*

(dalam rupiah)

Kode Transaksi	Nama Transaksi	Kode Akun	Selisih (Akumulasi Penyusutan - Beban Penyusutan)
102	Transfer Masuk	313211	161.092.010
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	(25.056.436)
302	Transfer Keluar	313211	(81.950.000)
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	596111	(1.083.335.300)
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	(569.460.430)
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	596111	(2.854.419.453)
302	Transfer Keluar	313211	(1.413.145.882)
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	596111	(423.475.852)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391118	(1.650.000)
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	596111	(3.749.556.488)
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391118	11.024.775
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	(1.500.000)
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	596111	(4.137.076.063)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	(2.360.960)
305	Koreksi Pencatatan	391118	(2.747.338.800)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	391116	3.280.625
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	596111	(532.875.000)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	562.521.195
Jumlah			(16.885.282.059)

Selisih tersebut terjadi karena perubahan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca tidak hanya dipengaruhi oleh beban penyusutan/amortisasi pada LO, tetapi juga dipengaruhi oleh mutasi non-beban yang tidak dicatat sebagai beban pada LO. Pada TA 2025, selisih tersebut dapat dijelaskan oleh 18 (delapan belas) komponen transaksi sebagaimana dijelaskan pada Tabel Prosedur Analitis LO v Neraca di atas.

Secara agregat, transaksi non-beban tersebut menghasilkan penambahan akumulasi sebesar Rp737.918.605 (Transfer Masuk, Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif, Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan dan Koreksi Bertambah) dan pengurangan akumulasi sebesar Rp(17.623.200.664) (Koreksi Berkurang, Transfer Keluar, dan Pencatatan

Barang yang Mau Dihapuskan. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang, dsb. Sesuai Tabel Prosedur Analitis LO v Neraca), sehingga terdapat pengaruh bersih penurunan akumulasi sebesar Rp16.885.282.059. Pengaruh bersih penurunan ini menyebabkan kenaikan bersih Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca menjadi Rp10.311.264.528, walaupun Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui pada LO sebesar Rp27.196.546.587.

Dengan demikian, selisih antara Beban Penyusutan dan Amortisasi pada LO dan mutasi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca pada TA 2025 merupakan selisih yang dapat dijelaskan dan terutama dipengaruhi oleh transaksi transfer aset, koreksi pencatatan, dsb. Serta proses penghapusan aset yang mempengaruhi akumulasi pada Neraca namun tidak diklasifikasikan sebagai beban penyusutan/amortisasi pada LO.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp34.386.361*

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi tidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan membentuk beban cadangan sebesar persentase tertentu dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp34.386.361 dan Rp2.438.516.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Rincian perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 158: Rincian Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Tahun 2025 dan Tahun 2024*

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/ (Turun)%
594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	35.295.451	2.438.516	1.347
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(909.090)	-	-
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		34.386.361	2.438.516	1.310,13

Berdasarkan tabel di atas, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode Tahun 2025 mengalami peningkatan 1.310,13% bila dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan terdapat penyisihan atas Piutang Lainnya berkategori piutang lancar yang ditagihkan kepada pihak ketiga serta penyisihan atas Piutang yang terbentuk dari kelebihan pembayaran belanja barang (Jasa Konsultan) dan kekurangan volume pekerjaan yang menyebabkan pengembalian atau terbentuknya piutang berkategori piutang lancar dan akan dikembalikan pada TA 2026. Adapun Penyisihan Piutang Lainnya dari Pihak Ketiga ini merupakan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2025 oleh BPK RI, dan telah dicatat melalui input jurnal manual pada Modul GLP di Aplikasi SAKTI.

Adapun rincian perbandingan beban penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 159: Rincian Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Satuan Kerja
Tahun 2025 dan Tahun 2024*

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun)%
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	34.386.361	2.438.516	1.310,13
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		34.386.361	2.438.516	1.310,13

*Defisit dari Kegiatan
Operasional
Rp346.082.235.947*

D.9 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas selama satu periode pelaporan. Jumlah Defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp346.082.235.947 dan Rp459.769.306.087. Nilai Defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang

berakhir pada 31 Desember 2025 merupakan selisih antara total Pendapatan Operasional sebesar Rp767.010 dengan total Beban Operasional sebesar Rp346.082.235.947.

Rincian perbandingan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 160: Rincian Perbandingan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
Tahun 2025 dan Tahun 2024*

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/ (Turun)%
Pendapatan Operasional	767.010	-	-
Beban Operasional	(346.083.002.957)	(459.769.306.087)	(24,73)
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(346.082.235.947)	(459.769.306.087)	(24,73)

Kegiatan Non Operasional

*Surplus Pelepasan
Aset
Rp1.374.832.793*

D.10 Surplus/Defisit Pelepasan Aset

Surplus/Defisit Pelepasan Aset berasal dari pendapatan dan beban pelepasan yang terbentuk dari berkurangnya aset non lancar (aset tetap dan aset lainnya), karena Kementerian PANRB melakukan pelepasan aset non lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset non lancar tersebut dapat berupa penghapusan, penjualan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Jumlah Surplus Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.374.832.793 dan Rp1.260.621.746. Nilai Surplus Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 merupakan selisih antara total Pendapatan Pelepasan Aset sebesar Rp1.523.450.800 dengan total Beban Pelepasan Aset sebesar Rp148.618.807.

Rincian perbandingan Surplus/Defisit Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 161: Rincian Perbandingan Surplus/Defisit Pelepasan Aset
Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/ (Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset	1.523.450.800	1.433.000.000	6,31
Beban Pelepasan Aset	(148.618.007)	(172.378.254)	13,78
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset	1.374.832.793	1.260.621.746	9,06

Pendapatan Pelepasan Aset

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.523.450.800 dan Rp1.433.000.000. Pendapatan pelepasan aset tersebut terjadi ketika pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar (penghapusan) lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas.

Rincian perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 162: Rincian Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset
Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/ (Turun)%
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.523.450.800	1.433.000.000	6,31
	Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset	1.523.450.800	1.433.000.000	6,31

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Pelepasan Aset untuk periode Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,31% bila dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2025 terdapat pendapatan dari penjualan/hasil bersih lelang aset Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

1. Risalah Lelang Nomor 31/07.05/2025-01 tanggal 5 Maret 2025 sebesar Rp145.500.000 sesuai bukti setor SSBP dengan NTPN 86AC348VVNTL8DRL tanggal 7 Maret 2025 berupa hasil bersih lelang 1 paket AC *Central* dan 4 unit *Reach in Chiller*.
2. Risalah Lelang Nomor 56/07.05/2025-02 tanggal 2 Mei 2025 sebesar Rp1.154.000.000 sesuai bukti setor SSBP dengan NTPN E33732G502UT4K6I tanggal 9 Mei 2025 berupa hasil bersih lelang 13 unit Kendaraan Dinas.
3. Risalah Lelang Nomor 58/07.05/2025-01 tanggal 7 Mei 2025 sebesar Rp138.840.000 sesuai bukti setor SSBP dengan NTPN

4FDA661QVD8DN4QF tanggal 9 Mei 2025 berupa hasil bersih lelang 430 unit Barang Inventaris Kantor.

4. Setoran Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dengan NPTN 3234E7QLV2JBFTLT tanggal Jurnal 15 Juli 2025 sebesar Rp12.76.000.
5. Setoran Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dengan NPTN 49FA37QLV2S3039M tanggal Jurnal 8 Oktober 2025 sebesar Rp50.850.000.
6. Setoran Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dengan NPTN EF9E455DFJAVCBKF tanggal Jurnal 11 Desember 2025 sebesar Rp21.784.000.

Terdapat kesalahan penggunaan akun pendapatan dari hasil bersih lelang Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp1.438.340.000. Telah dilakukan proses permohonan koreksi transaksi penerimaan negara, permohonan koreksi telah disetujui oleh KPPN, dengan perubahan semula menggunakan akun Pendapatan dari Pemindah tanganan BMN Lainnya (Akun 425129), menjadi akun Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin (Akun 425122).

Adapun rincian perbandingan pendapatan pelepasan aset berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 163: Rincian Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun)%
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	1.523.450.800	1.433.000.000	6,31
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset		1.523.450.800	1.433.000.000	6,31

Sedangkan rincian perbandingan pendapatan pelepasan aset pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 164 : Rincian Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset pada LRA dengan LO Tahun 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Pendapatan LRA	Selisih (LO-LRA)	Pendapatan LO
425122	Pendapatan dari Penjualan Aset	1.523.450.800	-	1.523.450.800
Jumlah		1.523.450.800	-	1.523.450.800

Tidak terdapat selisih pada pendapatan pelepasan aset. Pendapatan pelepasan aset pada LRA sama dengan pada LO.

Beban Pelepasan Aset

Jumlah Beban Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.523.450.800 dan Rp1.433.000.000. Beban pelepasan aset tersebut terjadi ketika pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar (penghapusan) lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas.

Rincian perbandingan Beban Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 165: Rincian Perbandingan Beban Pelepasan Aset
Tahun 2025 dan Tahun 2024*

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/ (Turun)%
596111	Beban Pelepasan Aset	148.618.007	172.378.254	(13,78)
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset		148.618.007	172.378.254	(13,78)

Berdasarkan tabel di atas, Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode TA 2025 mengalami penurunan sebesar 13,78% bila dibandingkan dengan TA 2024.

Beban Pelepasan Aset Tahun 2025 seluruhnya bersumber dari penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin yang sudah tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional Kementerian PANRB. Rincian Beban Pelepasan Aset berdasarkan jenis BMN yang dihapuskan adalah sebagai berikut:

*Tabel 166: Rincian Beban Pelepasan Aset Berdasarkan Jenis BMN yang Dihapuskan Tahun 2025
(dalam rupiah)*

No.	Jenis BMN yang Dihapuskan	Nilai
1	Kursi Besi/Metal	43.524.660
2	Note Book	16.403.125
3	Mixer Rauter	14.116.668
4	U V Sterilizer	12.256.125
5	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12.000.000
6	Printer	9.998.625
7	Peralatan dan Mesin Lainnya	40.318.804
Jumlah		148.618.007

Adapun rincian perbandingan pendapatan pelepasan aset berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 167: Rincian Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Berdasarkan Satuan Kerja
Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun)%
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	148.618.007	172.378.254	(13,78)
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset		148.618.007	172.378.254	(13,78)

Beban ini hanya tercermin pada LO yang didukung dengan Laporan Persediaan dan tidak tercermin pada LRA.

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp144.833.747

D.11 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Operasional Lainnya dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp144.833.747 dan Rp113.643.005. Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 merupakan selisih antara total Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp173.936.983 dengan total Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp29.103.236.

Rincian perbandingan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 168: Rincian Perbandingan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/ (Turun)%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	173.936.983	148.817.505	16,88
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(29.103.236)	(35.174.500)	(17,26)
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	144.833.747	113.643.005	27,45

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp173.936.983 dan Rp148.817.505 dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 169: Rincian Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/ (Turun)%
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	6.491.000	68.189.852	(90,48)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.554.692	1.187.150	199,43
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	83.138.665	79.440.503	4,66
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	80.752.626	0	0,00
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		173.936.983	148.817.505	16,88

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional untuk periode Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 16,88% bila dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya setoran pengembalian belanja modal TAYL pada Tahun 2025 sesuai temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2024 berupa kekurangan volume pekerjaan dari rekanan sebesar Rp80.752.626 dibandingkan Tahun Anggaran 2024 Rp0, Tahun 2024 tidak terdapat pengembalian pada Akun Belanja Modal yang menyebabkan selisih kenaikan terbesar antara tahun 2025 dengan 2024.

Terdapat lebih saji nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp10 yang berasal dari lebih saji nilai Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu. Hal ini terjadi karena terdapat kesalahan pencatatan nilai atas Jurnal manual eliminasi akun pengembalian belanja modal TAYL yang baru dilakukan koreksi pencatatan nilai berkurang dalam Memo Jurnal Penyesuaian Nomor 32/KU.04.06/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Adapun rincian perbandingan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 170: Rincian Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun)%
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	173.936.983	148.817.505	16,88
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		173.936.983	148.817.505	16,88

Sedangkan rincian perbandingan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya pada LRA dengan LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 171: Rincian Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LRA dengan LO Tahun 2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Pendapatan LRA	Selisih (LO-LRA)	Pendapatan LO
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	6.491.000	0	6.491.000
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	909.090	(909.090)	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	151.500.000	(151.500.000)	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.554.692	0	3.554.692
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	83.138.665	0	83.138.665
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	252.191.469	(171.438.843)	80.752.626
Jumlah		497.784.916	(323.847.933)	173.936.983

Terdapat selisih sebesar Rp(323.847.933) dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 172: Rincian Penyesuaian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LRA dengan LO
Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
a	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	173.936.983
b	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LRA	497.784.916
c	Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO dengan LRA	(323.847.933)
Faktor yang Mempengaruhi		
Selisih Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara		
	Penyetoran Piutang Jangka Panjang a.n YS sebesar Rp1.000.000 dipotong Biaya Administrasi	(909.090)
Selisih Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga		
	Penyetoran Piutang Jangka Panjang a.n Pihak Ketiga	(151.500.000)
Selisih Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu		
	Jurnal Manual eliminasi akun Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL yang baru dilakukan Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang aset tetap pada TA 2025	(171.438.833)
Total Faktor yang Mempengaruhi		(323.847.923)

Rincian Faktor yang mempengaruhi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada Lampiran Keuangan yang mengikuti Laporan Keuangan ini.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp29.103.236 dan Rp35.174.500 dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 173: Rincian Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/ (Turun)%
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	3.460.736	-	-
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	25.642.500	35.174.500	(27,10)
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		29.103.236	35.174.500	(17,26)

Berdasarkan tabel di atas, Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 17,26% bila dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pada TA 2025 terdapat Beban Persediaan Rusak/Usang yang disebabkan adanya perubahan status kondisi barang. Beban ini hanya muncul pada LO yang didukung dengan Laporan Persediaan dan tidak ada pada LRA. Dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan

pada Tahun 2025. Namun jika dibandingkan dengan jumlah Beban Persediaan Rusak/Usang yang lebih tinggi pada Tahun 2024, nilai-nilai beban-beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2025 lebih kecil dibandingkan Tahun 2024.

Sedangkan rincian perbandingan beban dari kegiatan non operasional lainnya berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 174: Rincian Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun)%
015416	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	-	35.174.500	(100)
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	29.103.236	-	-
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		29.103.236	35.174.500	(17,26)

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp1.519.666.540

D.12 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional diperoleh dari selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari entitas. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.519.666.540 dan Rp1.374.264.751. Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 diperoleh dari penjumlahan antara Surplus Pelepasan Aset sebesar Rp1.374.832.793 dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp144.833.747.

Rincian perbandingan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 175: Rincian Perbandingan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/ (Turun)%
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset	1.374.832.793	1.260.621.746	9,06
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	144.833.747	113.643.005	27,45
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.519.666.540	1.374.264.751	10,58

Terdapat nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp1.519.666.540 yang berasal dari

Surplus Pelepasan Aset sebesar Rp1.347.832.793 dan Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp144.833.747 hal ini merupakan kenaikan dari Tahun 2024 sebesar Rp113.643.005 atau peningkatan sebesar 10,58%.

Defisit - LO
Rp344.562.569.407

D.13 Surplus/Defisit - LO

Pos Surplus/Defisit - LO adalah penjumlahan dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp344.562.569.407 dan Rp458.395.041.336. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 diperoleh dari penjumlahan antara Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp346.082.235.947 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.519.666.540.

Rincian perbandingan Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 176: Rincian Perbandingan Surplus/Defisit-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/ (Turun)%
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(346.082.235.947)	(459.769.306.087)	(24,73)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.519.666.540	1.374.264.751	10,58
Jumlah Surplus/(Defisit) - LO	(344.562.569.407)	(458.395.041.336)	(24,83)

Berdasarkan tabel di atas, Defisit - LO untuk periode Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 24,83% bila dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya penurunan Defisit dari Kegiatan Operasional yang berasal dari penurunan hampir seluruh komponen Beban Operasional seperti Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan serta Beban Perjalanan Dinas sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp214.047.512.471

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp214.047.512.471 dan Rp163.324.631.271.

Nilai ekuitas awal merupakan nilai ekuitas akhir pada periode pelaporan tahun sebelumnya.

Rincian Perbandingan Ekuitas Awal per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 177: Rincian Perbandingan Ekuitas Awal 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	2025	2024	Naik/Turun	%
391111	Ekuitas	214.047.512.471	163.324.631.271	50.722.881.200	31,06
Jumlah Ekuitas		214.047.512.471	163.324.631.271	50.722.881.200	31,06

Surplus/Defisit - LO
(Rp344.562.569.407)

E.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(344.562.569.407) dan Rp(458.395.041.336).

Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa pada Tahun Anggaran Berjalan.

Rincian penjelasan lebih lanjut tentang Surplus/Defisit-LO untuk periode TA 2025 disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan bagian Laporan Operasional.

Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp.2.815.203.149

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi yang Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.815.203.149 dan Rp(602.639.895) dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 178: Rincian Perbandingan Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	2025	2024	NAIK/TURUN	%
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(11.353.182)	313.015.647	(324.368.829)	(103,63)
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	2.823.208.725	7.831.250	2.815.377.475	35.950,55
391119	Koreksi Lain-lain	3.347.606	(923.486.792)	926.834.398	(100,36)
Jumlah Ekuitas		2.815.203.149	(602.639.895)	3.417.843.044	(567,15)

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp2.811.855.543

E.3.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Jumlah Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.811.855.543 dan Rp320.846.897.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah akun yang digunakan dalam sistem akuntansi pemerintah untuk mencatat koreksi atau penyesuaian terhadap nilai aset tetap yang tidak melalui proses revaluasi.

Rincian perbandingan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 179: Rincian Perbandingan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	2025	2024	NAIK/TURUN	%
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(11.353.182)	313.015.647	(324.368.829)	(103,63)
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	2.823.208.725	7.831.250	2.815.377.475	35.950,55
Jumlah Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		2.811.855.543	320.846.897	2.491.008.646	776,39

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai Aset Tetap yang bukan berasal dari transaksi revaluasi/penilaian ulang aset. Pada Tahun Anggaran 2025, akun 391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp2.811.855.543. Nilai tersebut berasal dari transaksi koreksi dan penyesuaian atas Aset Lainnya yang dilakukan bukan dalam rangka revaluasi aset, melainkan sebagai tindak lanjut atas hasil inventarisasi, rekonsiliasi, penatausahaan BMN, serta perbaikan kesalahan pencatatan sesuai dokumen sumber dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Buku Besar akun 391118, transaksi koreksi terdiri atas jurnal penyesuaian debit dan kredit yang memengaruhi nilai aset lainnya selama periode pelaporan. Koreksi tersebut antara lain berupa penyesuaian nilai aset, reklasifikasi, koreksi penginputan data, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada tanggal pelaporan.

Koreksi Lain-lain
Rp3.347.606

E.3.2 Koreksi Lain-lain

Saldo Lain-lain pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp3.347.606, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp(923.486.792). Perubahan tersebut berasal dari akun Koreksi Lainnya yang merupakan dampak penyesuaian dan koreksi atas pencatatan transaksi pada periode sebelumnya maupun tahun berjalan. Pencatatan tersebut terdapat pada

jurnal nomor 30/KU.04.06/2026, dimana Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya (594212) pada koreksi lainnya, jurnal penyesuaian atas beban penyisihan piutang yang membentuk saldo minus PMK 100/2025 (391119).

Transaksi Antar
Entitas
Rp359.764.800.235

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp359.764.800.235 dan Rp509.720.562.431.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN. Transaksi Antar Entitas antara KL pengguna APBN dengan BUN diatur oleh Kementerian Keuangan. Transaksi Antar Entitas tersebut terjadi dikarenakan penagihan yang diajukan Kementerian PANRB berupa SPPB, SPM, SP3HL dan surat penagihan lainnya untuk dibayarkan oleh entitas BUN dalam bentuk SP2D. Transaksi Antar Entitas (LPE) = Realisasi Pendapatan (DDEL) + Realisasi Belanja (DKEL) + Transfer masuk + Transfer keluar + Pengesahan Hibah.

Rincian Perbandingan Transaksi Antar Entitas pada TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 180: Rincian Perbandingan Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025	TA 2024	%
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	307.811.485.898	433.338.930.871	(28,97)
313121	Diterima dari Entitas Lain	(2.022.002.726)	(1.711.574.797)	18,14
313211	Transfer Keluar	(4.933.037.994)	(50.863.498.119)	(90,30)
313221	Transfer Masuk	15.948.108.990	76.692.312.860	(79,21)
391131	Pengesahan Hibah Langsung	42.960.246.067	52.264.391.616	(17,80)
Jumlah		359.764.800.235	509.720.562.431	(29,42)

Ditagihkan ke Entitas
Lain
Rp307.811.485.898

E. 4. 1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp307.811.485.898 dan Rp433.338.930.871.

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). DKEL terjadi dikarenakan

penagihan yang diajukan Kementerian PANRB berupa SPPB, SPM, SP3HL dan surat penagihan lainnya untuk dibayarkan oleh entitas BUN dalam bentuk SP2D. Rincian perbandingan DKEL berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 181. Rincian Perbandingan DKEL Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Satuan Kerja	TA 2025	TA 2024	%
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (427950)	307.811.485.898	400.241.381.839	(23,09)
Komisi Aparatur Sipil Negara (015416)	0	33.097.549.032	(100,00)
Jumlah	307.811.485.898	433.338.930.871	(28,97)

Diterima dari Entitas
Lain
Rp(2.022.002.726)

E. 4. 2. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima Dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(2.022.002.726) dan Rp(1.711.574.797).

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). DDEL merupakan penyeimbang transaksi dengan perbedaan entitas akuntansi, transaksinya akan diseimbangkan dengan Diterima dari Entitas Lainnya. DDEL berasal dari transaksi Pendapatan yang diterima dari Kementerian PANRB dan disetorkan kepada kas negara.

Rincian Perbandingan DDEL berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 182: Rincian Perbandingan DDEL Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Satuan Kerja	TA 2025	TA 2024	%
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (427950)	(2.022.002.726)	(1.711.574.797)	18,14
Komisi Aparatur Sipil Negara (015416)	0	0	0
Jumlah	(2.022.002.726)	(1.711.574.797)	18,14

Transfer Keluar
Rp(4.933.037.994)

E. 4. 3. Transfer Keluar

Transfer Keluar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(4.933.037.994) dan Rp(50.863.498.119).

Transfer keluar adalah pengeluaran dari entitas lain yang masih dalam satu

entitas pelaporan pemerintah pusat, baik antar satker dalam satu K/L maupun antar satker lintas K/L.

Rincian perbandingan Transfer Keluar berdasarkan Satuan Kerja pada TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 183: Rincian Perbandingan Transfer Keluar Berdasarkan Satuan Kerja TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Satuan Kerja	TA 2025	TA 2024	%
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (427950)	(4.933.037.994)	(50.863.498.119)	(90,30)
Komisi Aparatur Sipil Negara (015416)	0	(46.509.080.924)	(100,00)
Jumlah	(4.933.037.994)	(97.372.579.043)	(94,93)

Nilai transaksi transfer keluar diatas terdiri dari Rp12.490.713, kepada Kementerian Koperasi dengan Berita Acara Serah Terima nomor 97/BN.05/2025; Nomor :67/BAST/SM.KOP/BN.00/2025, pada tanggal 22 September 2025 dan Rp4.920.547.281 kepada Kementerian Sekretariat Negara dengan Berita Acara Serah Terima nomor B/85/BN.06/2025, tanggal 22 Desember 2026.

Transfer Masuk
Rp15.948.108.990

E. 4. 4. Transfer Masuk

Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.948.108.990 dan Rp76.692.312. 860.

Transfer masuk adalah penerimaan dari entitas lain yang masih dalam satu entitas pelaporan pemerintah pusat, baik antar satker dalam satu K/L maupun antar satker lintas K/L.

- 1 (satu) unit Apartemen South Hills Lantai 32 Unit Nomor Z2/32/MN sebesar Rp7.290.181.000;
2. 1 (satu) unit Apartemen South Hills Lantai 42 Unit Nomor Z2/42/A sebesar Rp6.867.220.000;
3. 1 (satu) unit Apartemen South Hills Lantai 30 Unit Nomor 30/J sebesar Rp1.951.800.000.

Sehingga ketika ditotal, maka nilainya adalah Rp.16.109.201.000, dengan dikurangi nilai penyusutan sebesar (satu) 1%, maka saldo pada akun Transfer Masuk adalah Rp15.948.108.990. Atas transfer masuk berupa gedung dan bangunan tersebut senilai Rp16.109.201.000, dilakukan koreksi pencatatan nilai berkurang sebesar Rp236.095.880, nilai tersebut merupakan nilai peralatan mesin yang terdapat pada ketiga gedung tersebut dan kemudian dicatat terpisah

atas rekomendasi pemeriksa.

Pengesahan Hibah
Langsung
Rp42.960.246.067

E. 4. 5. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pencatatan atas penerimaan hibah yang diterima langsung oleh satuan kerja dari pihak pemberi hibah, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun Anggaran 2025, transaksi hibah langsung telah disahkan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan dicatat dalam laporan keuangan sebagai bagian dari pendapatan hibah dan/atau penambahan aset sesuai karakteristik hibah yang diterima.

Transaksi hibah langsung sebesar Rp42.960.246.067, yang merupakan hibah dari PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp196.040.700 dengan BAST Nomor: 06/BN.00/2025 tanggal 2 Mei 2025, sebesar Rp15.565.740.000, dengan BAST No. 004/TBI-DIG/01/2025 diterima dari PT TBI Apac Indonesia, sebesar Rp 24.699.085.110, dengan Bast Nomor: 242/USAID-INA/BAST-Services/DRG tanggal 8 April 2025 diterima dari USAID dan sebesar Rp2.499.380.257, BAST Nomor: KOICA/2025/075 tanggal 6 Januari 2025 diterima dari KOICA.

Kenaikan/Penurunan
Ekuitas
Rp18.017.433.977

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 terjadi kenaikan ekuitas adalah masing-masing sebesar Rp18.017.433.977 dan Rp50.722.881.200.

Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Transaksi Antar Entitas.

Rincian perbandingan Kenaikan/Penurunan Ekuitas pada TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 184: Rincian Perbandingan Kenaikan/Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK/TURUN	%
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	18.017.433.977	50.722.881.200	(32.705.447.223)	(64,48)
Jumlah	18.017.433.977	50.722.881.200	(32.705.447.223)	(64,48)

Berdasarkan tabel di atas, Ekuitas pada TA 2025 mengalami penurunan sebanyak Rp(32.705.447.223) atau 64,48% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Transaksi Antar Entitas yang menurun sebesar Rp(149.955.765.196) atau 29,42%.

Ekuitas Akhir
Rp232.064.946.448

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp232.064.946.448 dan Rp214.047.512.471, naik sebesar Rp18.017433.977 atau 8.42% dibanding periode sebelumnya.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Progress Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)

Sebagai bagian dari upaya tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melaksanakan kegiatan inventarisasi BMN sebagai tindak lanjut atas hasil audit terkait pengelolaan BMN.

Pelaksanaan inventarisasi dilakukan pada periode Februari sampai dengan Desember 2025 dengan ruang lingkup meliputi seluruh kategori BMN berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tak Berwujud (ATB). Kegiatan inventarisasi dilaksanakan melalui pendataan fisik, pelabelan, pemindaian barcode, rekonsiliasi data, verifikasi dokumen sumber, serta sinkronisasi data pada aplikasi SIMAN Versi 2 dan/atau aplikasi terkait lainnya guna mendukung akurasi, validitas, dan kesesuaian data BMN dengan kondisi fisik di lapangan.

Sampai dengan periode pelaporan, BMN yang dikelola tercatat sebanyak 17.229 NUP dengan nilai perolehan sebesar Rp 353.946.084.973. Fokus pelaksanaan inventarisasi diarahkan pada percepatan pendataan, pelabelan, dan sinkronisasi data BMN pada aplikasi SIMAN Versi 2.

Adapun hasil sementara pelaksanaan inventarisasi BMN adalah sebagai berikut:

Tabel 185 Hasil Sementara Pelaksanaan Inventarisasi BMN

No	Jenis Aset	Telah di Inventarisasi	Nilai	Ket
1	Bangunan dan Gedung	3	Rp84.526.399.727	Selesai inventarisasi dan pemutakhiran SIMAN
2	Mesin Peralatan Khusus TIK	576	Rp12.588.969.108	Selesai inventarisasi dan pemutakhiran SIMAN
3	Mesin Peralatan Non TIK	1.801	Rp9.200.014.123	Selesai inventarisasi dan pemutakhiran SIMAN
4	Aset Tetap Lainnya	89	Rp12.253.842	Selesai inventarisasi dan pemutakhiran SIMAN
Jumlah		2.469	Rp106.327.636.800	

Sebanyak 2.469 unit BMN dengan nilai perolehan sebesar Rp106.327.636.800 telah selesai mengikuti seluruh tahapan inventarisasi dan dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi SIMAN V2. BMN yang telah selesai diinventarisasi terdiri atas 3 unit gedung dan bangunan, 576 unit peralatan dan mesin teknologi informasi dan komunikasi (TIK), 1.801 unit peralatan dan mesin non-TIK, serta 89 unit aset tetap lainnya.

Berdasarkan hasil inventarisasi sementara, diperoleh data bahwa dari total BMN sebanyak 17.229 NUP dengan nilai perolehan sebesar Rp392.473.265.464, terdapat 2.469 unit BMN dengan nilai perolehan sebesar Rp106.327.636.800 yang telah selesai melalui proses inventarisasi, pelabelan, dan pemutakhiran data pada aplikasi SIMAN V2. Selain itu, terdapat kurang lebih 713 unit aset yang secara fisik telah selesai diinventarisasi namun masih dalam proses antrian pemutakhiran data pada aplikasi SIMAN V2.

Seluruh BMN yang telah diinventarisasi telah dilakukan pemindaian (*scanning*) *barcode* melalui aplikasi SIMAN dan terintegrasi secara otomatis ke dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) pada masing-masing unit kerja. Proses tersebut mendukung tertib administrasi BMN, peningkatan akurasi data, serta optimalisasi pengelolaan aset di lingkungan Kementerian PANRB.

Atas hasil inventarisasi dimaksud, Kementerian PANRB melakukan tindak lanjut berupa penelusuran dokumen sumber, verifikasi fisik ulang, pemutakhiran data, reklasifikasi, koreksi

pencatatan, penyusunan berita acara, serta langkah administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, inventarisasi BMN masih menghadapi beberapa kendala, antara lain belum optimalnya pemutakhiran data BMN pada aplikasi SIMAN akibat pergantian user dan proses updating aplikasi dari pengelola BMN sebelumnya, serta belum tertibnya proses mutasi dan penghapusan BMN.

Untuk mendukung percepatan penyelesaian inventarisasi dan pemutakhiran data BMN, Kementerian PANRB melakukan langkah-langkah berupa penertiban penggunaan BMN sesuai standar, penarikan BMN yang tidak sesuai ketentuan, pengusulan penghapusan BMN rusak berat, pemutakhiran data pada aplikasi SIMAN, pelaksanaan inventarisasi dengan *timeline* yang lebih terstruktur, penetapan PIC BMN pada masing-masing unit kerja, serta evaluasi atas penerapan pedoman internal dan pemberian akses user aplikasi SIMAN kepada PIC BMN unit kerja.

F.2. Pengungkapan Proses Sertifikasi Tanah di Pekayon dan Cipinang

Kementerian PANRB memiliki dan/atau menguasai beberapa bidang tanah yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian aspek legalitas berupa sertifikasi pada Kantor Pertanahan setempat. Rincian bidang tanah dimaksud beserta status proses sertifikasinya per tanggal pelaporan disajikan adalah sebagai berikut:

Tabel 186 Rincian Proses Sertifikasi Tanah di Pekayon dan Cipinang

No.	SHP / NIB	Lokasi	Luas (m ²)	Peruntukan
1	SHP No. 00472 NIB 09040105.07682	Jl. Cipinang Cempedak II No. 25A RT 011/RW 06, Jakarta Timur	2.345	Kantor Inspektorat Kementerian PANRB
2	SHP No. 00034 NIB 09040702.07266	Jl. Lapan No. 8 RT 008/RW 01, Pekayon, Jakarta Timur	397	Mess Pegawai Kementerian PANRB
3	SHP No. 00035 NIB 09040702.07265	Jl. Lapan No. 8 RT 008/RW 01, Pekayon, Jakarta Timur	5.951	Kantor Pekayon Kementerian PANRB (dalam proses pemecahan sertipikat; luas yang direncanakan dialihkan kepada Kementerian PANRB sebesar 4.730 m ²)

Adapun penjelasan atas progress proses sertifikasi masing-masing bidang tanah adalah sebagai berikut:

a. **Tanah Kantor Inspektorat – Cipinang (SHP No. 00472, luas 2.345 m²)**

Tanah seluas 2.345 m² yang berlokasi di Jalan Cipinang Cempedak II No. 25A RT 011/RW 06, Jakarta Timur, dengan NIB 09040105.07682, digunakan sebagai Kantor Inspektorat Kementerian PANRB. Saat ini, proses sertifikasi atas tanah dimaksud sedang dalam pengurusan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Tahapan yang telah dilaksanakan meliputi penghapusan hak lama, permohonan hak baru, dan pengukuran ulang. Per tanggal pelaporan, proses tersebut telah memasuki tahapan penerbitan sertipikat baru.

b. **Tanah Mess Pegawai – Pekayon (SHP No. 00034, luas 397 m²)**

Tanah seluas 397 m² yang berlokasi di Jalan Lapan No. 8 RT 008/RW 01, Pekayon, Jakarta Timur, dengan NIB 09040702.07266, diperuntukkan untuk Mess Pegawai Kementerian PANRB. Proses sertifikasi atas tanah dimaksud saat ini juga sedang dalam pengurusan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan tahapan penghapusan hak lama, permohonan hak baru, dan pengukuran ulang. Per tanggal pelaporan, proses dimaksud telah memasuki tahapan penerbitan sertipikat baru.

c. **Tanah Kantor – Pekayon (SHP No. 00035, luas 5.951 m²)**

Tanah seluas 5.951 m² yang berlokasi di Jalan Lapan No. 8 RT 008/RW 01, Pekayon, Jakarta Timur, dengan NIB 09040702.07265, saat ini sedang dilakukan proses pemecahan sertifikat oleh pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Proses pemecahan sertifikat tersebut dilakukan karena sebagian lahan pada area dimaksud masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang merupakan eks pejabat dan/atau pegawai BRIN.

Berdasarkan rencana pemecahan tersebut, luas tanah yang akan dialihkan kepada Kementerian PANRB adalah seluas 4.730 m² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi). Atas tanah tersebut, Kementerian PANRB akan melakukan pencatatan/penyesuaian nilai aset di Neraca setelah dokumen pengalihan/penyerahan dan sertipikat hasil pemecahan diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Atas seluruh proses sertifikasi sebagaimana diuraikan di atas, Kementerian PANRB berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi secara aktif dengan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna memastikan penyelesaian proses sertifikasi dapat berjalan sesuai ketentuan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kepastian status hukum aset tanah serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F.3. Pengungkapan Pencatatan BMN berupa Apartemen

Pada Tahun 2025, Kementerian PANRB menerima hibah Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara dari Kejaksaan Agung berupa 3 (tiga) unit apartemen South Hills yang berlokasi di Jakarta Selatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor B-1/BPA.3/BPApa.1/01/2025 tanggal 13 Januari 2025.

Rincian unit apartemen South Hills dimaksud per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 187 Rincian unit Apartemen South Hills

No.	SHP / NIB	Lokasi	Luas (m ²)	Nilai BMN (Rp)
1	SHMSRS Nomor 39.124 / NIB 09.02.000039124.3	Apartemen South Hills Lantai 32 Unit Nomor Z2/32/MN, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	149 m ²	7.290.181.000
2	SHMSRS Nomor 39.121 / NIB 09.02.000039121.3	Apartemen South Hills Lantai 42 Unit Nomor Z2/42/A, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	92 m ²	6.867.220.000
3	SHMSRS Nomor 39.167 / NIB 09.02.000039167.3	Apartemen South Hills Lantai 30 Unit Nomor 30/J, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	60 m ²	1.951.800.000
Jumlah				16.109.201.000

Data luas bangunan dan NIB tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) masing-masing unit apartemen

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan inventarisasi fisik, ditemukan aset berupa peralatan dan mesin yang berada di dalam unit apartemen dan belum tercatat secara terpisah sebagai Barang Milik Negara. Atas aset tersebut telah dilakukan penilaian menggunakan pendekatan nilai wajar berdasarkan referensi harga pasar/toko online sesuai hasil koordinasi dengan Direktorat PKKN dan KPKNL.

Adapun aset yang diakui dan dilakukan pencatatan terpisah sebagai peralatan dan mesin pada ketiga unit apartemen adalah sebagai berikut:

Tabel 188 Aset Peralatan dan Mesin pada Apartemen South Hills

No	Kode Barang	Nama Barang	Merek/Type	Tahun Perolehan	Pengakuan Nilai (Rp)
1	3050201016	Kasur/Spring Bed	Kasur Springbed King Koil World Endorsed - 200X. 200	13 Januari 2025	24.980.000
2	3050201016	Kasur/Spring Bed	Kasur Springbed King Koil World Endorsed - 180 X 200	13 Januari 2025	22.917.000
3	3050201016	Kasur/Spring Bed	Kasur Springbed King Koil World Endorsed - 180 X 200	13 Januari 2025	22.917.000
4	3050203004	Mesin Cuci	LG Wash And Dry 9kg/5kg	13 Januari 2025	10.250.000
5	3050204001	Lemari Es	Bosch KIN86AF307 Built-in Fridge-Freezer with Freezer at Bottom	13 Januari 2025	26.986.960
6	3050205001	Kompas Listrik (Alat Dapur)	Exclusive Bundle Bosch Cooking Combo PWP611BB5E Induction Hob + DWBA68J60I Cooker Hood	13 Januari 2025	10.128.000
7	3050205006	Oven Listrik	Bosch HBF512BS1T Oven Tanam / Built-In Oven Series 2 Stainless Steel	13 Januari 2025	7.729.000
Apartemen South Hills Lantai 32 Unit Nomor Z2/32/MN			Jumlah		125.907.960
8	3050203004	Mesin Cuci	LG Wash And Dry 9kg/5kg	13 Januari 2025	10.250.000
9	3050204001	Lemari Es	Bosch KIN86AF307 Built-in Fridge-Freezer with Freezer at Bottom	13 Januari 2025	26.986.960

No	Kode Barang	Nama Barang	Merek/Type	Tahun Perolehan	Pengakuan Nilai (Rp)
10	3050205001	Kompor Listrik (Alat Dapur)	Exclusive Bundle Bosch Cooking Combo PWP611BB5E Induction Hob + DWBA68J60I Cooker Hood	13 Januari 2025	10.128.000
11	3050205006	Oven Listrik	Bosch HBF512BS1T Oven Tanam / Built-In Oven Series 2 Stainless Steel	13 Januari 2025	7.729.000
Apartemen South Hills Lantai 42 Unit Nomor Z2/42/A			Jumlah		55.093.960
12	3050203004	Mesin Cuci	LG Wash And Dry 9kg/5kg	13 Januari 2025	10.250.000
13	3050204001	Lemari Es	Bosch KIN86AF307 Built-in Fridge-Freezer with Freezer at Bottom	13 Januari 2025	26.986.960
14	3050205001	Kompor Listrik (Alat Dapur)	Exclusive Bundle Bosch Cooking Combo PWP611BB5E Induction Hob + DWBA68J60I Cooker Hood	13 Januari 2025	10.128.000
15	3050205006	Oven Listrik	Bosch HBF512BS1T Oven Tanam / Built-In Oven Series 2 Stainless Steel	13 Januari 2025	7.729.000
Apartemen South Hills Lantai 30 Unit Nomor 30/J			Jumlah		55.093.960
Total					236.095.880

Atas aset tersebut telah dilakukan pencatatan menggunakan transaksi perolehan lainnya pada aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap.

Pencatatan tersebut juga berdampak pada nilai masing-masing unit apartemen, dimana setiap unit apartemen dilakukan koreksi pencatatan nilai berkurang sejumlah nilai peralatan

dan mesin yang dicatat secara terpisah. Adapun rincian koreksi pengurangan nilai unit apartemen dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 189 Rincian Koreksi Pengurangan Nilai Unit Apartemen South Hills

No	Unit	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Koreksi Berkurang (Rp)	Nilai Setelah Koreksi (Rp)
1	Apartemen South Hills Lantai 32 Unit Nomor Z2/32/MN	7.290.181.000	125.907.960	7.164.273.040
2	Apartemen South Hills Lantai 42 Unit Nomor Z2/42/A	6.867.220.000	55.093.960	6.812.126.040
3	Apartemen South Hills Lantai 30 Unit Nomor 30/J	1.951.800.000	55.093.960	1.896.706.040
Jumlah		16.109.201.000	236.095.880	15.873.105.120

Dengan demikian, nilai aset apartemen telah disajikan secara lebih andal sesuai substansi aset, dimana nilai bangunan apartemen dan nilai peralatan dan mesin telah dicatat secara terpisah sesuai karakteristik dan klasifikasi Barang Milik Negara.

Meskipun ketiga unit apartemen tersebut telah memiliki Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS), sampai dengan tanggal pelaporan masih terdapat proses administrasi lanjutan dalam rangka pengamanan aset dan penyempurnaan dokumen kepemilikan apartemen dimaksud.

Adapun proses administrasi yang masih berlangsung sampai dengan tanggal pelaporan antara lain sebagai berikut:

1. proses pemecahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masing-masing unit apartemen dari PBB induk yang saat ini masih tergabung pada pengelolaan Building Management South Hills di Kantor PTSP Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan; dan
2. proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) South Hills oleh pihak manajemen South Hills/Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) South Hills sesuai Surat Permohonan Kepala Biro Umum dan Keuangan Nomor B/23/BN.99/2026 tanggal 1 April 2026 hal Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

F.4. Belanja Pemeliharaan yang Menghasilkan Aset berupa Pagar

(Gedung dan Bangunan) Gedung Pekayon

Pada Tahun Anggaran [2024/2025 — sesuaikan], Kementerian PANRB melaksanakan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan di Kantor Pekayon yang dibebankan pada akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (MAK 523111). Berdasarkan hasil reviu Inspektorat, ditemukan bahwa pekerjaan dimaksud berupa pembangunan pagar Gedung Pekayon yang secara substansi memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Buletin Teknis SAP terkait, karena pekerjaan tersebut menambah masa manfaat dan meningkatkan kapasitas/standar kinerja aset.

Atas hasil reviu dimaksud, Kementerian PANRB melakukan koreksi pencatatan melalui Modul Aset Tetap pada aplikasi SAKTI dengan rincian jurnal sebagai berikut:

1. Pengakuan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Dr. Gedung dan Bangunan (133111)	Rp49.805.122
Cr. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)	Rp49.805.122

2. Pengakuan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan

Dr. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan (591211)	Rp3.557.509
Cr. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (137211)	Rp3.557.509

Atas Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang sebelumnya telah tercatat di Laporan Operasional tidak dilakukan jurnal reversal, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Mekanisme koreksi dilakukan melalui Modul Aset Tetap dengan akun 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi) yang merupakan akun ekuitas. Mekanisme ini merupakan praktik baku pada aplikasi SAKTI untuk reklasifikasi/penambahan nilai aset tetap berdasarkan hasil pemeriksaan atau temuan.
- b. Koreksi melalui akun ekuitas (391116) telah merepresentasikan substansi reklasifikasi dari belanja pemeliharaan menjadi penambah nilai aset tetap, sehingga tidak diperlukan jurnal reversal pada akun beban pemeliharaan di Laporan Operasional.
- c. Konsistensi penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tetap terjaga, dimana realisasi belanja mengacu pada MAK belanja pemeliharaan sesuai DIPA, sementara pengakuan substansi aset dilakukan melalui koreksi ekuitas pada Neraca dan dampak penyusutan pada Laporan Operasional.

Dengan demikian, nilai aset tetap berupa pagar Gedung Pekayon telah disajikan secara wajar pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp46.247.613 (nilai perolehan Rp49.805.122 dikurangi akumulasi penyusutan Rp3.557.509), dan dampak penyusutan periodik telah diakui pada Laporan Operasional Tahun 2025.

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TA 2025 (*Unaudited*) yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Laporan Keuangan ini disertai Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Sesuai dengan PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Jakarta, Februari 2026
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi,



NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2026 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 427950

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
DKI JAKARTA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Tgl. Cetak 07/05/2026 1:01 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	655,572,144	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	489,553,104	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	34,386,361
0.0	117111	Barang Konsumsi	938,063,012	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	29,000	0
0.0	131111	Tanah	60,334,049,494	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	179,998,618,808	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	109,802,758,304	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	126,829,000	0
0.0	134112	Irigasi	76,283,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,395,216,550	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,357,465,299	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	128,696,855,326
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	19,830,647,707
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	126,829,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	22,087,365
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	907,121,040
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	25,796,313
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	763,958,056	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	763,958,056
0.0	162151	Software	33,233,206,529	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	143,608,700	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	16,047,426,045	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	3,893,353,386	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	406,217,620	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	2,307,424,560	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	405,022,620
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	22,725,264,815
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	2,292,427,487

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2026 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 427950

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
DKI JAKARTA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Tgl. Cetak 07/05/2026 1:01 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	68,531,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	247,902,455
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	3,757,856,618
0.0	391111	Ekuitas	0	232,064,946,448
JUMLAH			411,969,632,611	411,969,632,611

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 05/05/26 6:42 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,523,450,800	0	1,523,450,800	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	1,523,450,800	0	1,523,450,800	0
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	6,491,000	0	6,491,000	0
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	909,090	0	909,090	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	151,500,000	0	151,500,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	158,900,090	0	158,900,090	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	767,010	0	767,010	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	767,010	0	767,010	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,554,692	0	3,554,692	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	83,138,665	0	83,138,665	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	252,191,469	0	252,191,469	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	338,884,826	0	338,884,826	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	2,022,002,726	0	2,022,002,726	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	2,022,002,726	0	2,022,002,726	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 05/05/26 6:43 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	30,315,884,000	31,868,867,000	31,774,118,120	13,653,362	31,760,464,758	99.7	108,402,242
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	441,000	494,000	483,668	4,840	478,828	97.91	15,172
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,666,213,000	1,758,355,000	1,752,339,176	1,415,240	1,750,923,936	99.66	7,431,064
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	386,628,000	399,902,000	393,688,515	505,856	393,182,659	98.45	6,719,341
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,567,710,000	1,829,310,000	1,724,610,000	2,945,000	1,721,665,000	94.28	107,645,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,768,918,000	4,142,024,000	4,074,511,000	10,505,000	4,064,006,000	98.37	78,018,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	180,428,000	397,266,000	370,299,166	0	370,299,166	93.21	26,966,834
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,335,228,000	1,404,225,000	1,400,892,480	579,360	1,400,313,120	99.76	3,911,880
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,296,040,000	4,739,725,000	4,199,133,000	0	4,199,133,000	88.59	540,592,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	540,440,000	620,400,000	530,020,000	3,870,430	526,149,570	85.43	94,250,430
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	43,057,930,000	47,160,568,000	46,220,095,125	33,479,088	46,186,616,037	98.01	973,951,963
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	1,089,326,000	1,089,314,730	0	1,089,314,730	100	11,270
511519	Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0	420,517,000	420,000,000	0	420,000,000	99.88	517,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	0	1,509,843,000	1,509,314,730	0	1,509,314,730	99.97	528,270
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3,198,732,000	4,061,697,000	4,061,696,250	6,301,296	4,055,394,954	100	6,302,046
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	34,000	118,000	48,463	92	48,371	41.07	69,629
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	156,629,000	246,740,000	216,120,390	320,260	215,800,130	87.59	30,939,870
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	33,480,000	52,843,000	52,842,330	64,072	52,778,258	100	64,742
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	523,795,000	503,622,000	497,142,000	1,080,000	496,062,000	98.71	7,560,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	145,928,000	222,257,000	215,956,440	289,680	215,666,760	97.17	6,590,240
511628	Belanja Uang Makan PPPK	555,115,000	812,320,000	688,792,000	0	688,792,000	84.79	123,528,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	50,400,000	63,795,000	62,970,000	0	62,970,000	98.71	825,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	4,664,113,000	5,963,392,000	5,795,567,873	8,055,400	5,787,512,473	97.19	175,879,527
5121	Belanja Honorarium							
512111	Belanja Uang Honor Tetap	183,750,000	183,750,000	183,750,000	0	183,750,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	183,750,000	183,750,000	183,750,000	0	183,750,000	100	0
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	715,000,000	710,000,000	709,974,000	0	709,974,000	100	26,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	93,500,000	172,000,000	171,801,000	0	171,801,000	99.88	199,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	808,500,000	882,000,000	881,775,000	0	881,775,000	99.97	225,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 05/05/26 6:43 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	78,172,960,000	85,317,119,000	84,178,159,399	4,820,000	84,173,339,399	98.67	1,143,779,601
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	6,141,116,000	7,820,291,000	7,817,425,310	12,306,604	7,805,118,706	99.96	15,172,294
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	84,314,076,000	93,137,410,000	91,995,584,709	17,126,604	91,978,458,105	98.77	1,158,951,895
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	133,028,369,000	148,836,963,000	146,586,087,437	58,661,092	146,527,426,345	98.49	2,309,536,655
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	15,142,865,000	15,097,169,000	14,483,561,571	0	14,483,561,571	95.94	613,607,429
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	173,692,000	40,932,000	34,253,800	0	34,253,800	83.68	6,678,200
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	633,480,000	592,754,000	574,900,000	54,000	574,846,000	96.99	17,908,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,319,000,000	8,659,269,000	8,214,813,051	0	8,214,813,051	94.87	444,455,949
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	18,269,037,000	24,390,124,000	23,307,528,422	54,000	23,307,474,422	95.56	1,082,649,578
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	13,410,910,000	12,991,808,000	9,213,073,919	26,400	9,213,047,519	70.91	3,778,760,481
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	525,010,000	259,838,000	55,084,000	0	55,084,000	21.2	204,754,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,271,512,000	2,154,931,000	2,053,856,637	0	2,053,856,637	95.31	101,074,363
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	260,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	20,467,432,000	15,406,577,000	11,322,014,556	26,400	11,321,988,156	73.49	4,084,588,844
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,228,308,000	2,790,827,000	2,569,623,778	0	2,569,623,778	92.07	221,203,222
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	3,228,308,000	2,790,827,000	2,569,623,778	0	2,569,623,778	92.07	221,203,222
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	4,164,000,000	2,745,996,000	2,677,492,708	0	2,677,492,708	97.51	68,503,292
522112	Belanja Langganan Telepon	84,000,000	54,000,000	53,656,273	0	53,656,273	99.36	343,727
522113	Belanja Langganan Air	4,200,000	4,200,000	1,160,480	0	1,160,480	27.63	3,039,520
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,878,852,000	3,848,684,000	3,812,684,000	0	3,812,684,000	99.06	36,000,000
522131	Belanja Jasa Konsultansi	3,728,292,000	5,509,746,000	4,170,065,429	0	4,170,065,429	75.69	1,339,680,571
522141	Belanja Sewa	2,215,917,000	1,670,943,000	789,539,315	0	789,539,315	47.25	881,403,685
522151	Belanja Jasa Profesi	11,938,372,000	11,712,320,000	4,475,200,000	2,330,000	4,472,870,000	38.21	7,239,450,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	8,463,623,000	7,739,559,000	6,377,154,192	19,092,000	6,358,062,192	82.4	1,381,496,808
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	34,477,256,000	33,285,448,000	22,356,952,397	21,422,000	22,335,530,397	67.17	10,949,917,603
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,560,987,000	5,923,416,000	5,872,848,080	0	5,872,848,080	99.15	50,567,920
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	480,000,000	791,920,000	788,909,446	0	788,909,446	99.62	3,010,554
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	421,000,000	250,768,000	228,213,251	0	228,213,251	91.01	22,554,749
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8,301,857,000	6,330,070,000	6,211,753,012	0	6,211,753,012	98.13	118,316,988

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 05/05/26 6:43 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	452,027,000	570,527,000	562,309,500	0	562,309,500	98.56	8,217,500
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,033,310,000	683,616,000	669,515,659	0	669,515,659	97.94	14,100,341
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	15,249,181,000	14,550,317,000	14,333,548,948	0	14,333,548,948	98.51	216,768,052
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47,498,274,000	40,712,744,000	29,302,104,565	540,142,489	28,761,962,076	71.97	11,950,781,924
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,130,885,000	994,645,000	697,735,000	1,530,000	696,205,000	70.15	298,440,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48,239,454,000	30,338,531,000	19,406,524,000	2,455,000	19,404,069,000	63.97	10,934,462,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,189,554,000	6,002,008,000	3,600,566,946	260,000	3,600,306,946	59.99	2,401,701,054
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	107,058,167,000	78,047,928,000	53,006,930,511	544,387,489	52,462,543,022	67.92	25,585,384,978
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	8,320,353,000	5,288,582,000	3,356,299,513	5,413,400	3,350,886,113	63.46	1,937,695,887
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	8,320,353,000	5,288,582,000	3,356,299,513	5,413,400	3,350,886,113	63.46	1,937,695,887
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	207,069,734,000	173,759,803,000	130,252,898,125	571,303,289	129,681,594,836	74.96	44,078,208,164
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,988,353,000	19,454,837,000	19,064,662,038	0	19,064,662,038	97.99	390,174,962
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	487,500,000	331,471,000	331,466,004	0	331,466,004	100	4,996
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	5,475,853,000	19,786,308,000	19,396,128,042	0	19,396,128,042	98.03	390,179,958
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	900,000,000	2,120,000,000	2,102,526,522	0	2,102,526,522	99.18	17,473,478
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	900,000,000	2,120,000,000	2,102,526,522	0	2,102,526,522	99.18	17,473,478
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	46,257,171,000	45,278,413,000	6,954,650,243	0	6,954,650,243	15.36	38,323,762,757
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	249,000,000	3,198,640,000	3,149,159,910	0	3,149,159,910	98.45	49,480,090
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	46,506,171,000	48,477,053,000	10,103,810,153	0	10,103,810,153	20.84	38,373,242,847
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	52,882,024,000	70,383,361,000	31,602,464,717	0	31,602,464,717	44.9	38,780,896,283
	JUMLAH BELANJA	392,980,127,000	392,980,127,000	308,441,450,279	629,964,381	307,811,485,898	78.49	85,168,641,102

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048
SATUAN KERJA : 427950

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/26 1:28 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	32,442,147,000	32,442,147,000	14,107,400,060	2,809,202	14,104,590,858	43.48	18,337,556,142
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	466,000	466,000	205,942	8,203	197,739	42.43	268,261
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,939,424,000	1,939,424,000	773,952,488	318,660	773,633,828	39.89	1,165,790,172
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	484,268,000	484,268,000	175,863,642	63,732	175,799,910	36.3	308,468,090
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,200,067,000	2,200,067,000	886,895,000	0	886,895,000	40.31	1,313,172,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	4,118,540,000	4,118,540,000	1,762,620,000	5,595,000	1,757,025,000	42.66	2,361,515,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	380,937,000	380,937,000	185,270,213	0	185,270,213	48.64	195,666,787
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,284,875,000	1,284,875,000	620,422,140	217,260	620,204,880	48.27	664,670,120
511129	Belanja Uang Makan PNS	4,987,898,000	4,587,898,000	1,108,021,000	0	1,108,021,000	24.15	3,479,877,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	527,002,000	527,002,000	250,330,000	4,995,000	245,335,000	46.55	281,667,000
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	1,089,487,000	1,089,487,000	467,618,503	0	467,618,503	42.92	621,868,497
511519	Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	420,000,000	420,000,000	175,000,000	0	175,000,000	41.67	245,000,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	6,501,310,000	6,501,310,000	2,942,933,384	0	2,942,933,384	45.27	3,558,376,616
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	113,000	113,000	41,552	0	41,552	36.77	71,448
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	530,145,000	493,345,000	183,587,809	0	183,587,809	37.21	309,757,191
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	104,515,000	106,315,000	50,131,695	0	50,131,695	47.15	56,183,305
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	435,911,000	435,911,000	194,915,000	0	194,915,000	44.71	240,996,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	448,753,000	448,753,000	192,745,830	0	192,745,830	42.95	256,007,170
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,624,160,000	1,624,160,000	300,794,000	0	300,794,000	18.52	1,323,366,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	265,659,000	265,659,000	127,598,819	0	127,598,819	48.03	138,060,181
512111	Belanja Uang Honor Tetap	183,750,000	297,500,000	87,500,000	0	87,500,000	29.41	210,000,000
512211	Belanja Uang Lembur	1,044,860,000	1,044,860,000	149,865,000	0	149,865,000	14.34	894,995,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	307,224,000	307,224,000	39,742,000	0	39,742,000	12.94	267,482,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	82,406,114,000	82,727,364,000	38,514,858,685	0	38,514,858,685	46.56	44,212,505,315
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	11,966,319,000	11,966,319,000	5,392,359,187	0	5,392,359,187	45.06	6,573,959,813
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	155,693,944,000	155,693,944,000	68,690,671,949	14,007,057	68,676,664,892	44.12	87,017,279,108
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	10,908,214,000	7,871,659,000	1,448,918,259	0	1,448,918,259	18.41	6,422,740,741
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	141,610,000	78,627,000	7,786,500	0	7,786,500	9.9	70,840,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	535,080,000	533,040,000	155,050,000	0	155,050,000	29.09	377,990,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	8,620,000,000	8,620,000,000	3,194,182,738	0	3,194,182,738	37.06	5,425,817,262
521211	Belanja Bahan	11,836,726,000	11,421,284,000	3,354,039,783	0	3,354,039,783	29.37	8,067,244,217
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	69,052,000	44,952,000	8,064,000	0	8,064,000	17.94	36,888,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,523,510,000	1,096,509,000	225,098,861	0	225,098,861	20.53	871,410,139
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3,000,000	3,000,000	2,869,479	0	2,869,479	95.65	130,521
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,793,994,000	1,554,011,000	219,401,493	0	219,401,493	14.12	1,334,609,507
522111	Belanja Langganan Listrik	3,600,000,000	3,600,000,000	879,938,334	0	879,938,334	24.44	2,720,061,666
522112	Belanja Langganan Telepon	120,000,000	120,000,000	17,591,908	0	17,591,908	14.66	102,408,092

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048
SATUAN KERJA : 427950

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/26 1:28 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522113	Belanja Langganan Air	6,000,000	6,000,000	278,865	0	278,865	4.65	5,721,135
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,220,000,000	6,000,000,000	1,358,349,849	0	1,358,349,849	22.64	4,641,650,151
522131	Belanja Jasa Konsultan	12,861,347,000	10,853,330,000	0	0	0	0	10,853,330,000
522141	Belanja Sewa	1,856,935,000	2,551,503,000	530,698,038	0	530,698,038	20.8	2,020,804,962
522151	Belanja Jasa Profesi	11,589,690,000	6,969,943,000	767,900,000	20,000	767,880,000	11.02	6,202,063,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	11,673,218,000	8,771,655,000	1,104,330,967	0	1,104,330,967	12.59	7,667,324,033
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,739,674,000	4,739,674,000	1,390,274,905	0	1,390,274,905	29.33	3,349,399,095
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,200,000,000	1,200,000,000	139,316,370	0	139,316,370	11.61	1,060,683,630
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	270,768,000	270,768,000	270,767,157	0	270,767,157	100	843
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8,918,256,000	9,377,813,000	1,937,477,515	0	1,937,477,515	20.66	7,440,335,485
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	890,000,000	850,000,000	9,580,410	0	9,580,410	1.13	840,419,590
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	890,000,000	930,000,000	281,972,000	0	281,972,000	30.32	648,028,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36,270,024,000	21,333,556,000	5,223,115,544	336,494	5,222,779,050	24.48	16,110,776,950
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,875,210,000	1,072,468,000	270,840,000	0	270,840,000	25.25	801,628,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	37,176,672,000	16,968,052,000	3,004,555,000	340,000	3,004,215,000	17.71	13,963,837,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,639,822,000	2,462,805,000	126,140,000	0	126,140,000	5.12	2,336,665,000
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3,373,306,000	2,403,061,000	109,430,635	0	109,430,635	4.55	2,293,630,365
	JUMLAH BELANJA BARANG	187,602,108,000	131,703,710,000	26,037,968,610	696,494	26,037,272,116	19.77	105,666,437,884
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,040,272,000	4,777,229,000	895,506,370	0	895,506,370	18.75	3,881,722,630
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	721,536,000	756,010,000	86,500,000	0	86,500,000	11.44	669,510,000
536111	Belanja Modal Lainnya	1,992,267,000	1,905,167,000	0	0	0	0	1,905,167,000
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	42,930,000,000	42,930,000,000	0	0	0	0	42,930,000,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	49,684,075,000	50,368,406,000	982,006,370	0	982,006,370	1.95	49,386,399,630
	JUMLAH RUPIAH MURNI	392,980,127,000	337,766,060,000	95,710,646,929	14,703,551	95,695,943,378	28.34	242,070,116,622
	TOTAL	392,980,127,000	337,766,060,000	95,710,646,929	14,703,551	95,695,943,378	28.34	242,070,116,622

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2026**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048
SATUAN KERJA : 427950

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 07/05/26 1:30 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							
4350	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	1,350,000,000	1,096,796,000	69,077,881	0	69,077,881	6.3	1,027,718,119
6189	Perumusan Kebijakan PANRB	11,210,874,000	6,799,161,000	1,378,254,730	0	1,378,254,730	20.27	5,420,906,270
6191	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	15,898,702,000	9,179,248,000	1,427,814,763	20,000	1,427,794,763	15.55	7,751,453,237
6193	Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana	13,187,064,000	6,922,781,000	1,433,930,727	0	1,433,930,727	20.71	5,488,850,273
6194	Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan SDM Aparatur	57,205,715,000	51,193,119,000	1,114,968,492	0	1,114,968,492	2.18	50,078,150,508
6195	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik	15,960,000,000	8,211,629,000	1,772,356,445	340,000	1,772,016,445	21.58	6,439,612,555
7908	Koordinasi Percepatan Penerapan dan Evaluasi Transformasi Digital Pemerintah	24,707,645,000	15,301,349,000	1,386,237,834	0	1,386,237,834	9.06	13,915,111,166
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CO	139,520,000,000	98,704,083,000	8,582,640,872	360,000	8,582,280,872	8.7	90,121,802,128
WA	Program Dukungan Manajemen							
2818	PELAKSANAAN DUKUNGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PAN DAN RB	765,670,000	402,475,000	147,720,558	0	147,720,558	36.7	254,754,442
6178	Pengelolaan Legislasi dan Litigasi	818,000,000	477,071,000	79,516,516	0	79,516,516	16.67	397,554,484
6179	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	9,296,264,000	6,113,837,000	1,683,754,703	290,678	1,683,464,025	27.54	4,430,372,975
6180	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	216,427,370,000	212,080,815,000	82,259,939,775	14,052,873	82,245,886,902	38.79	129,834,928,098
6181	Pengelolaan Sistem dan Teknologi	8,564,597,000	7,806,114,000	1,221,976,390	0	1,221,976,390	15.65	6,584,137,610
6182	Pengelolaan Organisasi dan SDM	11,054,155,000	7,752,492,000	911,772,577	0	911,772,577	11.76	6,840,719,423
6183	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	6,534,071,000	4,429,173,000	823,325,538	0	823,325,538	18.59	3,605,847,462
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	253,460,127,000	239,061,977,000	87,128,006,057	14,343,551	87,113,662,506	36.45	151,948,314,494
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	392,980,127,000	337,766,060,000	95,710,646,929	14,703,551	95,695,943,378	28.34	242,070,116,622

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2026**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048
SATUAN KERJA : 427950

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 07/05/26 1:30 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH	392,980,127,000	337,766,060,000	95,710,646,929	14,703,551	95,695,943,378	28.34	242,070,116,622

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2026
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 427950

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
DKI JAKARTA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/05/26 1:31 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	41,918,000	0	41,918,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	23,146,000	0	23,146,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	65,064,000	0	65,064,000	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	3,346,662	0	3,346,662	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	3,346,662	0	3,346,662	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,485,600	0	2,485,600	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	632,618,636	0	632,618,636	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	178,777,921	0	178,777,921	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	813,882,157	0	813,882,157	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	882,292,819	0	882,292,819	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	882,292,819	0	882,292,819	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 07/05/26 1:42 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,523,450,800	0	1,523,450,800	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	6,491,000	0	6,491,000	0
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	909,090	0	909,090	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	151,500,000	0	151,500,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	767,010	0	767,010	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,554,692	0	3,554,692	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	83,138,665	0	83,138,665	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	252,191,469	0	252,191,469	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN	0	2,022,002,726	0	2,022,002,726	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	2,022,002,726	0	2,022,002,726	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 07/05/26 1:38 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN					
048010100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada					
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	0	2,022,002,726	0	2,022,002,726	0
	JUMLAH PENDAPATAN 048010100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	0	2,022,002,726	0	2,022,002,726	
	JUMLAH PENDAPATAN 01 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	0	2,022,002,726	0	2,022,002,726	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	2,022,002,726	0	2,022,002,726	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/05/26 1:38 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN							
51	BELANJA PEGAWAI	133,028,369,000	148,836,963,000	146,586,087,437	58,661,092	146,527,426,345	98.45	2,309,536,655
52	BELANJA BARANG	207,069,734,000	173,759,803,000	130,252,898,125	571,303,289	129,681,594,836	74.63	44,078,208,164
53	BELANJA MODAL	52,882,024,000	70,383,361,000	31,602,464,717	0	31,602,464,717	44.9	38,780,896,283
	JUMLAH BELANJA (01) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN	392,980,127,000	392,980,127,000	308,441,450,279	629,964,381	307,811,485,898	78.49	85,168,641,102
	JUMLAH BELANJA	392,980,127,000	392,980,127,000	308,441,450,279	629,964,381	307,811,485,898	78.49	85,168,641,102

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 1:37 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01 048010100KP 427950	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN Kode UAPPAW Tidak Ada MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	392,980,127,000	392,980,127,000	308,441,450,279	629,964,381	307,811,485,898	78.33	85,168,641,102
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	392,980,127,000	392,980,127,000	308,441,450,279	629,964,381	307,811,485,898	78.49	85,168,641,102
	JUMLAH BELANJA 01	392,980,127,000	392,980,127,000	308,441,450,279	629,964,381	307,811,485,898	78.49	85168641102
	JUMLAH BELANJA	392,980,127,000	392,980,127,000	308,441,450,279	629,964,381	307,811,485,898	78.49	85,168,641,102

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/26 1:45 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	30,315,884,000	31,868,867,000	31,774,118,120	13,653,362	31,760,464,758	99.7	108,402,242
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	441,000	494,000	483,668	4,840	478,828	97.91	15,172
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,666,213,000	1,758,355,000	1,752,339,176	1,415,240	1,750,923,936	99.66	7,431,064
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	386,628,000	399,902,000	393,688,515	505,856	393,182,659	98.45	6,719,341
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,567,710,000	1,829,310,000	1,724,610,000	2,945,000	1,721,665,000	94.28	107,645,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,768,918,000	4,142,024,000	4,074,511,000	10,505,000	4,064,006,000	98.37	78,018,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	180,428,000	397,266,000	370,299,166	0	370,299,166	93.21	26,966,834
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,335,228,000	1,404,225,000	1,400,892,480	579,360	1,400,313,120	99.76	3,911,880
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,296,040,000	4,739,725,000	4,199,133,000	0	4,199,133,000	88.59	540,592,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	540,440,000	620,400,000	530,020,000	3,870,430	526,149,570	85.43	94,250,430
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	43,057,930,000	47,160,568,000	46,220,095,125	33,479,088	46,186,616,037	98.01	973,951,963
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	1,089,326,000	1,089,314,730	0	1,089,314,730	100	11,270
511519	Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0	420,517,000	420,000,000	0	420,000,000	99.88	517,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	0	1,509,843,000	1,509,314,730	0	1,509,314,730	99.97	528,270
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3,198,732,000	4,061,697,000	4,061,696,250	6,301,296	4,055,394,954	100	6,302,046
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	34,000	118,000	48,463	92	48,371	41.07	69,629
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	156,629,000	246,740,000	216,120,390	320,260	215,800,130	87.59	30,939,870
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	33,480,000	52,843,000	52,842,330	64,072	52,778,258	100	64,742
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	523,795,000	503,622,000	497,142,000	1,080,000	496,062,000	98.71	7,560,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	145,928,000	222,257,000	215,956,440	289,680	215,666,760	97.17	6,590,240
511628	Belanja Uang Makan PPPK	555,115,000	812,320,000	688,792,000	0	688,792,000	84.79	123,528,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	50,400,000	63,795,000	62,970,000	0	62,970,000	98.71	825,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	4,664,113,000	5,963,392,000	5,795,567,873	8,055,400	5,787,512,473	97.19	175,879,527
5121	Belanja Honorarium							
512111	Belanja Uang Honor Tetap	183,750,000	183,750,000	183,750,000	0	183,750,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	183,750,000	183,750,000	183,750,000	0	183,750,000	100	0
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	715,000,000	710,000,000	709,974,000	0	709,974,000	100	26,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	93,500,000	172,000,000	171,801,000	0	171,801,000	99.88	199,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	808,500,000	882,000,000	881,775,000	0	881,775,000	99.97	225,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/26 1:45 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	78,172,960,000	85,317,119,000	84,178,159,399	4,820,000	84,173,339,399	98.67	1,143,779,601
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	6,141,116,000	7,820,291,000	7,817,425,310	12,306,604	7,805,118,706	99.96	15,172,294
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	84,314,076,000	93,137,410,000	91,995,584,709	17,126,604	91,978,458,105	98.77	1,158,951,895
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	133,028,369,000	148,836,963,000	146,586,087,437	58,661,092	146,527,426,345	98.49	2,309,536,655
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	15,142,865,000	15,097,169,000	14,483,561,571	0	14,483,561,571	95.94	613,607,429
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	173,692,000	40,932,000	34,253,800	0	34,253,800	83.68	6,678,200
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	633,480,000	592,754,000	574,900,000	54,000	574,846,000	96.99	17,908,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,319,000,000	8,659,269,000	8,214,813,051	0	8,214,813,051	94.87	444,455,949
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	18,269,037,000	24,390,124,000	23,307,528,422	54,000	23,307,474,422	95.56	1,082,649,578
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	13,410,910,000	12,991,808,000	9,213,073,919	26,400	9,213,047,519	70.91	3,778,760,481
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	525,010,000	259,838,000	55,084,000	0	55,084,000	21.2	204,754,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,271,512,000	2,154,931,000	2,053,856,637	0	2,053,856,637	95.31	101,074,363
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	260,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	20,467,432,000	15,406,577,000	11,322,014,556	26,400	11,321,988,156	73.49	4,084,588,844
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,228,308,000	2,790,827,000	2,569,623,778	0	2,569,623,778	92.07	221,203,222
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	3,228,308,000	2,790,827,000	2,569,623,778	0	2,569,623,778	92.07	221,203,222
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	4,164,000,000	2,745,996,000	2,677,492,708	0	2,677,492,708	97.51	68,503,292
522112	Belanja Langganan Telepon	84,000,000	54,000,000	53,656,273	0	53,656,273	99.36	343,727
522113	Belanja Langganan Air	4,200,000	4,200,000	1,160,480	0	1,160,480	27.63	3,039,520
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,878,852,000	3,848,684,000	3,812,684,000	0	3,812,684,000	99.06	36,000,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	3,728,292,000	5,509,746,000	4,170,065,429	0	4,170,065,429	75.69	1,339,680,571
522141	Belanja Sewa	2,215,917,000	1,670,943,000	789,539,315	0	789,539,315	47.25	881,403,685
522151	Belanja Jasa Profesi	11,938,372,000	11,712,320,000	4,475,200,000	2,330,000	4,472,870,000	38.21	7,239,450,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	8,463,623,000	7,739,559,000	6,377,154,192	19,092,000	6,358,062,192	82.4	1,381,496,808
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	34,477,256,000	33,285,448,000	22,356,952,397	21,422,000	22,335,530,397	67.17	10,949,917,603
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,560,987,000	5,923,416,000	5,872,848,080	0	5,872,848,080	99.15	50,567,920
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	480,000,000	791,920,000	788,909,446	0	788,909,446	99.62	3,010,554
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	421,000,000	250,768,000	228,213,251	0	228,213,251	91.01	22,554,749
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8,301,857,000	6,330,070,000	6,211,753,012	0	6,211,753,012	98.13	118,316,988

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/26 1:45 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	452,027,000	570,527,000	562,309,500	0	562,309,500	98.56	8,217,500
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,033,310,000	683,616,000	669,515,659	0	669,515,659	97.94	14,100,341
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	15,249,181,000	14,550,317,000	14,333,548,948	0	14,333,548,948	98.51	216,768,052
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47,498,274,000	40,712,744,000	29,302,104,565	540,142,489	28,761,962,076	71.97	11,950,781,924
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,130,885,000	994,645,000	697,735,000	1,530,000	696,205,000	70.15	298,440,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48,239,454,000	30,338,531,000	19,406,524,000	2,455,000	19,404,069,000	63.97	10,934,462,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,189,554,000	6,002,008,000	3,600,566,946	260,000	3,600,306,946	59.99	2,401,701,054
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	107,058,167,000	78,047,928,000	53,006,930,511	544,387,489	52,462,543,022	67.92	25,585,384,978
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	8,320,353,000	5,288,582,000	3,356,299,513	5,413,400	3,350,886,113	63.46	1,937,695,887
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	8,320,353,000	5,288,582,000	3,356,299,513	5,413,400	3,350,886,113	63.46	1,937,695,887
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	207,069,734,000	173,759,803,000	130,252,898,125	571,303,289	129,681,594,836	74.96	44,078,208,164
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,988,353,000	19,454,837,000	19,064,662,038	0	19,064,662,038	97.99	390,174,962
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	487,500,000	331,471,000	331,466,004	0	331,466,004	100	4,996
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	5,475,853,000	19,786,308,000	19,396,128,042	0	19,396,128,042	98.03	390,179,958
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	900,000,000	2,120,000,000	2,102,526,522	0	2,102,526,522	99.18	17,473,478
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	900,000,000	2,120,000,000	2,102,526,522	0	2,102,526,522	99.18	17,473,478
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	46,257,171,000	45,278,413,000	6,954,650,243	0	6,954,650,243	15.36	38,323,762,757
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	249,000,000	3,198,640,000	3,149,159,910	0	3,149,159,910	98.45	49,480,090
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	46,506,171,000	48,477,053,000	10,103,810,153	0	10,103,810,153	20.84	38,373,242,847
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	52,882,024,000	70,383,361,000	31,602,464,717	0	31,602,464,717	44.9	38,780,896,283
	JUMLAH BELANJA	392,980,127,000	392,980,127,000	308,441,450,279	629,964,381	307,811,485,898	78.49	85,168,641,102

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 1:50 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	307,811,485,898
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,022,002,726	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,523,450,800
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	6,491,000
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	909,090
3.0	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	151,500,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	767,010
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	3,554,692
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	83,138,665
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	252,191,469
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	13,653,362
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	31,774,118,120	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	4,840
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	483,668	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,752,339,176	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,415,240
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	393,688,515	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	505,856
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,724,610,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	2,945,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	4,074,511,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	10,505,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	370,299,166	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	579,360
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,400,892,480	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	4,199,133,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	3,870,430
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	530,020,000	0
3.0	511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	1,089,314,730	0
3.0	511519	Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	420,000,000	0
3.1	511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	0	6,301,296
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	4,061,696,250	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	48,463	0
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	92
3.1	511621	Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	320,260
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	216,120,390	0
3.1	511622	Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	64,072
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	52,842,330	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 1:50 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	497,142,000	0
3.1	511624	Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	1,080,000
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	215,956,440	0
3.1	511625	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	289,680
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	688,792,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	62,970,000	0
3.0	512111	Belanja Uang Honor Tetap	183,750,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	709,974,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	171,801,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	84,178,159,399	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan	0	4,820,000
3.1	512414	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan	0	12,306,604
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	7,817,425,310	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	14,483,561,571	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	34,253,800	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	54,000
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	574,900,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	8,214,813,051	0
3.0	521211	Belanja Bahan	9,213,073,919	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	26,400
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	55,084,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,053,856,637	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,569,623,778	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,677,492,708	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	53,656,273	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,160,480	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,812,684,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	4,170,065,429	0
3.0	522141	Belanja Sewa	789,539,315	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	4,475,200,000	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	2,330,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	6,377,154,192	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	19,092,000
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,872,848,080	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	788,909,446	0
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	228,213,251	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,211,753,012	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	562,309,500	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 1:50 PM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	669,515,659	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,302,104,565	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	540,142,489
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	697,735,000	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,530,000
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	2,455,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19,406,524,000	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	260,000
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,600,566,946	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3,356,299,513	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	5,413,400
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,064,662,038	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	331,466,004	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2,102,526,522	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	6,954,650,243	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	3,149,159,910	0
JUMLAH			310,463,453,005	310,463,453,005

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 1:49 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	655,572,144	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	489,553,104	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	34,386,361
0.0	117111	Barang Konsumsi	938,063,012	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	29,000	0
0.0	131111	Tanah	60,334,049,494	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	179,998,618,808	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	109,802,758,304	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	126,829,000	0
0.0	134112	Irigasi	76,283,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,395,216,550	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,357,465,299	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	128,696,855,326
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	19,830,647,707
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	126,829,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	22,087,365
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	907,121,040
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	25,796,313
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	763,958,056	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan	0	763,958,056
0.0	162151	Software	33,233,206,529	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	143,608,700	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	16,047,426,045	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	3,893,353,386	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	406,217,620	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	2,307,424,560	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	405,022,620
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	22,725,264,815
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	2,292,427,487
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	68,531,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	247,902,455
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	3,757,856,618
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	307,811,485,898
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,022,002,726	0
0.0	313211	Transfer Keluar	4,933,037,994	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	15,948,108,990
0.0	391111	Ekuitas	0	214,047,512,471
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	11,353,182	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 1:49 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	2,823,208,725
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	3,347,606
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	42,960,246,067
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,523,450,800
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	6,491,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	767,010
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	3,554,692
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	83,138,665
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	80,752,626
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	31,760,464,758	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	478,828	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,750,923,936	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	393,182,659	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1,721,665,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	4,064,006,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	370,299,166	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,400,313,120	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	4,213,705,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	526,149,570	0
3.0	511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	1,089,314,730	0
3.0	511519	Beban Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	420,000,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	4,055,394,954	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	48,371	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	215,800,130	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	52,778,258	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	496,062,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	215,666,760	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	702,021,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	62,970,000	0
3.0	512111	Beban Uang Honor Tetap	183,750,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	709,974,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	171,801,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	84,173,339,399	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	7,805,118,706	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	14,459,662,665	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	34,253,800	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	606,430,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	8,214,813,051	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 1:49 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Beban Bahan	9,213,047,519	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	23,500,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,155,663,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6,483,200	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,653,085,333	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	53,511,323	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,160,480	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,812,684,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	46,855,090,448	0
3.0	522141	Beban Sewa	789,539,315	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	4,472,870,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	7,256,255,829	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,872,848,080	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	228,213,251	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,605,240,476	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	121,562,500	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	906,748,004	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	28,761,962,076	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	696,205,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19,404,069,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,600,306,946	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3,350,886,113	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	16,554,625,858	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,870,623,900	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	2,212,066	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	34,880,414	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7,370,375	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	7,695,488,077	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	29,994,147	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	1,351,750	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,638,051,885	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	502,699,370	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	3,460,736	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	35,295,451	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang –	0	909,090
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	148,618,007	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	25,642,500	0

JUMLAH	765,197,659,803	765,197,659,803
--------	-----------------	-----------------

Keterangan :
FINAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 1:52 PM

Halaman : 1

lap_lo_kl_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	767,010	0	767,010	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	767,010	0	767,010	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	767,010	0	767,010	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	146,555,227,345	145,347,317,028	1,207,910,317	0.831
Beban Persediaan	2,638,051,885	4,370,300,511	(1,732,248,626)	(39.637)
Beban Barang dan Jasa	99,608,049,963	131,983,450,323	(32,375,400,360)	(24.53)
Beban Pemeliharaan	14,237,311,681	13,007,938,923	1,229,372,758	9.451
Beban Perjalanan Dinas	55,813,429,135	134,985,384,602	(79,171,955,467)	(58.652)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 1:52 PM

Halaman : 2

lap_lo_kl_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	27,196,546,587	30,072,476,184	(2,875,929,597)	(9.563)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	34,386,361	2,438,516	31,947,845	1,310.135
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	346,083,002,957	459,769,306,087	(113,686,303,130)	(24.727)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(346,082,235,947)	(459,769,306,087)	113,687,070,140	(24.727)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	1,374,832,793	1,260,621,746	114,211,047	9.06
Pendapatan Pelepasan Aset	1,523,450,800	1,433,000,000	90,450,800	6.312
Beban Pelepasan Aset	148,618,007	172,378,254	(23,760,247)	(13.784)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	144,833,747	113,643,005	31,190,742	27.446
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	173,936,983	148,817,505	25,119,478	16.879
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	29,103,236	35,174,500	(6,071,264)	(17.26)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,519,666,540	1,374,264,751	145,401,789	10.58
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(344,562,569,407)	(458,395,041,336)	113,832,471,929	(24.833)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(344,562,569,407)	(458,395,041,336)	113,832,471,929	(24.833)

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 1:53 PM

Halaman : 1

lap_lpe_kl_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	214,047,512,471	163,324,631,271	50,722,881,200	31.06
SURPLUS/DEFISIT-LO	(344,562,569,407)	(458,395,041,336)	113,832,471,929	(24.83)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	2,815,203,149	(602,639,895)	3,417,843,044	(567.15)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	2,811,855,543	320,846,897	2,491,008,646	776.39
LAIN-LAIN	3,347,606	(923,486,792)	926,834,398	(100.36)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	359,764,800,235	509,720,562,431	(149,955,762,196)	(29.42)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	18,017,433,977	50,722,881,200	(32,705,447,223)	(64.48)
EKUITAS AKHIR	232,064,946,448	214,047,512,471	18,017,433,977	8.42

Keterangan :

FINAL

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Tgl Data 07/05/26 7:30 AM
Tgl Cetak 07/05/26 1:53 PM
Halaman 1
lap_neraca_kl_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	655,572,144	980,460,983	(324,888,839)	(33.14)
Piutang Bukan Pajak	489,553,104	487,703,112	1,849,992	0.38
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(34,386,361)	(2,438,516)	(31,947,845)	1,310.13
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	455,166,743	485,264,596	(30,097,853)	(6.20)
Persediaan	938,092,012	702,153,743	235,938,269	33.60
JUMLAH ASET LANCAR	2,048,830,899	2,167,879,322	(119,048,423)	(5.49)
ASET TETAP				
Tanah	60,334,049,494	60,334,049,494	0	0.00
Peralatan dan Mesin	179,998,618,808	172,047,674,829	7,950,943,979	4.62
Gedung dan Bangunan	109,802,758,304	91,907,826,122	17,894,932,182	19.47
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,598,328,550	1,598,328,550	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	1,357,465,299	1,387,389,549	(29,924,250)	(2.16)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(149,609,336,751)	(141,536,489,542)	(8,072,847,209)	5.70
JUMLAH ASET TETAP	203,481,883,704	185,738,779,002	17,743,104,702	9.55
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	763,958,056	764,867,146	(909,090)	(0.12)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(763,958,056)	(764,867,146)	909,090	(0.12)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	0	0	0	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	33,376,815,229	44,662,268,320	(11,285,453,091)	(25.27)
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	16,047,426,045	0	16,047,426,045	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	3,893,353,386	3,488,838,700	404,514,686	11.59
Aset Lain-lain	2,713,642,180	4,976,068,210	(2,262,426,030)	(45.47)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(25,422,714,922)	(23,184,297,603)	(2,238,417,319)	9.65
JUMLAH ASET LAINNYA	30,608,521,918	29,942,877,627	665,644,291	2.22
JUMLAH ASET	236,139,236,521	217,849,535,951	18,289,700,570	8.40
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	4,074,290,073	3,802,023,480	272,266,593	7.16
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,074,290,073	3,802,023,480	272,266,593	7.16
JUMLAH KEWAJIBAN	4,074,290,073	3,802,023,480	272,266,593	7.16
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	232,064,946,448	214,047,512,471	18,017,433,977	8.42
JUMLAH EKUITAS	232,064,946,448	214,047,512,471	18,017,433,977	8.42
JUMLAH EKUITAS	232,064,946,448	214,047,512,471	18,017,433,977	8.42

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Tgl Data 07/05/26 7:30 AM
Tgl Cetak 07/05/26 1:53 PM
Halaman 2
lap_neraca_kl_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	236,139,236,521	217,849,535,951	18,289,700,570	8.40

Keterangan :
FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 048

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 6:41 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	2,022,002,726	2,022,002,726	0	0	1,711,574,797	1,711,574,797	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	2,022,002,726	2,022,002,726	0	0	1,711,574,797	1,711,574,797	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	2,022,002,726	2,022,002,726	0	0	1,711,574,797	1,711,574,797	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	392,980,127,000	307,811,485,898	(85,168,641,102)	78.33	450,466,107,000	433,338,930,871	(17,127,176,129)	96.2
1. Belanja Pegawai	148,836,963,000	146,527,426,345	(2,309,536,655)	98.45	146,913,233,000	145,334,254,028	(1,578,978,972)	98.93
2. Belanja Barang	173,759,803,000	129,681,594,836	(44,078,208,164)	74.63	247,584,204,000	232,266,903,912	(15,317,300,088)	93.81
3. Belanja Modal	70,383,361,000	31,602,464,717	(38,780,896,283)	44.90	55,968,670,000	55,737,772,931	(230,897,069)	99.59
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 048

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 6:41 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	392,980,127,000	307,811,485,898	(85,168,641,102)	78.33	450,466,107,000	433,338,930,871	(17,127,176,129)	96.2
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL

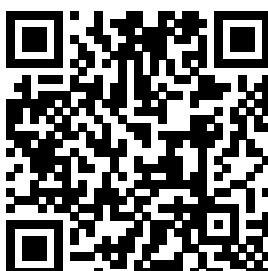
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (BA048) TAHUN 2025

Nomor: NKF-12/048/PB.6/2025

Pada hari **Rabu, 06 Mei 2026**, telah dilaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak** yang menyepakati angka-angka sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan ini. **KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (BA 048)** akan menyusun dan menyampaikan asersi final Laporan Keuangan Tahun 2025 secara lengkap kepada Ditjen Perbendaharaan dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara **paling lambat tanggal 08 Mei 2026.**

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

No	Nama	Unit Instansi
1	Sri Susanti, Kepala Bagian Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI – selaku Penyusun LKKL
2	Bambang Sulistyono , Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara II	DJKN – selaku Penyusun LBMN
3	Rahmat Mulyono, Plt. Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara	DJPb – selaku Penyusun LKPP
4	David Kurniawan, Ketua Tim	BPK RI - selaku Auditor BPK K/L



KERTAS KERJA LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

K/L : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
BA : 048

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0
Pendapatan Perpajakan	0	0	0
Pajak Dalam Negeri	0	0	0
Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,022,002,726	0	2,022,002,726
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0
Pendapatan BLU	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,022,002,726	0	2,022,002,726
Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	2,022,002,726	0	2,022,002,726
Belanja Negara	0	0	0
Belanja Pemerintah Pusat	307,811,485,898	0	307,811,485,898
Belanja Pegawai	146,527,426,345	0	146,527,426,345
Belanja Barang	129,681,594,836	0	129,681,594,836
Belanja Modal	31,602,464,717	0	31,602,464,717
Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0
Belanja Hibah	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Belanja Lain-lain	0	0	0
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0
Transfer ke Daerah	0	0	0
Dana Perimbangan	0	0	0
Dana Transfer Umum	0	0	0
Dana Bagi Hasil	0	0	0
Dana Alokasi Umum	0	0	0
Dana Transfer Khusus	0	0	0
Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0
Dana Insentif Daerah	0	0	0
Dana Keistimewaan DIY	0	0	0
Dana Otonomi Khusus	0	0	0
Dana Desa	0	0	0
Hibah Kepada Daerah	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	307,811,485,898	0	307,811,485,898
PEMBIAYAAN	0	0	0

KERTAS KERJA NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

K/L : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
BA : 048

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
ASET	0	0	0
ASET LANCAR	0	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dan Setara kas	0	0	0
Kas pada BLU	0	0	0
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	648,436,430	7.135.714	655,572,144
Uang Muka Belanja (prepayment)	0	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0	0
Piutang Perpajakan	0	0	0
Penyisihan PTH-Piutang Perpajakan	0	0	0
Piutang Bukan Pajak	336,203,112	153.349.992	489,553,104
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak	-1,681,015	-32.705.346	-34,386,361
Bagian Lancar TPA	0	0	0
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA	0	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
Piutang dari Kegiatan BLU	0	0	0
Penyisihan PTH - Piutang dari Kegiatan BLU	0	0	0
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	0	0	0
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Persediaan	919,297,012	18.795.000	938,092,012
Persediaan yang Belum Diregister	0	0	0
Jumlah Aset Lancar	1,902,255,539	146.575.360	2,048,830,899
ASET TETAP	0	0	0
Tanah	60,334,049,494	0	60,334,049,494
Peralatan dan Mesin	179,867,088,490	131.530.318	179,998,618,808
Gedung dan Bangunan	110,031,274,944	-228.516.640	109,802,758,304
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,598,328,550	0	1,598,328,550
Aset Tetap Lainnya	6,278,012,580	-4.920.547.281	1,357,465,299
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	-149,648,795,699	39.458.948	-149,609,336,751
Aset Konsesi Jasa	0	0	0
Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0	0
Akumulasi Peyusutan Aset Konsesi Jasa	0	0	0
Jumlah Aset Tetap	208,459,958,359	-4.978.074.655	203,481,883,704
PROPERTI INVESTASI	0	0	0
Properti Investasi	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	0	0
Jumlah Properti Investasi	0	0	0
PIUTANG JANGKA PANJANG	0	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	0	0	0
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	763,958,056	0	763,958,056
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	-763,958,056	0	-763,958,056
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	0	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	0	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya (PJPL)	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PJPL	0	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang	0	0	0
ASET LAINNYA	0	0	0
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0

Aset Tak Berwujud	46,778,853,142	-13.402.037.913	33,376,815,229
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	3,075,955,632	12.971.470.413	16,047,426,045
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	3,893,353,386	0	3,893,353,386
Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi	0	0	0
Dana Penjaminan	0	0	0
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	0	0	0
Dana Kelolaan BLU	0	0	0
Aset Lain-lain	2,166,734,560	546.907.620	2,713,642,180
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	0	0	0
Akum. Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	-31,048,816,804	5.626.101.882	-25,422,714,922
Jumlah Aset Lainnya	24,866,079,916	5.742.442.002	30,608,521,918
JUMLAH ASET	235,228,293,814	910.942.707	236,139,236,521
KEWAJIBAN	0	0	0
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	4,185,558,723	-111.268.650	4,074,290,073
Utang Kepada Pihak Ketiga II	0	0	0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	0	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
Hibah Yang Belum Disahkan	0	0	0
Uang Muka dari KPPN	0	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	4,185,558,723	-111.268.650	4,074,290,073
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	0	0	0
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	0	0	0
Kewajiban Konsesi Jasa	0	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN	4,185,558,723	-111.268.650	4,074,290,073
EKUITAS	231,042,735,091	1.022.211.357	232,064,946,448
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	235,228,293,814	910.942.707	236,139,236,521

KERTAS KERJA LAPORAN OPERASIONAL (LO)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

K/L : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
BA : 048

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Cukai	0	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	767,010	0	767,010
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	767,010	0	767,010
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	767,010	0	767,010
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0
Beban Pegawai	146,554,940,595	286.750	146,555,227,345
Beban Persediaan	2,624,125,885	13.926.000	2,638,051,885
Beban Barang dan Jasa	99,805,921,425	-197.871.462	99,608,049,963
Beban Pemeliharaan	14,270,032,681	-32.721.000	14,237,311,681
Beban Perjalanan Dinas	55,813,429,135	0	55,813,429,135
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0
Beban Bunga	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	30,145,334,477	-2.948.787.890	27,196,546,587
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-1,666,591	36.052.952	34,386,361
Beban Transfer	0	0	0
Beban Lain-Lain	0	0	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	349,212,117,607	-3.129.114.650	346,083,002,957
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	-349,211,350,597	3.129.114.650	-346,082,235,947
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	1,374,832,793	0	1,374,832,793
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,523,450,800	0	1,523,450,800
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	148,618,007	0	148,618,007
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	144,833,747	0	144,833,747
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	173,936,983	0	173,936,983
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	29,103,236	0	29,103,236
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,519,666,540	0	1,519,666,540

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-347,691,684,057	3.129.114.650	-344,562,569,407
POS LUAR BIASA	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0
POS LUAR BIASA	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	-347,691,684,057	3.129.114.650	-344,562,569,407

KERTAS KERJA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

K/L : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
BA : 048

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
EKUITAS AWAL	214,047,512,471	0	214,047,512,471
SURPLUS/DEFISIT-LO	-347,691,684,057	3.129.114.650	-344,562,569,407
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	1,559,161	2.813.643.988	2,815,203,149
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	1,559,161	2.810.296.382	2,811,855,543
LAIN-LAIN	0	3.347.606	3,347,606
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	364,685,347,516	-4.920.547.281	359,764,800,235
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	16,995,222,620	1.022.211.357	18,017,433,977
EKUITAS AKHIR	231,042,735,091	1.022.211.357	232,064,946,448

No	SUMMARY	AKUN	DESKRIPSI	MODUL	DEBIT	KREDIT	KETERANGAN	NO MEMO JURNAL
1	JA-01	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	GLP	32,721,000		Jurnal reklasifikasi belanja pemeliharaan yang menghasilkan persediaan pada akhir periode	25/KU.04.06/2026
	JA-01	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	GLP		32,721,000		
	JA-01	117111	Barang Konsumsi	PER	32,721,000			
	JA-01	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	PER		32,721,000		
	JA-01	593111	Belanja Persediaan konsumsi	PER	13,926,000			
	JA-01	117111	Barang Konsumsi	PER		13,926,000		
2	JA-02	522191	Belanja Jasa Lainnya	GLP	898,193,637		(Koreksi atas ketidaktepatan penggunaan MAK atas realisasi belanja pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/eksternal senilai Rp 898.193.637 - Modul GLP)	26/KU.04.06/2026
	JA-02	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	GLP		898,193,637		
3	JA-03	115212	Piutang Lainnya	GLP	79,180,348		Jasa Konsultan AI untuk RB: Nilai awal Rp1.422.681.450, ditemukan selisih non personil Rp79.180.348 (sudah dikembalikan pada TA 2026). Beban sudah diakui secara full pada 2025, akan tetapi diketahui bahwa ada kelebihan pembayaran atas transaksi tersebut, dan belum bisa dikembalikan pada TAB 2025 karna teknis keuangan pada pihak ketiga (UI), sehingga baru bisa dikembalikan pada TA 2026. Harus diakui sebagai pendapatan yang belum di terima pada 2025, dan	27/KU.04.06/2026
	JA-03	522131	Belanja Jasa Konsultan	GLP		79,180,348		
	JA-03	594212	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	GLP	395,202			
	JA-03	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	GLP		395,202		
4	JA-04	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	GLP	7,135,714		Masa manfaat yang masih belum diselesaikan (nihil) atau diterima atas pembayaran jasa advertorial untuk bulan 12 2025 masih tersisa dan dicarry over ke Tahun Anggaran 2026	28/KU.04.06/2026
	JA-04	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	GLP		7,135,714		
5	JA-05	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	GLP	1,681,015		Pencatatan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya atas Kualitas "KURANG LANCAR" 10% dari Nilai Piutang yang masih tercatat pada neraca	29/KU.04.06/2026
	JA-05	594212	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	GLP		1,681,015		
	JA-05	594212	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	GLP	33,620,311			
	JA-05	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	GLP		33,620,311		
6	JA-06	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	GLP	3,347,606		jurnal penyesuaian atas beban penyisihan piutang yang membentuk saldo minus PMK 100/2025	30/KU.04.06/2026
	JA-06	391119	koreksi lainnya	GLP		3,347,606		
7	JA-07	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	GLP	111,555,400		Mengakui beban akrual sebesar 80% sesuai prestasi pekerjaan yang diserahkan	31/KU.04.06/2026
	JA-07	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	GLP		111,555,400		
8	JA-08	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	GLP	17,383,250		Jurnal Balik Kesalahan catat Belanja Pegawai Uang Makan PPPK Desember	32/KU.04.06/2026
	JA-08	511628	Belanja Uang Makan PPPK	GLP		17,383,250		
9	JA-09	511628	Belanja Uang Makan PPPK	GLP	17,670,000		Jurnal Koreksi Belanja Pegawai Uang Makan PPPK Desember 2025 yang	33/KU.04.06/2026
	JA-09	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	GLP		17,670,000		
10	JA-10	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	GLP	440,747,000		" Terdapat pekerjaan perbaikan Gate Barrier, Pemeliharaan Jaringan Access Point (WIFI), dan Pemeliharaan Server senilai Rp440.747.000, menggunakan pagu Belanja Pemeliharaan Jaringan (523133), yang seharusnya secara substansi tergolong	34/KU.04.06/2026
	JA-10	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	GLP		440,747,000		
11	JA-11	313211	Transfer Keluar	AST	4,920,547,281		Pengakuan Transfer Keluar atas ATR ke Kementerian Sekretariat Negara	
	JA-11	135111	Aset Tetap Renovasi	AST		4,920,547,281		
12	JA-12	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	AST	38,331,000		11 unit BMN yang Tidak Ditemukan Keberadaannya (sesuai LHP BPK tahun 2024) Namun Dilakukan Petelangan dan Penghapusan Aset di tahun 2025	
	JA-12	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	AST		38,331,000		
13	JA-13	132111	Peralatan dan Mesin	AST	236,095,880		Input Perolehan Lainnya atas peralatan dan mesin yang berada di Gd. Apartemen Southill Jakarta	35/KU.04.06/2026
	JA-13	133111	Gedung dan Bangunan	AST		236,095,880		
	JA-13	591111	Belanja Penyusutan Peralatan dan Mesin	AST	47,219,176			
	JA-13	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	AST		47,219,176		
	JA-13	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	AST	233,734,920			
	JA-13	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	AST		233,734,920		
	JA-13	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	AST	4,721,920			
	JA-13	591211	Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan	AST		4,721,920		
	JA-13	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	AST	2,360,960			
	JA-13	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	AST		2,360,960		
	JA-13	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	GLP	236,095,880			
	JA-13	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	GLP		236,095,880		
14	JA-14	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	AST	430,567,500		14 ATB software yang sudah tidak digunakan, ubah status menjadi hentiguna	
	JA-14	162151	Software	AST		430,567,500		
	JA-14	169315	Akumulasi Amortisasi Software	AST	430,567,500			
	JA-14	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	AST		430,567,500		
15	JA-15	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	AST	68,200,000		Aset Rusak Berat Yang Sudah Tidak Digunakan berupa 3 pompa	

No	SUMMARY	AKUN	DESKRIPSI	MODUL	DEBIT	KREDIT	KETERANGAN	NO MEMO JURNAL
	JA-15	132111	Peralatan dan Mesin	AST		68,200,000		
	JA-15	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	AST	68,200,000			
	JA-15	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	AST		68,200,000		
16	JA-16	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	AST	197,427,253		Terdapat kesalahan penginputan terhadap penambahan jumlah aset tetap gedung bangunan yang seharusnya adalah hanya menambah nilai aset induk, berupa Gedung	
	JA-16	133111	Gedung dan Bangunan	AST		197,427,253		
	JA-16	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	AST	3,948,546			
	JA-16	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	AST		3,948,546		
17	JA-17	133111	Gedung dan Bangunan	AST	197,427,253		Terdapat kesalahan penginputan terhadap penambahan jumlah aset tetap gedung bangunan yang seharusnya adalah hanya menambah nilai aset induk, berupa Gedung	
	JA-17	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	AST		197,427,253		
	JA-17	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	AST	14,101,947			
	JA-17	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	AST		14,101,947		
18	JA-18	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	AST	31,943,762		Koreksi nilai aset berupa sound system dan video switcher yang atas pemeriksaan terdapat kekurangan volume, dilakukan pengembalian pada TA 2026 dengan NTPN 30D643CIG6LCF641 dan NTPN 18999868FGUU368H	
	JA-18	132111	Peralatan dan Mesin	AST		31,943,762		
	JA-18	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	AST	5,592,821			
	JA-18	591111	Belanja Penyusutan Peralatan dan Mesin	AST		5,592,821		
	JA-18	115212	Piutang Lainnya	GLP	31,943,762			36/KU.04.06/2026
	JA-18	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	GLP		31,943,762		
	JA-18	594212	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	GLP	159,719			
	JA-18	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	GLP		159,719		
19	JA-19	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	AST	42,225,882			
	JA-19	133111	Gedung dan Bangunan	AST		42,225,882		
	JA-19	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	AST	728,033		Koreksi nilai aset berupa renovasi toilet wanita lt 6 Gd. Senayan yang atas pemeriksaan terdapat kekurangan volume, sudah dilakukan pengembalian dengan NTPN 549960NAOMU9HTC6	
	JA-19	591211	Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan	AST		728,033		
	JA-19	115212	Piutang Lainnya	GLP	42,225,882			37/KU.04.06/2026
	JA-19	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	GLP		42,225,882		
	JA-19	594212	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	GLP	211,129			
	JA-19	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	GLP		211,129		
20	JA-20	132111	Peralatan dan Mesin	AST	515,769,200		Aset Yang Sudah Usul Hapus Namun Tidak Masuk Dokumen Manapun, sehingga dilakukan batal usul hapus dan ubah kondisi menjadi baik, karena masih digunakan dalam kondisi baik. berupa papan gambar dan note book	
	JA-20	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	AST		515,769,200		
	JA-20	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	AST	499,366,075			
	JA-20	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	AST		499,366,075		
	JA-20	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	AST	499,366,075			
	JA-20	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	AST		499,366,075		
	JA-20	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	AST	3,280,625			
	JA-20	592222	Belanja Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	AST		3,280,625		
	JA-20	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	AST	16,403,125			
	JA-20	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	AST		16,403,125		
21	JA-21	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	AST	24,824,120		Aset Yang Sudah Usul Hapus Namun Tidak Masuk Dokumen Manapun, kondisi rusak berat.	
	JA-21	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	AST		24,824,120		
22	JA-22	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	AST	10,224,131,613		Koreksi pencatatan atas ATB Dalam Pengerjaan yang sudah terlanjur tercatat menjadi aset definitif (software), sehingga dikembalikan ke ATB dalam pengerjaan	
	JA-22	162151	Software	AST		10,224,131,613		
	JA-22	169315	Akumulasi Amortisasi Software	AST	2,995,103,202			
	JA-22	592115	Belanja Amortisasi Software	AST		2,995,103,202		
	JA-22	169315	Akumulasi Amortisasi Software	AST	2,747,338,800			
	JA-22	162151	Software	AST		2,747,338,800		
23	JA-23	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	AST	12,971,470,413		Koreksi pencatatan atas ATB Dalam Pengerjaan yang sudah terlanjur tercatat	
	JA-23	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	AST		12,971,470,413		
24	JA-24	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	AST	2,331,000		Koreksi mandiri tim SAI: atas double pencatatan pembelian aset berupa external/portable harddisk	
	JA-24	132111	Peralatan dan Mesin	AST		2,331,000		
	JA-24	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	AST	291,375			
	JA-24	591111	Belanja Penyusutan Peralatan dan Mesin	AST		291,375		
25	JA-25	133111	Gedung dan Bangunan	AST	49,805,122		Koreksi Inspektorat: Penambahan nilai aset berupa pagar Gedung Pekayon	
	JA-25	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	AST		49,805,122		
	JA-25	591211	Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan	AST	3,557,509			
	JA-25	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	AST		3,557,509		
26	JA-26	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	AST	15,015,000		Henti Guna - Usul Hapus - Hapus berupa sedan	
	JA-26	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	AST		15,015,000		
27	JA-27	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	AST	517,860,000		Usul Hapus - Hapus berupa P.C Unit	
	JA-27	132111	Peralatan dan Mesin	AST		517,860,000		
	JA-27	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	AST	517,860,000			

No	SUMMARY	AKUN	DESKRIPSI	MODUL	DEBIT	KREDIT	KETERANGAN	NO MEMO JURNAL
	JA-27	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	AST		517,860,000		
	JA-27	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	AST	517,860,000			
	JA-27	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	AST		517,860,000		
			TOTAL		41,096,488,743	41,096,488,743		

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

K/L : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 BA : 048

URAIAN	REALISASI UNAUDITED	KOREKSI		REALISASI AUDITED
		DEBIT	KREDIT	
1	2	3	4	5
Pendapatan Perpajakan	-			-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,022,002,726	-	-	2,022,002,726
Pendapatan Sumber Daya Alam	-			-
Pendapatan dari KND	-			-
Pendapatan BLU	-			-
Pendapatan PNBP Lainnya	2,022,002,726			2,022,002,726
Pendapatan Hibah	-			-
TOTAL PENDAPATAN	2,022,002,726	-	-	2,022,002,726
Belanja Pegawai	146,527,426,345		-	146,527,426,345
Belanja Barang dan Jasa	129,681,594,836			129,681,594,836
Belanja Modal	31,602,464,717			31,602,464,717
Belanja Pembayaran Bunga Utang	-			-
Belanja Subsidi	-			-
Belanja Hibah	-			-
Belanja Bantuan Sosial	-			-
Belanja Belanja Lain-lain	-			-
TOTAL BELANJA	307,811,485,898	-	-	307,811,485,898
Dana Bagi Hasil	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum	-			-
Dana Alokasi Khusus	-			-
Dana Otonomi Khusus	-			-
Dana Keistimewaan DIY	-			-
Dana Desa	-			-
Insentif Fiskal	-			-
TOTAL TKD	-	-	-	-
Pembiayaan Dalam Negeri	-	-	-	-
Pembiayaan Luar Negeri	-			-
TOTAL PEMBIAYAAN	-	-	-	-

Jakarta, Mei 2026
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi

Kementerian Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan

Sri Susanti
 Kepala Bagian Keuangan dan
 Penatausahaan BMN

Joko Supriyanto
 Kepala Subdirektorat
 Bimbingan Akuntansi Instansi
 dan Bendahara Umum Negara

Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi
 Kepala Subdirektorat Pemeriksaan
 III.D1

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

K/L : KEMENTERIAN PANRB
BA : 048.01.427950

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Modal Dibayar di Muka (prepaid)	648,436,430	7,135,714		655,572,144
Piutang Bukan Pajak	336,203,112	153,349,992		489,553,104
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(1,681,015)	1,681,015	34,386,361	(34,386,361)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	334,522,097			334,522,097
Persediaan	919,297,012	32,721,000	13,926,000	938,092,012
Jumlah Aset Lancar	1,902,255,539			2,048,830,899
ASET TETAP				-
Tanah	60,334,049,494			60,334,049,494
Peralatan dan Mesin	179,867,088,490	751,865,080	620,334,762	179,998,618,808
Gedung dan Bangunan	110,031,274,944	247,232,375	475,749,015	109,802,758,304
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,598,328,550			1,598,328,550
Aset Tetap Lainnya	6,278,012,580		4,920,547,281	1,357,465,299
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(149,648,795,699)	591,944,196	546,585,251	(149,603,436,754)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	11,759,459	17,659,456	(5,899,997)
Jumlah Aset Tetap	208,459,958,359			203,481,883,704
PIUTANG JANGKA PANJANG				-
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	763,958,056			763,958,056
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(763,958,056)			(763,958,056)
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-			-
ASET LAINNYA				-
Aset Tak Berwujud	46,778,853,142		13,402,037,913	33,376,815,229
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	3,075,955,632	12,971,470,413		16,047,426,045
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	3,893,353,386			3,893,353,386
Aset Lain-lain	2,166,734,560	1,595,551,820	1,048,644,200	2,713,642,180
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	-			-
Akum. Penyusutan AT yg TDK digunakan	(288,682,500)	1,032,241,075	1,148,581,195	(405,022,620)
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(28,898,274,317)	6,173,009,502		(22,725,264,815)
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1,861,859,987)		430,567,500	(2,292,427,487)
Jumlah Aset Lainnya	24,866,079,916			30,608,521,918
JUMLAH ASET	235,228,293,814			236,139,236,521
KEWAJIBAN				-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				-
Utang kepada Pihak Ketiga	4,185,558,723	128,938,650	17,670,000	4,074,290,073
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	4,185,558,723			4,074,290,073
JUMLAH KEWAJIBAN	4,185,558,723	-	-	4,074,290,073
EKUITAS	231,042,735,091			232,064,946,448
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	235,228,293,814			236,139,236,521

Jakarta, Mei 2026
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kementerian Keuangan

Sri Susanti
Kepala Bagian Keuangan dan Penatausahaan BMN

Joko Supriyanto
Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara

Ditjen Kekayaan Negara

Badan Pemeriksa Keuangan

Darnadi
Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara II

Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi
Kepala Subdirektorat Pemeriksaan III.D1

Selisih Ekuitas Neraca vs LPE -
Neraca Tidak Balance -

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

K/L : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
BA : 048.427950

URAIAN	UNAUDITED	KOREKSI BPK DAN MANDIRI		ASERSI FINAL	Ref
		DEBET	KREDIT		
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN PERPAJAKAN					
Pendapatan Pajak Penghasilan					
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah					
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan					
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Pendapatan Cukai					
Pendapatan Pajak Lainnya					
Pendapatan Bea Masuk					
Pendapatan Bea Keluar					
Jumlah Pendapatan Perpajakan					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Penerimaan Sumber Daya Alam					
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	767,010			767,010	
Pendapatan Badan Layanan Umum					
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	767,010	-	-	767,010	
PENDAPATAN HIBAH					
Pendapatan Hibah					
Jumlah Pendapatan Hibah					
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	767,010	-	-	767,010	
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	146,554,940,595	17,670,000	17,383,250	146,555,227,345	8;9
Beban Persediaan	2,624,125,885	13,926,000		2,638,051,885	1;
Beban Barang dan Jasa	99,805,921,425	898,193,637	1,096,065,099	99,608,049,963	2;4;7
Beban Pemeliharaan	14,270,032,681	440,747,000	473,468,000	14,237,311,681	1;10
Beban Perjalanan Dinas	55,813,429,135			55,813,429,135	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda				-	
Beban Pembayaran Bunga Utang				-	
Beban Subsidi				-	
Beban Hibah				-	
Beban Bantuan Sosial				-	
Beban Transfer ke Daerah				-	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	30,145,334,477	64,878,632	3,013,666,522	27,196,546,587	13;16;17;18;19;20;22;24;25
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1,666,591)	37,733,967	1,681,015	34,386,361	3;5;6;18;19
Beban Lain-lain					
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	349,212,117,607			346,083,002,957	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(349,211,350,597)			(346,082,235,947)	
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,523,450,800			1,523,450,800	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	148,618,007			148,618,007	
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	1,374,832,793	-	-	1,374,832,793	
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang					
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang					
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang					
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		268,816,880	268,816,880	-	1;3;13
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	173,936,983			173,936,983	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	29,103,236			29,103,236	
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	144,833,747			144,833,747	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,519,666,540			1,519,666,540	
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa					
Beban Luar Biasa					
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA					
SURPLUS/(DEFISIT) LO	(347,691,684,057)			(344,562,569,407)	

Jakarta, Mei 2026
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kementerian Keuangan

Sri Susanti
Kepala Bagian Keuangan dan Penatausahaan BMN

Joko Supriyanto
Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara

Ditjen Kekayaan Negara

Badan Pemeriksa Keuangan

Darnadi
Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara II

Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi
Kepala Subdirektorat Pemeriksaan III.D1

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

K/L : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 BA : 048.427950

URAIAN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
EKUITAS AWAL	214,047,512,471			214,047,512,471
SURPLUS/DEFISIT LO	(347,691,684,057)			(344,562,569,407)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS				
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	1,559,161	10,735,075,055	13,545,371,437	2,811,855,543
Koreksi Lain-lain	-		3,347,606	3,347,606
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	1,559,161			2,815,203,149
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	364,685,347,516	4,920,547,281		359,764,800,235
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	16,995,222,620			18,017,433,977
EKUITAS AKHIR	231,042,735,091			232,064,946,448

Jakarta, Mei 2026
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kementerian Keuangan

Sri Susanti
 Kepala Bagian Keuangan dan Penatausahaan BMN

Joko Supriyanto
 Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan
 Bendahara Umum Negara

Ditjen Kekayaan Negara

Badan Pemeriksa Keuangan

Darnadi
 Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara II

Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi
 Kepala Subdirektorat Pemeriksaan III.D1

Lampiran 19. Rincian Pengembalian Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025

Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	NTPN	Tanggal Bayar	Nominal
Akun 524111 (Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa)				
1	Pengembalian Belanja SPM 00622 SP2D 251331301009511_PROTOKOLER	4DB3F7NAS8CEJDTA	11-06-2025	1.804
2	Pengembalian Belanja SPM 00163 SP2D 251331301002773_PROTOKOLER	B190D0JUTJPBBDU5	11-06-2025	457.366
3	Pengembalian Belanja SPM 00922 SP2D 251331301013861_BALAK	2A9A17NAS8IDDT38	30-06-2025	2.649.088
4	Pengembalian Belanja SPM 00754 SP2D 251331301011764_TDP	055FA2CPT9P83PT5	7/1/2025	588.500
5	Pengembalian Belanja SPM 00454 SP2D 251331301006980_uang taksi dalam kota atas nama	349E76QTCCEL64R04	7/1/2025	34.500
6	Pengembalian Belanja SPM 01669 SP2D 259991310118807_YANLIK	A0015397D4CH5FP8	7/4/2025	2.995.120
7	Pengembalian Belanja SPM 00578 SP2D 251331301008985_Biaya seat penerbangan	EE486522CP16J706	7/7/2025	110.002
8	Pengembalian Belanja SPM 01025 SP2D 251331301014956_TDP	DE90E397D4FGIG5Q	7/14/2025	1.922.900
9	Pengembalian Belanja SPM 00808 SP2D 251331301012479_PROTOKOLER	6B8F7522CPK9CEJ9	7/14/2025	156.520
10	Pengembalian Belanja SPM 01023 SP2D 251331301014954_TDP	2B080397D4FGIEB6	7/14/2025	2.986.940
11	Pengembalian Belanja SPM 01668 SP2D 259991310118808_YANLIK	FA8E80JUTKRAOAV3	7/28/2025	3.565.842
12	Pengembalian Belanja SPM 01939 SP2D 259991310256488_SDMOH_double SPJ	837057NASA6917I6	8/4/2025	1.326.939
13	Pengembalian Belanja SPM 00342 SP2D 251331701000075_STAF AHLI	8208A397D5AB06VF	8/4/2025	129.087
14	Pengembalian Belanja SPM 01024 SP2D 251331301014953_TDP	7F4BC397D5CNAV8T	8/15/2025	2.015.100
15	Pengembalian Belanja SPM 00952 SP2D 251331301014066_BALAK	85C5A6QTCGHCUEME	9/3/2025	165.252
16	Pengembalian Belanja SPM 01263 SP2D 251331301017610_BALAK	0C6B9397D67RAEOD	9/3/2025	69.280
17	Pengembalian Belanja SPM 01451 SP2D 251331301019744_BALAK	A4A287NASB3PBEP6	9/3/2025	462.500
18	Pengembalian Belanja SPM 01614 SP2D 259991310112334_BALAK	7A946397D67RAEPT	9/9/2025	8.870
19	Pengembalian Belanja SPM 01614 SP2D 259991310112334_BALAK	614870JUTMGM3EQL	9/9/2025	1.834.068
20	Pengembalian Belanja SPM 00967 SP2D 251331301014251_BALAK	C93912CPTBNHMMIR	9/10/2025	560.258
21	Pengembalian Belanja SPM 01451 SP2D 251331301019744_BALAK	0856F2CPTBPKFN3U	9/18/2025	85.684
22	Pengembalian Belanja SPM 01566 SP2D 259991310076712_BALAK	3D9E82CPTBPKFN49	9/18/2025	459.804
23	Pengembalian Belanja SPM 01566 SP2D 259991310076712_BALAK	9B806397D6CAE467	9/18/2025	712.636
24	Pengembalian Belanja SPM 01451 SP2D 251331301019744_BALAK	6494F397D6C0SN3H	9/21/2025	93.861
25	Pengembalian Belanja SPM 01165 SP2D 251331301016533_BALAK	FC9C45UFSM4VBDA	9/23/2025	10.470

Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	NTPN	Tanggal Bayar	Nominal
Akun 524111 (Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa)				
26	Pengembalian Belanja SPM 01245 SP2D 251331301017235_BALAK	A844D8JOC5S4IDBV	9/23/2025	1.796
27	Pengembalian Belanja SPM 01139 SP2D 251331301016306_BALAK	AD89245KT10G2O3S	9/25/2025	54.640
28	Pengembalian Belanja SPM 01139 SP2D 251331301016306_BALAK	9389E397D6E3LO4F	9/25/2025	41.940
29	Pengembalian Belanja SPM 02184 SP2D 259991310340506 PROTOKOLER	F988B7NASBAB8A4I	9/29/2025	641.416
30	Pengembalian Belanja SPM 01648 SP2D 259991310112342_BALAK	5905F6QCTCHH01QLP	10/9/2025	1.414.260
31	Pengembalian Belanja SPM 03296 SP2D 259991310767434_RB1	2E1486QCTCHH9JA4F	10/10/2025	1.905.008
32	Pengembalian Belanja SPM 02646 SP2D 259991310544557_PROTOKOLER	CE0D0397D79H71HP	10/16/2025	63.111
33	Pengembalian Belanja SPM 02784 SP2D 259991310614118_RBKUNWAS	798A78JOC6NRL1NJ	10/16/2025	1.025.715
34	Pengembalian Belanja SPM 02785 SP2D 259991310614117_RBKUNWAS	537062CPTCN4Q1O0	10/16/2025	1.384.230
35	Pengembalian Belanja SPM 2653 SP2D 259991310544551 (RB)_ Translok a.n. Perjadin ke	888B32CPTCPH47N2	10/24/2025	3.040.221
36	Pengembalian Belanja SPM 01614 SP2D 259991310112334_BALAK	192EA7NASC8O5UVU	10/27/2025	2.321.232
37	Pengembalian Belanja SPM 01614 SP2D 259991310112334_BALAK	FECA97NASC8O5V2E	10/27/2025	95.189
38	Pengembalian Belanja SPM 03488 SP2D 259991310805462_KIP	9C2068JOC6S186NJ	11/5/2025	1.424.760
39	Pengembalian Belanja SPM 03489 SP2D 259991310796749_KIP	634F97NASC9KR6OQ	11/5/2025	2.774.620
40	Pengembalian Belanja SPM 03356 SP2D 259991310767436_TDP	38F5E6QCTCHN8E6QV	11/6/2025	3.928.510
41	Pengembalian Belanja SPM 03198 SP2D 259991310723910_PERSURATAN	56D7D8JOC7IC121J	11/5/2025	1.005.856
42	Pengembalian Belanja SPM 02914 SP2D 259991310649476_TDP	DBAB27NASD1FRS9K	11/10/2025	1.053.840
43	Pengembalian Belanja SPM 03392 SP2D 259991310774163_TDP	48E72522CTAAKSAF	11/10/2025	924.000
44	Pengembalian Belanja SPM 03174 SP2D 259991310723911_TDP	F88BC2CPTDJ5DSB0	11/10/2025	1.478.001
45	Pengembalian Belanja SPM 02865 SP2D 259991310633407_TDP	C9ECB0JUTOECK1I4	11/10/2025	1.428.130
46	Pengembalian Belanja SPM 03356 SP2D 259991310767436_TDP	AC50E7NASD1FS1J0	11/10/2025	783.230
47	Pengembalian Belanja SPM 03356 SP2D 259991310767436_TDP	E45C76QTCIF3F1JT	11/10/2025	994.730
48	Pengembalian Belanja SPM 01759 SP2D 259991310189628_BALAK	675DC1GCDJ0P0QQ7	11/10/2025	616.780
49	Pengembalian Belanja SPM 01757 SP2D 259991310189629_BALAK	9BF615UFSNTA4UG8	11/13/2025	512.595
50	Pengembalian Belanja SPM 03394 SP2D 259991310779878_PROTOKOLER	4327D6QTCIFMHUGJ	11/17/2025	564.300
51	Pengembalian Belanja SPM 03389 SP2D 259991310774164_TDP Denpasar 7-10 Oktober a.n	71633522CTCDEBQH	11/23/2025	5.964.406
52	Pengembalian Belanja SPM 03393 SP2D 259991310774162_TDP Denpasar 8-10 Oktober a.n	ED3DF5UFSNUPRBR6	11/17/2025	3.631.860
53	Pengembalian Belanja SPM 03936 SP2D 259991310941052_KIP Perjadin Sigi a.n NANI	781E8397D88QPPSR	11/23/2025	1.148.000
54	Pengembalian Belanja SPM 02486 SP2D 259991310487192_PROTOKOLER	976721GCDJ4UJD4D	11/24/2025	72.202
55	Pengembalian Belanja SPM 03948 SP2D 259991310941056_YANLIK	37E4A2CPTDNB0JAS	11/27/2025	1.424.500
56	Pengembalian Belanja SPM 04071 SP2D 259991311005519_YANLIK	4180B6QTCIK5MNMQT	11/27/2025	85.000
57	Pengembalian Belanja SPM 03879 SP2D 259991310928109_RBKUNWAS	93619397D90VCNUR	12/5/2025	40.012
58	Pengembalian Belanja SPM 03904 SP2D 259991310933261_RBKUNWAS	B88BB5UFSOO4JNVI	12/5/2025	2.807.620
59	Pengembalian Belanja SPM 03492 SP2D 259991310796748_RBKUNWAS	848327NASDSTDO2O	12/5/2025	5.417.875
60	Pengembalian Belanja SPM 03019 SP2D 259991310674885_PERSURATAN	6B5B78JOC8G6F2FL	12/5/2025	1.081.400
61	Pengembalian Belanja SPM 04540 SP2D 259991311176344_MKKS	622AF1GCDJT3738N	12/8/2025	11.512.103
62	Pengembalian Belanja SPM 04539 SP2D 259991311187765_MKKS	C0BF5522CU6KR39F	12/8/2025	10.787.320
63	Pengembalian Belanja SPM 04490 SP2D 259991311129002_MKKS	C75A245KT3K8E3AC	12/8/2025	8.692.815
64	Pengembalian Belanja SPM 04489 SP2D 259991311129003_MKKS	CDF32397D91S13AV	12/8/2025	12.392.233
65	Pengembalian Belanja SPM 04538 SP2D 259991311176345_MKKS	2A7B61GCDJT373BR	12/8/2025	12.203.417

Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	NTPN	Tanggal Bayar	Nominal
Akun 524111 (Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa)				
66	Pengembalian Belanja SPM 04538 SP2D 2599913111763455_MKKS (Kekurangan)	F975E6QTCJCA8T1T	12/8/2025	600.000
67	Pengembalian Belanja SPM 03396 SP2D 259991310774161_TDP	249062CPTGEC7TB4	12/8/2025	1.063.000
68	Pengembalian Belanja SPM 03175 SP2D 259991310725259_TDP Makassar 24-27 Sept a.n	72ADC0JUTPBJDTFO	12/8/2025	1.279.491
69	Pengembalian Belanja SPM 03111 SP2D 259991310693353_TDP Makassar 25-27 Sept a.n	8644F522CU7HETL7	12/8/2025	365.800
70	Pengembalian Belanja SPM 02557 SP2D 259991310502848_TDP Penajam Paser Utara a.n	B947D397D92OKTO9	12/8/2025	575.300
71	Pengembalian Belanja SPM 03776 SP2D 259991310893944_TDP Jayapura 19-24 Oktober a.n	6853245KT3L51TU8	12/8/2025	6.478.986
72	Pengembalian Belanja SPM 02541 SP2D 259991310490980_TDP Penajam Paser Utara 28 - 30	4AAAF0JUTPBJDU2G	12/8/2025	387.550
73	Pengembalian Belanja SPM 03074 SP2D 259991310688331_TDP Makassar 25-27 September	1983C1GCDJTVQU77	12/8/2025	3.146.600
74	Pengembalian Belanja SPM 03937 SP2D 259991310941057_KIP Perjadin Sigi a.n AHMAD	2D3305UFSOPTS0V6	12/8/2025	1.314.830
75	Pengembalian Belanja SPM 02201 SP2D 259991310355141_TDP Bantul 5-6 Agustus a.n	626727NASDUMM180	12/8/2025	2.511.168
76	Pengembalian Belanja SPM 02201 SP2D 259991310355141_TDP Bantul 5-6 Agustus a.n	BDDAA522CU7HF1P3	12/8/2205	990.000
77	Pengembalian Belanja SPM 02756 SP2D 259991310592750_SDMA	D4C6B397D92OL2D1	12/8/2025	2.686.660
78	Pengembalian Belanja SPM 03159 SP2D 259991310716807_SDMA	6212B397D92OL2F7	12/9/2025	3.094.000
79	Pengembalian Belanja SPM 03160 SP2D 259991310710203_SDMA	48B6A5UFSOQ7DBA4	12/9/2025	3.317.024
80	Pengembalian Belanja SPM 04594 SP2D 259991311176343_MKKS	ADBDD397D9326BHR	12/9/2025	6.179.105
81	Pengembalian Belanja SPM 04199 SP2D 259991311047339_TDP Ternate 9-12 November a.n	737A6397D9326CLF	12/9/2025	2.258.740
82	Pengembalian Belanja SPM 04146 SP2D 259991311045609_RTP Makassar 10-12 Nov a.n	72E490JUTPBSVDFK	12/9/2025	1.589.600
83	Pengembalian Belanja SPM 04147 SP2D 259991311045608_RTP Makassar 10-12 Nov a.n A.	CF8460JUTPBSVDG8	12/9/2025	523.241
84	Pengembalian Belanja SPM 02715 SP2D 259991310555550_BALAK	4364A1GCDJU9CF3H	12/9/2025	1.248.695
85	Pengembalian Belanja SPM 02715 SP2D 259991310555550_BALAK	51E611GCDJU9CF45	12/9/2025	1.824.935
86	Pengembalian Belanja SPM 03127 SP2D 259991310710201_BALAK	DB9E80JUTPBSVF52	12/9/2025	69.550
87	Pengembalian Belanja SPM 02715 SP2D 259991310555550_BALAK	8617C397D9326GNF	12/9/2025	972.080
88	Pengembalian Belanja SPM 02791 SP2D 259991310597956_YANLIK Kelebihan	A1D857NASDV9OV2C	12/10/2025	7.008.900
89	Pengembalian Belanja SPM 03397 SP2D 259991310774160_TDP Denpasar 7-10 Sept a.n	24CC26QTCJCJQCJ3	12/12/2025	3.837.118
90	Pengembalian Belanja SPM 02487 SP2D 259991310507059_BALAK	C64805UFSOR420GK	12/15/2025	143.901
91	Pengembalian Belanja SPM 02487 SP2D 259991310507059_BALAK	DEA897NASDVSS0JG	12/12/2025	1.066.180
92	Pengembalian Belanja SPM 03436 SP2D 259991310796753_SDMA	964BA45KT3N7RT8I	12/15/2025	2.719.708
93	Pengembalian Belanja SPM 04052 SP2D 259991311002026_TDP Bangli 3-4 November a.n	778390JUTPDM7VB0	12/15/2025	72.471
94	Pengembalian Belanja SPM 02633 SP2D 259991310527283_BALAK	2936A45KT3N7RVDA	12/15/2025	658.180
95	Pengembalian Belanja SPM 04490 SP2D 259991311129002_MKKS Kelebihan	7BE021GCDK02KVVB	12/15/2025	1.020.000
96	Pengembalian Belanja SPM 03498 SP2D 259991310827396_BALAK	931D36QTCJEMKE17	12/16/2025	65.667
97	Pengembalian Belanja SPM 03498 SP2D 259991310827396_BALAK	4CA221GCDK0C6E2J	12/16/2025	13.000
98	Pengembalian Belanja SPM 03498 SP2D 259991310827396_BALAK	2CAD1522CU9TQE65	12/16/2025	86.698
99	Pengembalian Belanja SPM 03771 SP2D 259991310902787_BALAK	3E9937NASE131ECG	12/16/2025	2.002.649
100	Pengembalian Belanja SPM 02487 SP2D 259991310507059_BALAK	0855A397D9550F8F	12/16/2025	892.597
101	Pengembalian Belanja SPM 03493 SP2D 259991310805356_BALAK	B7D6C2CPTJEJ252CK	12/17/2025	363.284
102	Pengembalian Belanja SPM 05028 SP2D 259991311308396_KIP	4A26445KT3NQV3SQ	12/17/2025	2.581.500
103	Pengembalian Belanja SPM 04867 SP2D 259991311246040_PRTOKOL (Kelebihan SPJ Hotel	DFEDD0JUTPEISF5K	12/18/2025	1.435.738
104	Pengembalian Belanja SPM 03563 SP2D 259991310840560_BALAK	C14A68JOC8K2HFLH	12/18/2025	489.799
105	Pengembalian Belanja SPM 02715 SP2D 259991310555550_SDMA	6B68F5UFSOT6S276	12/19/2025	7.137.700
106	Pengembalian Belanja SPM 4668 SP2D 259991311187866_BALAK	BA1C6397D9503IUB	12/18/2025	849.500
107	Pengembalian Belanja SPM 03067 SP2D 259991310684440_BALAK	309C97NASE1VM44Q	12/19/2025	952.253

Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	NTPN	Tanggal Bayar	Nominal
Akun 524111 (Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa)				
108	Pengembalian Belanja SPM 5004 SP2D 259991311288993_BALAK	9DE9E0JUTPESE56U	12/19/2025	25.050
109	Pengembalian Belanja SPM 03203 SP2D 259991310725260_BALAK	3A5F0522CUB40EA1	12/21/2025	1.681.914
110	Pengembalian Belanja SPM 03668 SP2D 259991310876729_BALAK	133C20JUTPF5VEA6	12/20/2025	2.961.023
111	Pengembalian Belanja SPM 4473 SP2D 259991311136464_BALAK	C97302CPTJEJUPEA8	12/20/2025	81.030
112	Pengembalian Belanja SPM 04505 SP2D 259991311145891_KIP	340BB2CPTK8AKV2	12/21/2025	1.114.500
113	Pengembalian Belanja SPM 04504 SP2D 259991311134726_KIP	1ABC51GCDK1RTKVB	12/21/2025	1.110.263
114	Pengembalian Belanja SPM 4668 SP2D 259991311187866_BALAK	7DD8D397D96U9AM3	12/23/2025	797.000
115	Pengembalian Belanja SPM 4665 SP2D 259991311187768_BALAK	A17DE522CUBN3AMF	12/23/2025	2.068
116	Pengembalian Belanja SPM 04052 SP2D 259991311002026_TDP Bangli 3-4 November a.n	58EB9397D96U9AN1	12/23/2025	556.005
117	Pengembalian Belanja SPM 04969 SP2D 259991311308393_KIP	380996QTCJG6BKUT	12/23/2025	832.040
118	Pengembalian Belanja SPM 03582 SP2D 259991310840566_BALAK	649C4397D977QPRD	12/23/2025	2.220.380
119	Pengembalian Belanja SPM 03355 SP2D 259991310757902_BALAK	660AD7NASE35RPT4	12/23/2025	3.505.580
120	Pengembalian Belanja SPM 03067 SP2D 259991310684440_BALAK	C6AFE0JUTPG2JRHM	12/23/2025	3.852.003
121	Kekurangan Pengembalian Belanja SPM 03856 SP2D 259991310928104_BALAK	2261845KT3PK7RIE	12/23/2025	10.000
122	Pengembalian Belanja SPM 03355 SP2D 259991310757902_BALAK	D687D7NASE35RRLC	12/23/2025	3.578.537
123	Pengembalian Belanja SPM 03130 SP2D 259991310701097_BALAK	2581D8JOC8LRQ715	12/24/2025	359.850
124	Pengembalian Belanja SPM 03856 SP2D 259991310928104_BALAK	3BBC55UFSOUMJ8QS	12/24/2025	14.176
125	Pengembalian Belanja SPM 04264 SP2D 259991311080187_BALAK	9A73045KT3PTP91M	12/24/2025	921.790
126	Pengembalian Belanja SPM 4396 SP2D 259991311119851_BALAK	600D0397D97HCFM5	12/24/2025	101.459
127	Pengembalian Belanja SPM 03237 SP2D 259991310734398_RTP DIY 2-4 Oktober a.n	38B46522CUCA6FQ9	12/24/2025	6.000
128	Pengembalian Belanja SPM 4509 SP2D 259991311155708_BALAK	BF5F2397D97HCFSN	12/24/2025	1.714.000
129	Pengembalian Belanja SPM 03771 SP2D 259991310902787_BALAK	F28BC397D97HCFUJ	12/24/2025	4.336.912
130	Pengembalian Belanja SPM 03702 SP2D 259991310876728_PROTOKOLER	69CA61GCDK2OIIAP	12/24/2025	227.380
131	Pengembalian Belanja SPM 03666 SP2D 259991310885564_SDMA	84D5F6QTCJHM3299	12/27/2025	41.711.088
132	Pengembalian Belanja SPM 04233 SP2D 259991311106001_SDMA	248492CPTTELO229E	12/27/2025	1.020.080
133	Pengembalian Belanja SPM 05546 SP2D 259991311443164_SDMA	1CB4A7NASE42G29K	12/27/2025	677.000
134	Pengembalian Belanja SPM 05825 SP2D 259991311456175_SDMA	936E30JUTPGV82A0	12/27/2025	2.628.498
135	Pengembalian Belanja SPM 5622 SP2D 259991311441096_MKKS	8BC5D522CUCT92D9	12/27/2025	1.358.287
136	Pengembalian Belanja SPM 4825 SP2D 259991311254867_BALAK	939507NASE42G2JU	12/27/2025	269.659
137	Pengembalian Belanja SPM 04177 SP2D 259991311054890_BALAK	498907NASE42G2K8	12/27/2025	3.231.960
138	Pengembalian Belanja SPM 4509 SP2D 259991311155708_BALAK	9B559397D984F2KN	12/27/2025	2.809.400
139	Pengembalian Belanja SPM 03582 SP2D 259991310840566_BALAK	607E57NASE42G2KS	12/27/2025	438.380
140	Pengembalian Belanja SPM 4509 SP2D 259991311155708_BALAK	1921B522CUCT92L3	12/27/2025	3.378.492
141	Pengembalian Belanja SPM 05776 SP2D 259991320857134_KIP	B75C98JOC8MET2ND	12/27/2025	530.000
142	Pengembalian Belanja SPM 05259 SP2D 259991311372516_KIP	DD6581GCDK3BL2NF	12/27/2025	109.000
143	Pengembalian Belanja SPM 05798 SP2D 259991311456259_KIP	DD954397D984F2NH	12/27/2025	701.250
144	Pengembalian Belanja SPM 05799 SP2D 259991311456258_KIP	A1B125UFSOV9M2NK	12/27/2025	892.750
145	Pengembalian Belanja SPM 05141 SP2D 259991311436448_KIP	61C6C6QTCJHM32NV	12/27/2025	1.543.720
146	Pengembalian Belanja SPM 05464 SP2D 259991311411445_KIP	AD1760JUTPGV82NE	12/29/2025	970.000
147	Pengembalian Belanja SPM 05144 SP2D 259991311342224_KIP	FDCC88JOC8MET2NN	12/28/2025	32.360

Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	NTPN	Tanggal Bayar	Nominal
Akun 524111 (Pengembalian Belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa)				
148	Pengembalian Belanja SPM 05143 SP2D 259991311342221_KIP	0252D397D984F2NR	12/28/2025	507.190
149	Pengembalian Belanja SPM 04255 SP2D 259991311101391_KIP	D46E71GCDK3BL2O3	12/29/2025	1.058.045
150	Pengembalian Belanja SPM 05388 SP2D 259991311404364_MKKS	080E3522CUD6QBKT	12/28/2025	268.890
151	Pengembalian Belanja SPM 05623 SP2D 259991311441099_MKKS	0BC2F0JUTPH8PBL2	12/28/2025	3.180.536
152	Pengembalian Belanja SPM 05620 SP2D 259991311447829_MKKS	643FA522CUD6QBL7	12/28/2025	380.500
153	Pengembalian Belanja SPM 05398 SP2D 259991311411438_MKKS	539168JOC8MOEBLB	12/28/2025	299.606
154	Pengembalian Belanja SPM 05470 SP2D 259991311427303_MKKS	2BB51522CUD6QBLH	12/28/2025	721.475
155	Pengembalian Belanja SPM 05555 SP2D 259991311441098_MKKS	D213E7NASE4C1BLK	12/27/2025	2.012.076
156	Pengembalian Belanja SPM 05401 SP2D 259991311411435_MKKS	756F30JUTPH8PBLM	12/28/2025	255.300
157	Pengembalian Belanja SPM 03245 SP2D259991310744784_RTP	18B826QTCJHVKBM7	12/28/2025	2.178.099
158	Pengembalian Belanja SPM 03355 SP2D 259991310757902_BALAK	08FD78JOC8MOEC2P	12/29/2025	913.383
159	Pengembalian Belanja SPM 02612 SP2D 259991310514177_RBKUNWAS	AB5892CPTM1JC2S	12/28/2025	2.107.873
160	Pengembalian Belanja SPM 05795 SP2D 259991311456260_KIP	92DB67NASE4C1C32	12/28/2025	372.840
161	Pengembalian Belanja SPM 05784 SP2D 259991311456257_KIP	56C5D8JOC8MOEC33	12/28/2025	755.510
162	Pengembalian Belanja SPM 03878 SP2D 259991310930036_BALAK	EFB018JOC8NBGV79	12/29/2025	192.830
163	Pengembalian Belanja SPM 4668 SP2D 259991311187866_BALAK	DF7AD8JOC8NBGV81	12/29/2025	28.000
164	Pengembalian Belanja SPM 4472 SP2D 259991311155709_BALAK	21146522CUDPSVR5	12/29/2025	2.677.420
165	Pengembalian Belanja SPM 02642 SP2D 259991310544552_BALAK	F633E45KT3RDFVUI	12/29/2025	1.463.170
166	Pengembalian Belanja SPM 03582 SP2D 259991310840566_BALAK	36C4F6QTCJII0HN	12/29/2025	505.672
167	Pengembalian Belanja SPM 4509 SP2D 259991311155708_BALAK	A9F9B7NASE4V40S2	12/29/2025	3.180.910
168	Pengembalian Belanja SPM 4825 SP2D 259991311254867_BALAK	6F756522CUDPT119	12/29/2025	8.908.060
169	Pengembalian Belanja SPM 4825 SP2D 259991311254867_BALAK	B21577NASE4V4170	12/29/2025	7.593.220
170	Pengembalian Belanja SPM 4825 SP2D 259991311254867_BALAK	4DC9445KT3RDG1AK	12/29/2025	571.092
171	Pengembalian Belanja SPM 04253 SP2D 259991311077390_BALAK	4384C7NASE4V41FO	12/29/2025	342.591
172	Pengembalian Belanja SPM 05564 SP2D 259991311447816_YANLIK	7CA8B45KT3RDG2I0	12/30/2025	293.500
173	Pengembalian Belanja SPM 05506 SP2D 259991311436450_YANLIK	EF3582CPTM1K2T6	12/30/2025	1.762.000
174	Pengembalian Belanja SPM 4552 SP2D 259991311155672_BALAK	4CC7D2CPTM1K3K0	12/29/2025	1.562.880
175	Pengembalian Belanja SPM 05569 SP2D 259991311464336_KEU	A1CB5397D9913BR5	12/29/2025	1.835.500
176	Pengembalian Belanja SPM 04829 SP2D 259991311216692_KIP	2B4F58JOC8NL2NJ9	12/30/2025	252.320
177	Pengembalian Belanja SPM 4825 SP2D 259991311254867_BALAK	612315UFSP0FRNLC	12/30/2025	50.000
178	Pengembalian Belanja SPM 4456 SP2D 259991311145043_BALAK	D40C22CPTMU7NMIG	12/30/2025	4.819.174
179	Pengembalian Belanja SPM 4825 SP2D 259991311254867_BALAK	E58BC397D99AKNMR	12/30/2025	1.448.226
180	Pengembalian Belanja SPM 04177 SP2D 259991311054890_BALAK	1FEA41GCDK4HQNNND	12/30/2025	1.098.660
181	Pengembalian Belanja SPM 03119 SP2D 259991310703877_BALAK	19B048JOC8NL2NO9	12/30/2025	51.920
182	Pengembalian Belanja SPM 4825 SP2D 259991311254867_BALAK	B7F0C45KT3RN1NP2	12/30/2025	6.832.953
183	Pengembalian Belanja SPM 02934 SP2D 259991310649744_BALAK	634A62CPTMU7NQI	12/30/2025	2.295.364
184	Pengembalian Belanja SPM 03884 SP2D 259991310930035_BALAK	109C05UFSP0FRU3K	12/30/2025	466.054
185	Pengembalian Belanja SPM 4666 SP2D 259991311187767_BALAK	17A127NASE58LU90	12/30/2025	61.200

Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	NTPN	Tanggal Bayar	Nominal
Akun 524111 (Pengembalian Belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa)				
186	Pengembalian Belanja SPM 4666 SP2D 259991311187767_BALAK	561152CPTMU7UDG	12/30/2025	78.000
187	Pengembalian Belanja SPM 03668 SP2D 259991310876729_BALAK	DD25F0JUTPI5DUJC	12/30/2025	4.761.560
188	Pengembalian Belanja SPM 05395 SP2D 259991311411439_RB	FA8CE0JUTPI5E19U	12/31/2025	37.413
189	Pengembalian Belanja SPM 05465 SP2D 259991311419644_RB	AEAE66QTCJIS91CB	12/31/2025	1.352.137
190	Pengembalian Belanja SPM 05507 SP2D 259991311454724_RB	788260JUTPI5E1EA	12/31/2025	2.186.900
191	Pengembalian Belanja SPM 05639 SP2D 259991311449949_RB	3091C1GCDK4HR1F9	12/31/2025	1.434.300
192	Pengembalian Belanja SPM 05756 SP2D 259991311449974_RB	8BA126QTCJIS91G3	12/31/2025	187.160
193	Pengembalian Belanja SPM 05827 SP2D259991311456174_RB	01A4E522CUE3F1GV	12/31/2025	241.500
194	Pengembalian Belanja SPM 05850 SP2D 259991311456224_RB	9DC0E5UFSP0FS1HK	12/31/2025	1.224.000
195	Pengembalian Belanja SPM 05853 SP2D 259991311456222_RB	4F4160JUTPI5E1IM	12/31/2025	88.500
196	Pengembalian Belanja SPM 05853 SP2D 259991311456222_RB	F61437NASE58M1J8	12/31/2025	39.500
197	Pengembalian Belanja SPM 04264 SP2D 259991311080187_BALAKPengembalian Belanja SPM	DCD95397D99AL37J	12/30/2025	772.169
198	Pengembalian Belanja SPM 4396 SP2D 259991311119851_BALAK	E2E6C45KT3RN23A4	12/30/2025	1.038.006
199	Pengembalian Belanja SPM 4825 SP2D 259991311254867_BALAK	26DEB0JUTPI5E3BS	12/30/2025	4.738.070
200	Pengembalian Belanja SPM 05955 SP2D 259991311464337_KEU	7139445KT3RN23T6	12/30/2025	2.972.970
201	Pengembalian Belanja SPM 05783 SP2D 259991311449665_YANLIK	DDD78397D99AL4FT	12/30/2025	264.000
202	Pengembalian Belanja SPM 05783 SP2D 259991311449665_YANLIK	2CC5F397D99AL4GH	12/30/2025	1.128.000
203	Pengembalian Belanja SPM 05751 SP2D 259991311449975_YANLIK	CC355522CUE3F4HH	12/30/2025	1.139.000
204	Pengembalian Belanja SPM 03843 SP2D 259991310928110_BALAK	D7ACA7NASE58M4V2	12/30/2025	1.071.064
205	Pengembalian Belanja SPM 5065 SP2D 259991311313014_BALAK	64D320JUTPI5E528	12/30/2025	12.000
206	Pengembalian Belanja SPM 03240 SP2D 259991310734397_RTP	A60876QTCJIS956H	12/30/2025	2.279.599
207	Pengembalian Belanja SPM 05701T SP2D 259991311447825_YANLIK	A35770JUTPI5E586	12/30/2025	191.000
208	Pengembalian Belanja SPM 05701 SP2D 259991311447825_YANLIK	2F4566QTCJIS9591	12/30/2025	285.000
209	Pengembalian Belanja SPM 05647 SP2D 259991311443453_YANLIK	7082D0JUTPI5E6TK	12/30/2025	1.756.407
210	Pengembalian Belanja SPM 05647 SP2D 259991311443453_YANLIK	7DC740JUTPI5E6US	12/30/2025	2.257.350
211	Pengembalian Belanja SPM 03934 SP2D 259991310941053_PROTOKOLER	A53F38JOC8NL3729	12/31/2025	154.314
212	Pengembalian Belanja SPM 04225 SP2D 259991311054891_PROTOKOLER	DC522397D99AL757	12/31/2025	67.620
213	Pengembalian Belanja SPM 05848A SP2D 259991311456172_PROTOKOLER	B334D522CUE3F7BR	12/31/2025	213.566
214	Pengembalian Belanja SPM 04905 SP2D 259991311289913_PROTOKOLER	8F2027NASE58M7G0	12/31/2025	194.280
215	Pengembalian Belanja SPM 05359 SP2D 259991311404363_RB2	2316F45KT3RN27K8	12/31/2025	964.170
216	Pengembalian Belanja SPM 05466 SP2D 259991311427304_RB2	A9D380JUTPI5E7LC	12/31/2025	4.441.117
217	Pengembalian Belanja SPM 05461 SP2D 259991311427305_RB2	0B02B2CPTMU87NK	12/31/2025	386.250
218	Pengembalian Belanja SPM 05483 SP2D 259991311419643_RB2	422F38JOC8NL37O5	12/31/2025	2.115.886
219	Pengembalian Belanja SPM 05512 SP2D 259991311420635_RB2	D4EAF7NASE58M7OO	12/31/2025	1.419.800
220	Pengembalian Belanja SPM 05538 SP2D 259991311426989_RB2	A88B3397D99AL7PH	12/31/2025	1.286.530
221	Pengembalian Belanja SPM 05573 SP2D 259991311441095_RB2	172A745KT3RN27Q6	12/31/2025	1.386.094
222	Pengembalian Belanja SPM 05594 SP2D 259991311449951_RB2	F4F5745KT3RN27QQ	12/31/2025	3.361.000
223	Pengembalian Belanja SPM 05663 SP2D 259991311450841_TDP	5F5CF5UFSP0FS7R6	12/31/2025	50.400
224	Pengembalian Belanja SPM 05730 SP2D 259991311447822_TDP	C01862CPTMU87RM	12/31/2025	192.000
225	Pengembalian Belanja SPM 04656 SP2D 259991311213051_TDP	FBA2E2CPTMU87SA	12/31/2025	493.650

Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	NTPN	Tanggal Bayar	Nominal
Akun 524111 (Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa)				
226	Pengembalian Belanja SPM 04656 SP2D 259991311213051_TDP	0B0AC0JUTPI5E7SS	12/31/2025	901.100
227	Pengembalian Belanja SPM 02783 SP2D 259991310586703_BALAK	D6A225UFSP0FS814	12/31/2025	1.904.642
228	Pengembalian Belanja SPM 05568 SP2D 259991311447814_YANLIK	633A92CPTEMU882I	12/30/2025	9.261.205
229	Pengembalian Belanja SPM 05780 SP2D 259991311449667_YANLIK	A373A7NASE58M840	12/30/2025	2.240.863
230	Pengembalian Belanja SPM 03378 SP2D 259991310773026_YANLIK	CB6B5522CUE3F85F	12/30/2025	3.131.000
231	Pengembalian Belanja SPM 03378 SP2D 259991310773026_YANLIK	040EC522CUE3F85P	12/30/2025	1.610.090
232	Pengembalian Belanja SPM 05564 SP2D 259991311447816_YANLIK	9FEFD5UFSP0FS88K	12/30/2025	2.711.500
233	Pengembalian Belanja SPM 05506 SP2D 259991311436450_YANLIK	AB70A0JUTPI5E8FU	12/30/2025	1.990.020
234	Pengembalian Belanja SPM 05291 SP2D 259991311374483_YANLIK	F1B851GCDK4HRANH	12/30/2025	2.096.190
235	Pengembalian Belanja SPM 05759 SP2D 259991311449972_YANLIK	1E0CB7NASE58MAQ8	12/30/2025	2.482.401
236	Pengembalian Belanja SPM 05759 SP2D 259991311449972_YANLIK	C647E7NASE58MAQI	12/30/2025	412.600
237	Pengembalian Belanja SPM 05759 SP2D 259991311449972_YANLIK	A7A050JUTPI5EAQU	12/30/2025	1.295.500
238	Pengembalian Belanja SPM 05797 SP2D 259991311456231_YANLIK	612A8397D99ALAST	12/31/2025	476.660
239	Pengembalian Belanja SPM 05797 SP2D 259991311456231_YANLIK	268F32CPTEMU8AT6	12/30/2025	3.058.129
240	Pengembalian Belanja SPM 05742 SP2D 259991311447820_SDMOH	009518JOC8NL3BU7	12/31/2025	5.225.583
241	Pengembalian Belanja SPM 05862 SP2D 259991311456221_SDMOH	998F87NASE58MBUG	12/31/2025	302.180
242	Pengembalian Belanja SPM 05641 SP2D 259991311441100_SDMOH	814B3522CUED0JKV	12/31/2025	4.653.662
243	Pengembalian Belanja SPM 05769 SP2D 259991311447818_TDP Banyuwangi 16 - 18	141148JOC8NUKJU5	12/31/2025	3.174.600
244	Pengembalian Belanja SPM 03242 SP2D 259991310734396_RTP	B0DFA2CPTEN7PLRG	12/31/2025	2.316.099
245	Pengembalian Belanja SPM 05281 SP2D 259991311388135_RB2	057C645KT3S0JNDI	12/31/2025	3.675.600
246	Pengembalian Belanja SPM 05283 SP2D 259991311388134_RB2	BA2731GCDK4RCNJD	12/31/2025	627.210
247	Pengembalian Belanja SPM 05460 SP2D 259991311420314_RB2	6F81E522CUED0NM1	12/31/2025	1.394.660
248	Pengembalian Belanja SPM 05679 SP2D 259991311450838_RB2	AF8F28JOC8NUKNQ7	12/31/2025	3.326.020
249	Pengembalian Belanja SPM 05830 SP2D 259991311456228_RB2	0C03C0JUTPIEVNT2	12/31/2025	980.000
250	Pengembalian Belanja SPM 04636 SP2D 259991311213052_RB2	DFB692CPTEN7POR4	12/31/2025	3.947.646
251	Pengembalian Belanja SPM 04635 SP2D 259991311213053_RB2	931E71GCDK4RCPEF	12/31/2025	1.633.030
252	Pengembalian Belanja SPM 05835 SP2D 259991311456227_RB2	96991522CUED0PFR	12/31/2025	232.108
253	Pengembalian Belanja SPM 04921 SP2D 259991320740191_RB2	C3D910JUTPIEVP8	12/31/2025	1.380.220
254	Pengembalian Belanja SPM 05852A SP2D 259991311456170_PROTOKOLER	D2FF6QTCJJ5QQ3J	12/31/2025	28.000
255	Pengembalian Belanja SPM 03877 SP2D 259991310928103_PROTOKOLER	096CD45KT3S0JQA2	12/31/2025	1.290.290
256	Pengembalian Belanja SPM 04542 SP2D 259991311155674_PROTOKOLER	B0E37397D99K6QFV	12/31/2025	190.912
257	Pengembalian Belanja SPM 05639 SP2D 259991311449949_RB1	97E930JUTPIEVQGG	12/31/2025	4.316.601
258	Pengembalian Belanja SPM 05446 SP2D 259991311420316_RB1	4296F5UFSP0PDQO6	12/31/2025	911.972
259	Pengembalian Belanja SPM 4449 SP2D 259991311145044_BALAK	86D517NASE5I7QQO	12/31/2025	81.677
260	Pengembalian Belanja SPM 5065 SP2D 259991311313014_BALAK	E1D48522CUED0QS7	12/31/2025	45.000
261	Pengembalian Belanja SPM 05465 SP2D 259991311419644_RB1	A16026QTCJJ5QQST	12/31/2025	2.757.150
262	Pengembalian Belanja SPM 03843 SP2D 259991310928110_BALAK	916F28JOC8NUKR1V	12/31/2025	1.763.576
263	Pengembalian Belanja SPM 05827 SP2D 259991311456174_RB1	40CD51GCDK4RCRC1	12/31/2025	2.701.342

Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	NTPN	Tanggal Bayar	Nominal
Akun 524111 (Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa)				
264	Pengembalian Belanja SPM 03296 SP2D 259991310767434_RB1	863A85UFSP0PDS8U	12/31/2025	4.881.699
265	Pengembalian Belanja SPM 03068T SP2D 259991310696064_STAF AHLI	794278JOC8NUKTA5	12/31/2025	224.797
266	Pengembalian Belanja SPM 03342 SP2D 259991310743399_STAF AHLI	39D6145KT3S0JTBI	12/31/2025	86.027
267	Pengembalian Belanja SPM 04032 SP2D 259991311034235_STAF AHLI	0BAC8522CUED0TCH	12/31/2025	143.760
268	Pengembalian Belanja SPM 04239 SP2D 259991311067822_STAF AHLI	C684C0JUTPIEVTDK	12/31/2025	650.416
269	Pengembalian Belanja SPM 04240 SP2D 259991311067821_STAF AHLI	E2BEB6QTCJJ5QTEF	12/31/2025	131.150
270	Pengembalian Belanja SPM 04486 SP2D 259991311134728_STAF AHLI	9B18E8JOC8NUKTF5	12/31/2025	431.738
271	Pengembalian Belanja SPM 05011 SP2D 259991311313017_STAF AHLI	5ED306QTCJJ5QTFN	12/31/2025	77.308
272	Pengembalian Belanja SPM 05661 SP2D 259991311457997_STAF AHLI	FC8A3397D99K6TGH	12/31/2025	863.500
273	Pengembalian Belanja SPM 05662 SP2D 259991311449978_STAF AHLI	4FEAB6QTCJJ5QTH9	12/31/2025	7.658.106
274	Pengembalian Belanja SPM 4449 SP2D 259991311145044_BALAK	7EC2E5UFSP0PDTJO	12/31/2025	302.500
275	Pengembalian Belanja SPM 4449 SP2D 259991311145044_BALAK	599396QTCJJ5QTKD	12/31/2025	176.565
276	Pengembalian Belanja SPM 02606 SP2D 259991310527285_BALAK	1FF877NASE5I7TUE	12/31/2025	97.195
277	Pengembalian Belanja SPM 03126 SP2D 259991310710202_BALAK	48DC56QTCJJ5QUFJ	12/31/2025	65.692
278	Pengembalian Belanja SPM 03196 SP2D 259991310716805_BALAK	159B51GCDK4RCUGL	12/31/2025	253.495
279	Pengembalian Belanja SPM 03068 SP2D 259991310696064_STAF AHLI	40F6D397D99K6USJ	12/31/2025	224.797
280	Pengembalian Belanja SPM 03843 SP2D 259991310928110_BALAK	95F660JUTPIEVV9K	12/31/2025	33.077
281	Pengembalian Belanja SPM 03843 SP2D 259991310928110_BALAK	045582CPTEN7PVA0	12/31/2025	41.770
282	Pengembalian Belanja SPM 05969 SP2D 259991311466845_PROTOKOLER	5F7690JUTPIEVVCE	12/31/2025	1.785.588
283	Pengembalian Belanja SPM 05844 SP2D 259991311456173_PROTOKOLER	31A016QTCJJ5QVMV	12/31/2025	23.868.619
284	Pengembalian Belanja SPM 03103 SP2D 259991310693354_PERSURATAN	0B7170JUTPIF00AE	12/31/2025	901.400
285	Pengembalian Belanja SPM 03102 SP2D 259991310693355_PERSURATAN	AFE8D5UFSP0PE0BS	12/31/2025	80.000

Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	NTPN	Tanggal Bayar	Nominal
Akun 524111 (Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa)				
286	Pengembalian Belanja SPM 03296 SP2D 259991310767434_RBKUNWAS	3F96D0JUTOECJQS2	14/11/2025	2.305.947
287	Pengembalian Belanja SPM 02755 SP2D 259991310592751_SDMA	C08AD522CU7HF0T9	12/15/2025	245.935
288	Pengembalian Belanja SPM 02754 SP2D 259991310592716_SDMA	6352B1GCDJTVR0UD	12/15/2025	2.321.650
289	Pengembalian Belanja SPM 03856 SP2D 259991310928104_BALAK	AADE6522CUA7C2LP	12/24/2025	536.713
290	Pengembalian Belanja SPM 5952 SP2D 259991311456170_PROTOKOLER	487300JUTPIF027M	12/31/2025	1.334.340
Subtotal Akun 524111				540.142.489
Akun 524113 (Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota)				
1	Pengembalian Belanja SPM 00454 SP2D 251331301006980_uang saku transport lokal a.n. Cahyono Tri Birowo sesuai ST nomor 130/KT.03/2025	2DD91522CPGDAR18	1/7/2025	170.000
2	Pengembalian Belanja SPM 00965 SP2D 251331301014109 MKK_Transport Lokal ke Kementerian Dalam Negeri dalam rangka Pendampingan Menteri PANRB pada Rapat bersama	73F051GCDF7OBE5H	4/7/2025	340.000
3	Pengembalian Belanja SPM 03228 SP2D 259991310725288_transport an Citra Adilbert MKKS	C45B96QTCHH9JA53	16/10/2025	170.000
4	Pengembalian Belanja SPM 3644 SP2D 259991310852789_RB translok an Febry Bagas	E75056QTCHJCCAQF	20/10/2025	170.000
5	Pengembalian Belanja SPM 03856 SP2D 259991310928104_BALAK	12BD345KT3J286O8	12/1/2025	170.000
6	Pengembalian Belanja SPM 5902 SP2D 259991311468247_RTP (Kelebihan SPJ a.n ASTRID	4DA3B522CUDGBIUL	29/12/2025	510.000
Subtotal Akun 524113				1.530.000

Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	NTPN	Tanggal Bayar	Nominal
Akun 524114 (Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota)				
1	Pengembalian Belanja SPM 01324 SP2D 251331301018599_Pengembalian Lebih Bayar Transport Noviana	FF1CD6QTCEL6514E	1/7/2025	170.000
2	Pengembalian Belanja SPM 00706 SP2D 251331301011821_Pengembalian Lebih Bayar Transport Noviana	A65672CPT9P84132	1/7/2025	170.000
3	Pengembalian Belanja SPM 00106 SP2D 251331301002201 RTP_ Pengembalian uang transport kegiatan meeting tanggal 17 Januari 2025 di Hotel Mercure a.n Slamet	BA07F5UFSK4J0BQE	8/7/2025	170.000
4	Pengembalian Belanja SPM 00106 SP2D 251331301002201 RTP_ Pengembalian uang transport kegiatan meeting tanggal 17 Januari 2025 di Hotel Mercure a.n Virgilio	C6C965UFSK4J0BR3	10/7/2025	170.000
5	Pengembalian Belanja SPM 1898 SP2D 259991310259116_SDMA (norek tidak ditemukan a.n Sobandi)	723572CPTBS0QA4M	30/09/2025	265.000
6	Pengembalian Belanja SPM 1898 SP2D 259991310259116_SDMA (norek tidak ditemukan a.n Pangihutan Marpaung)	22649522CRJ61A4P	30/09/2025	265.000
7	Pengembalian Belanja SPM 03139 SP2D 259991310713750_Nomor rekening tidak ditemukan a.n Muhamad Syifa (YANLIK)	251915UFSMSQCT92	6/10/2025	300.000
8	Pengembalian Belanja SPM 03590 SP2D 259991310840559 (BALAK)_Retur uang saku 18 Sept an Kemas M. Ikhwani	F52D86QTCHKI8NV	21/10/2025	265.000
9	Pengembalian Belanja SPM 00973 SP2D 251331301014724 SDMA_ Uang Transport Pegawai yg Mendapatkan Fasilitas Kendaraan Dinas	11CE37NASCVMIKIU	11/11/2025	170.000
10	Pengembalian Belanja SPM 00973 SP2D 251331301014724 SDMA_ Uang Transport Pegawai yg Mendapatkan Fasilitas Kendaraan Dinas	5772E6QTCIDA6KJH	4/11/2025	170.000
11	Pengembalian Belanja SPM 00187 SP2D 251331301003928 SDMA_ Pengembalian Uang Transport Pegawai yg Mendapatkan Fasilitas Kendaraan Dinas	F50656QTCIDA6KJR	4/11/2025	170.000
12	Pengembalian Belanja SPM 00326 SP2D 251331301005119_SDMA (Pengembalian Uang	2E6538JOC7L2EKHB	14/11/2025	170.000
Subtotal Akun 524114				2.455.000
Akun 524119 (Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota)				
1	Pengembalian Belanja SPM 2445 SP2D 259991311432639 RTP (Kelebihan SPJ Uang Harian a.n Gede Putu Pustaka Eka Putera)	3A4DB45KT3ONJE0K	22/12/2025	130.000
2	Pengembalian Belanja SPM 05333 SP2D 259991311432639 RTP (Tidak di temukan Rek a.n AULIA FARAH DHITASAR)	9AE1A7NASE4V42K0	29/12/2025	130.000
Subtotal Akun 524119				260.000
JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA				544.387.489

Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950)											
No	Unit Kerja	Tanggal Bayar	BULAN	Nilai	Kode Billing	NTPN	NTB/NTP	Kode Akun	No SPM	No Sp2D	Keterangan
No	Unit Kerja	Tanggal Bayar	BULAN	Nilai	Kode Billing	NTPN	NTB/NTP	Kode Akun	No SPM	No Sp2D	Keterangan
1	RBKUNWAS	08/01/2025	1	Rp20.000	820250108993207	10E3148VVNNNJ7LN	2006681149	425912	04627	241331301047789	Pengembalian Belanja SPM 4627 SP2D 241331301047789_RB (Kelebihan
2	SDMA	09/01/2025	1	Rp192.000	820250109195849	02E700NA0DE65DI9	250109047006	425912	00812	241331301010486	Pengembalian Belanja SPM 00812A SP2D 241331301010486_SDMA
3	SDMA	09/01/2025	1	Rp678	820250109214695	145A50NA0DE65VV7	250109046955	425912	00812	241331301010486	Pengembalian Belanja SPM 00812 SP2D 241331301010486_SDMA
4	SDMA	09/01/2025	1	Rp170.000	820250109214836	7C2F67QLV219E03K	250109046905	425912	00128	241331301002530	Pengembalian Belanja SPM 00128 SP2D 241331301002530_SDMA
5	SDMA	09/01/2025	1	Rp170.000	820250109214979	35EA10NA0DE66083	250109046831	425912	01043	241331301014449	Pengembalian Belanja SPM 01043 SP2D 241331301014449_SDMA
6	SDMA	09/01/2025	1	Rp279.100	820250109215148	32E740NA0DE660DC	250109047076	425912	00763	241331301010443	Pengembalian Belanja SPM 00763 SP2D 241331301010443_SDMA
7	YANLIK 2	13/01/2025	1	Rp2.374.093	820250113590643	905531JNG80MOHBJ	000087585838	425912	06567	241331303021128	Pembayaran Kontrak Swakelola Tipe II Antara Kementerian PANRB dengan LPPSP-UI tentang Penyusunan Peta Jalan Pelayanan Publik Nasional Tahun
8	RBKUNWAS	20/01/2025	1	Rp170.000	820250120634223	935113CIFT5M9FRF	250121042965	425912	00263	241331301004260	Pengembalian Belanja SPM 263 SP2D 241331301004260_RB (Pengembalian
9	RBKUNWAS	20/01/2025	1	Rp170.000	820250120634510	0D53A61QVCSRGG4E	250121008568	425912	00214	241331301003894	Pengembalian Belanja SPM 214 SP2D 241331301003894_RB (Pengembalian
10	RBKUNWAS	20/01/2025	1	Rp170.000	820250120586267	600F26U8F7V7S10R	250120035542	425912	00263	241331301004260	Pengembalian Belanja SPM 263 SP2D 241331301004260_RB (Pengembalian
11	RBKUNWAS	20/01/2025	1	Rp170.000	820250120583055	CBE2D61QVCSRETSF	250120031667	425912	00263	241331301004260	Pengembalian Belanja SPM 263 SP2D 241331301004260_RB (Pengembalian
12	RBKUNWAS	20/01/2025	1	Rp170.000	820250120583344	FC97A26E502J9CUG5	250120031864	425912	00543	241331301008058	Pengembalian Belanja SPM 543 SP2D 241331301008058_RB (Pengembalian
13	RBKUNWAS	24/01/2025	1	Rp170.000	820250122899243	AA4807QLV21MFJPB	250124019498	425912	00497	241331301007106	Pengembalian Belanja SPM 497 SP2D 241331301007106_RB
14	RBKUNWAS	24/01/2025	1	Rp170.000	820250124250802	626331JNG81OTRLI	250124029484	425912	00832	241331301003894	Pengembalian Belanja SPM 832 SP2D 241331301003894_RB (Pengembalian
15	RBKUNWAS	24/01/2025	1	Rp255.000	820250124251166	D3D5061QVCSUU50U	250124029719	425912	00575	231331301007279	Pengembalian Belanja SPM 575 SP2D 231331301007279_RB (Pengembalian
16	YANLIK 2	24/01/2025	1	Rp2.000.000	820250124293311	B78D33CIFT5PP55V	250125013709	425912	00901	241331301011946	Pengembalian Belanja SPM 00901 SP2D 241331301011946_YANLIK (kelebihan
17	YANLIK 2	24/01/2025	1	Rp300.000	820250124293603	ED3D461QVCSV05F3	250125013624	425912	00331	241331301005035	Pengembalian Belanja SPM 00331 SP2D 241331301005035_YANLIK (kelebihan
18	YANLIK 2	24/01/2025	1	Rp1.600.000	820250124293805	0560B48VVNO665LD	250125013667	425912	00624	241331301009073	Pengembalian Belanja SPM 00624 SP2D 241331301009073_YANLIK (kelebihan
19	YANLIK 2	24/01/2025	1	Rp1.200.000	820250124294101	461313CIFT5PP5UL	250125013729	425912	00759	241331301010	

Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950)											
No	Unit Kerja	Tanggal Bayar	BULAN	Nilai	Kode Billing	NTPN	NTB/NTP	Kode Akun	No SPM	No Sp2D	Keterangan
46	RTP	24/03/2025	3	Rp3.822.653	820250324188731	D37E361QVD2TKFHR	731276119706	425913	06597	241331302034828	Pengembalian TAYL SPM 06597 SP2D 241331302034828 (Pengadaan Jasa
47	RTP	24/03/2025	3	Rp450.000	820250324204889	FCDEB61QVD2TKVAP	135490104686	425913	05951	241331302031872	Pengembalian TAYL SPM 05951T SP2D 241331302031872 (Pekerjaan Jasa
48	RTP	24/03/2025	3	Rp11.965.000	820250324201118	634EA55DFIGH7RKU	730305104687	425913	06590	241331302034833	Pengembalian TAYL SPM 06590 SP2D 241331302034833 (Pengadaan Jasa
49	RTP	24/03/2025	3	Rp4.152.510	820250324208132	6AB9761QVD2LT2GA	781478119715	425913	06589	241331302034832	Pengembalian TAYL SPM 06589 SP2D 241331302034832 (Pengadaan Jasa
50	RTP	24/03/2025	3	Rp24.810.000	820250324203977	970EE3CIFTBODUE9	781316109165	425913	02711	241331302017025	Pengembalian TAYL SPM 02711 SP2D 241331302017025 (Pekerjaan Renovasi
51	RTP	24/03/2025	3	Rp1.934.000	820250324190306	4965F48VVNU4QH32	201980126704	425913	06497	241331302034656	Pengembalian TAYL SPM 06497 SP2D 241331302034656 (Pengadaan Jasa
52	RTP	24/03/2025	3	Rp880.000	820250324189506	BA7E748VVNU4QGA2	285276119756	425913	06485	241331302034657	Pengembalian TAYL SPM 06485 SP2D 241331302034657 (Pekerjaan Jasa
53	RTP	16/4/2025	4	Rp4.492.940	820250415454739	6346D6U8F7O12MGJ	213531749588	425913	06593	241331302034659	Pengembalian TAYL SPM 06593 SP2D 241331302034659 (Pengadaan Jasa
54	RTP	22/4/2025	4	Rp3.250.000	820250417815990	5AEB46U8F7O3AODM	250422022025	425913	02033	241331303008363	Pengembalian TAYL SPM 02033 RTP_Pengembalian Peremajaan Instalasi Public
55	RTP	22/4/2025	4	Rp14.381.410	820250424663950	F33040NA0DNJ0NSE	350335463810	425913	03060	241331302018685	Pengembalian TAYL SPM 03060 RTP_Pekerjaan Renovasi Command Center
56	RTP	24/4/2025	4	Rp16.852.023	820250421097668	BB6DD48VVO117T64	000090406792	425913	06490	241331303021239	Pengembalian TAYL SPM 06490 RTP_Pengembalian Pengadaan Jasa Pelaksana
57	RTP	24/4/2025	4	Rp29.917.108	820250421098307	3938461QVD5Q1TQ3	000090407404	425913	06491	241331303021096	Pengembalian TAYL SPM 06491 RTP_Pengembalian Pengadaan Lemari Arsip
58	RTP	24/4/2025	4	Rp16.033.000	820250422402345	88D143CIFTEM2N99	000090410728	425913	05950	241331302031864	Pengembalian TAYL SPM 05950 RTP_Pengembalian Pengadaan Jasa Pelaksana
59	RTP	24/4/2025	4	Rp25.523.000	820250424668934	8281D7QLV2AM8SO6	000090410803	425913	06592	241331302034866	Pengembalian TAYL SPM 06592 RTP_Pekerjaan Renovasi Halaman Gedung
60	RTP	24/4/2025	4	Rp29.359.000	820250424666086	BA30F61QVD5TEPVE	000090416595	425913	06482	241331302034638	Pengembalian TAYL SPM 06482 RTP_Pengadaan Gorden SDMA
61	RTP	24/4/2025	4	Rp22.223.035	820250424665500	0A48A48VVO14KPCS	000090416711	425913	06163	241331302032852	Pengembalian TAYL SPM 06163 RTP_Pengadaan Fasade Backdrop Panggung
62	RTP	24/4/2025	4	Rp1.661.000	820250424666933	CA94F0NA0DNJ0QPL	000090416758	425913	05725	241331302030380	Pengembalian TAYL SPM 05725 RTP_Pengadaan Gorden Holding Room
63	RTP	24/4/2025	4	Rp7.531.290	820250424667808	93C9061QVD5TERL0	000090416802	425913	06162	241331302032901	Pengembalian TAYL SPM 06162 RTP_Pekerjaan Renovasi Atap Gedung Pekayon
64	YANLIK 1	24/4/2025	4	Rp2.756.203	820250430665077	037807QLV2ARVBSL	250430071049	425912	02048	241331301026360	Pengembalian TAYL SPM 2048 YANLIK_Kelebihan Pembayaran Uang Harian
65	RTP	30/4/2025	4	Rp30.000.000	820250430605986	DBBE355DFIJMNL2L	000090622806	425913	06754	241331301065098	Pengembalian TAYL SPM 06754 RTP_Pekerjaan Pengadaan CCTV Gedung
66	YANLIK 1	1/5/2025	5	Rp2.782.390	820250430580241	8D7FA3CIFTETS9GH	250501008864	425912	02007	241331301026178	Pengembalian TAYL SPM 2007 YANLIK_Kelebihan Pembayaran Uang Harian
67	YANLIK 1	1/5/2025	5	Rp2.756.203	820250430665386	C48487QLV2ARVSLA</					

4. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat KL

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA) TAHUNAN TA 2025

Kode dan Nama K/L : (048) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	V		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akruai Saldo Awal	V		Ada
2	Neraca Percobaan Akruai	V		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	V		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	V		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V	Tidak
5	Terdapat Ketidakesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidakesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9	Ketidakesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidakesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		V	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNPB		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak

	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materi dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya

1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	V		Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		V	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		V	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		V	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		V	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		V	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		-	
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		(11.015.070.996)	
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	V		Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	V		Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?		V	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat masukkannya?)			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah	V		Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaan sebesar saldo kas dan Bank BLU belum diakukan atau Deposite	V		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		V	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	V		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	V		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	V		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	V		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		V	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SikPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan			Ya



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta 12190 (021) 7398381



www.menpan.go.id



[@kemenpanrb](https://www.instagram.com/kemenpanrb)